

Vol. 07 No. 01 Juni 2022

E-ISSN : 2527-4821



**JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN**

Diterbitkan oleh :



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG  
KERJA SAMA DENGAN  
ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA (AP3Knl)

---

# **JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN**

**VOLUME 7 NOMOR 1 Juni 2022**

Jurnal Moral Kemasyarakatan terbit 2 kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian bidang moral, nilai, karakter dan berbagai tindakan yang memiliki dampak positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. ISSN 2527-4821 (Online).

## **Editor in Chief**

Andri Fransiskus Gultom, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

## **Managing Editor**

Ludovikus Bomans Wadu, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

## **Editor**

**Kususanto Ditto Prihadi**, HELP University, Malaysia

**Suciati**, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

**Khoirul Bariyah**, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

**Fauzi Abdillah**, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

**Meidi Saputra**, Universitas Negeri Malang, Indonesia

**Ade Engkus Kusnadi**, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

**Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien**, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

## **Peer Reviewers**

**Solihin Ichas Hamid**, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

**Mohammad Mona Adha**, Universitas Lampung, Indonesia

**Theodorus Pangalila**, Universitas Negeri Manado, Indonesia

**Yuyus Kardiman**, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

**Hipolitus Kristoforus Kewuel**, Universitas Brawijaya, Indonesia

**Yuventia Prisca D. Todalani Kalumbang**, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

**Nurul Febrianti**, Universitas Esa Unggul, Indonesia

**Yogi Nugraha**, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

**Beny Dwi Lukitoaji**, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

**Erwin Susanto**, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

## **Alamat Penyuntingan dan Pelaksana Administrasi:**

Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,  
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Gedung H Lantai 3,  
Jl. Supriyadi No 48 Kota Malang 65148. Email : [jmk@unikama.ac.id](mailto:jmk@unikama.ac.id)

---

## Editorial

Pembaca yang budiman, pada edisi Volume 7 Nomor 1 kali ini, Jurnal Moral Kemasyarakatan menambah jumlah naskah yang diterbitkan ditiap nomornya dari 5 naskah menjadi 10 naskah. Pada edisi kali ini Jurnal Moral Kemasyarakatan menerbitkan naskah hasil penelitian dalam bidang moral, nilai, karakter dan berbagai tindakan yang memiliki dampak positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Artikel pertama ditulis oleh **Eva Faradisa, Supriyono, A Rosyid Al Atok** dengan judul Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Gotong Royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya mental gotong royong berangkat dari pandangan bahwa nilai penting kualitas seseorang hanya menemukan kepenuhan makna dalam jaringan kerja sama dengan yang lainnya. Karenanya, usaha membangun mental gotong royong memerlukan berbagai usaha yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Dalam implementasinya, usaha-usaha tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal saja, namun juga dengan pendekatan horisontal yang melibatkan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media massa, pekerja budaya, dunia usaha, dan pemerintah.

Artikel kedua ditulis oleh **Tuti Istianti, Enok Maryani, & Bunyamin Maftuh** dengan judul Traditional Wisdom in Cikondang Traditional Village: A Study of Sabilulungan's Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sabilulungan merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di masyarakat Sunda yang menekankan pada prinsip kerukunan hidup. Selain itu, nilai kearifan lokal Sabilulungan yaitu gotong-royong, kesatuan, kebersamaan, keadilan dan kemanusiaan. Nilai kearifan lokal Sabilulungan di kampung adat Cikondang terbukti mampu menjaga harmonisasi dalam aktivitas gotong-royong dalam kesehariannya dan di setiap tradisi adat dilandasi spontanitas. Konsep Sabilulungan dalam dunia pendidikan dalam rangka membantu seseorang mencapai pembentukan karakter yang menghasilkan generasi yang memiliki watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat.

Artikel ketiga ditulis oleh **Muhammad Hendri Nuryadia & Pipit Widiatmaka** dengan judul Analisis Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Anak Didik di Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis proses pertama, implementasi pendidikan kewarganegaraan dengan jalur pendidikan formal yaitu memberikan teladan. Analisis proses kedua, upaya membentuk karakter anak didik menekankan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Keberhasilan pembelajaran dilakukan dengan memahami kondisi psikologis anak didik. Hal ini untuk mengetahui tindakan dan strategi pembelajaran. Analisis proses ketiga bahwa pembentukan karakter di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya di era pandemi Covid-19 akan berjalan dengan efektif dengan adanya variasi metode pembelajaran dengan dalam membentuk karakter. Para pendidik juga perlu memiliki kompetensi pedagogik dan kepribadian.

Artikel keempat ditulis oleh **Hendri, Ichwani Siti Utami, Lili Nurlaili**. Dengan judul Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, keteladanan guru dan seluruh stakeholder sekolah mampu memberikan dampak positif pada karakter siswa. Kedua, lingkungan dan budaya sekolah yang baik berpotensi pada perkembangan karakter siswa. Ketiga, seluruh aktivitas sekolah yang dibuat melalui musyawarah

---

mufakat yang bertujuan mendisiplinkan karakter siswa yang ada. Jadi, penguatan pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari budaya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menciptakan dan menekankan pada tingkat intelektual dan emosional siswa.

Artikel kelima ditulis oleh **Nadya Putri Saylendra & Fitri Silvia Sofyan** dengan judul Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis *Boardgame*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengembangkan perilaku sadar hukum pada mahasiswa dosen telah melakukan perencanaan secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh dengan mengadaptasi game sebagai media pembelajarannya. Pada proses pelaksanaan pembelajaran menunjukkan antusiasme mahasiswa berpartisipasi secara aktif karena proses belajar yang diberikan menarik minat mereka. Inovasi pembelajaran bagi seorang pendidik merupakan sebuah keniscayaan guna meningkatkan taraf kualitas pendidikan.

Artikel keenam ditulis oleh **Warih Andan Puspitosari, Faudyan Eka Satria, Arni Surwati, & Iswanto** dengan judul Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan analisis dari artikel tersebut ada beberapa komponen tantangan dalam mewujudkan kampus inklusi. Pertama, pandangan masyarakat dan diskriminasi yang menilai bahwa prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi hidup secara optimal adalah dengan memiliki kesempurnaan tubuh. Kedua, perlunya dorongan bagi pemangku kebijakan untuk memenuhi sarana, prasarana serta sumber daya manusia serta kebijakan dalam menyelenggarakan kampus inklusi. Ketiga, manajemen pembelajaran dan sumber daya manusia. Keempat, aksesibilitas layanan kampus yang ditujukan untuk melampaui prasyarat formal sebuah perguruan tinggi dalam menerapkan konsep kampus inklusi.

Artikel ketujuh ditulis oleh **Hatari Marwina Siagian, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, Mia Sanita Siagian, & Wahyuni Siregar** dengan judul Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh agama dan para tokoh masyarakat di Desa Alang Bonbon Kabupaten Asahan masih konsisten menjaga nilai-nilai budaya sesuai dengan adat yang masih berlaku. Hasil penelitian ditemukan bahwa nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada.

Artikel kedelapan ditulis oleh **Hani Subagio, Hani Subagio, Wahyu Wibowo Eko Yulianto, Danang Prasetyo, & Ricky Santoso Muharam** dengan judul Penguatan Karakter Bela Negara di Era Revolusi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat terkait dengan pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan dan memanfaatkan media sosial untuk menggunggah bukti aktualisasi nyata bela negara, sehingga memberikan inspirasi bagi warga negara lainnya. Selain itu mahasiswa mampu menganalisis berdasarkan kasus-kasus yang disajikan bahwa perilaku warganet di sosial media merupakan bagian dari upaya bela negara di era digital. Terbukti 207 responden menjawab bahwa yang dilakukan oleh warganet terhadap berbagai kasus merupakan

---

bagian dari upaya bela negara. Selanjutnya 11 responden menjawab tidak dan 14 responden menjawab ragu-ragu. Hal yang dilakukan warganet di media social dengan memberikan komentar pembelaan apabila terdapat pemberitaan yang merugikan nama baik Indonesia dan dukungan moral.

Artikel kesembilan ditulis oleh **Budiono, Siti Hana Bahrul Marhamah, & Rose Fitria Lutfiana**. Dengan judul Analisis Karakter Gotong Royong Dalam Ekstrakurikuler Pramuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang rutin diadakan setiap hari sabtu di Madrasah Tsanawiyah Darussalam; (2) penanaman karakter gotong royong dilakukan oleh Pembina pramuka pada saat pemberian materi (kognitif) dan saat praktik kegiatan pramuka (psikomotor); (3) metode yang digunakan dalam penanaman karakter gotong royong yaitu menggunakan sistem kelompok atau regu yang terdiri dari 4 – 5 peserta didik; dan (4) karakter gotong royong muncul dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka meliputi sikap kerja sama, sikap tolong menolong, kekeluargaan, dan solidaritas. Pembentukan karakter gotong royong bagi peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Darussalam merupakan pembiasaan baik dari ekstrakurikuler pramuka yang diikuti.

Artikel kesepuluh ditulis oleh **Juliana Tirza, Wiputra Cendana & Tia Kartika Araini** dengan judul Pendidikan Anak Usia Dini tentang Toleransi Beragama sebagai Implementasi Sila Pertama Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berpikir anak usia dini yang belum luas, maka pendidikan anak usia dini tidak bisa disamakan dengan pendidikan orang dewasa. Dalam praktiknya, metode pembelajaran menyertakan gambar dan narasi, peran orang tua dan instruktur sangat penting, sehingga individu tersebut dapat lebih siap belajar. Metode terbaik yang dapat digunakan dengan demikian adalah media yang menarik seperti menggunakan cerita berseri atau gambar. Metode ini juga cocok dengan usia siswa yang masih kecil yang mana cara berpikir, tindakan dan perilaku masih sempit. Metode ini juga membantu siswa TK untuk menumbuhkan toleransi beragama sejak dini.

Demikian paparan singkat dari edisi Jurnal Moral Kemasyarakatan edisi ini. Kiranya berbagai hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan keilmuan bidang nilai, moral dan karakter serta berbagai tindakan yang memiliki dampak positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Selamat membaca.

**Malang, 30 Juni 2022**

**Andri Fransiskus Gultom**  
Chief in Editor Jurnal Moral Kemasyarakatan  
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

---

## Daftar Isi

<b>Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Gotong Royong.....</b>	<b>1-9</b>
Eva Faradisa, Supriyono, & A Rosyid Al Atok	
<b>Traditional Wisdom in Cikondang Traditional Village: A Study of Sabilulungan's Value .....</b>	<b>10-21</b>
Tuti Istianti, Enok Maryani, & Bunyamin Maftuh	
<b>Analisis Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Anak Didik di Masa Pandemi Covid-19.....</b>	<b>22-31</b>
Muhammad Hendri Nuryadia & Pipit Widiatmaka	
<b>Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter.....</b>	<b>32-43</b>
Hendri, Ichwani Siti Utami & Lili Nurlaili	
<b>Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Boardgame .....</b>	<b>44-54</b>
Nadya Putri Saylendra & Fitri Silvia Sofyan	
<b>Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur .....</b>	<b>55-67</b>
Warih Andan Puspitosari, Faudyan Eka Satria, Arni Surwati, & Iswanto	
<b>Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan .....</b>	<b>68-78</b>
Hatari M. Siagian, Rosmawaty Harahap, Elly P.Wuriyani, Mia S. Siagian, & Wahyuni Siregar	
<b>Penguatan Karakter Bela Negara di Era Revolusi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.....</b>	<b>79-93</b>
Hani Subagio, Hani Subagio, Wahyu W. Eko Yulianto, Danang Prasetyo, & Ricky S. Muharam	
<b>Analisis Nilai Gotong Royong Dalam Ekstrakurikuler Pramuka.....</b>	<b>94-100</b>
Budiono, Siti Hana Bahrul Marhamah, & Rose Fitria Lutfiana	
<b>Pendidikan Anak Usia Dini tentang Toleransi Beragama sebagai Implementasi Sila Pertama Pancasila .....</b>	<b>101-108</b>
Juliana Tirza, Wiputra Cendana & Tia Kartika Araini	

## Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Gotong Royong

Eva Faradisa<sup>a,1\*</sup>, Supriyono<sup>b,2</sup>, A Rosyid Al Atok<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>1</sup>eva.faradisa.2007128@students.um.ac.id \*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 18 Mei 2022;

Revised: 23 Mei 2022;

Accepted: 9 Juni 2022.

### Kata-kata kunci:

Pola Asuh Demokratis;  
Kecerdasan Emosional;  
Gotong-Royong.

### Keywords:

*Democratic Parenting;*  
*Emotional Intelligence;*  
*Gotong-Royong.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membuktikan ada tidaknya hubungan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan korelasional yang dianalisis menggunakan teknik analisis data persentase, spearman rank, dan logistik ordinal. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi atau p-value yang didapatkan sebesar  $0,000 < \alpha$  sebesar  $0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, artinya pada tingkat kepercayaan 95% pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional memiliki hubungan signifikan dengan perilaku gotong royong pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Malang. Pentingnya mental gotong royong berangkat dari pandangan bahwa nilai penting kualitas seseorang hanya menemukan kepenuhan makna dalam jaringan kerja sama dengan yang lainnya. Karenanya, usaha membangun mental gotong royong memerlukan berbagai usaha yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Dalam implementasinya, usaha-usaha tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal saja, namun juga dengan pendekatan horisontal yang melibatkan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media massa, pekerja budaya, dunia usaha, dan pemerintah.

### ABSTRACT

The aim of this study is proving whether there is a correlation between democratic parenting and emotional intelligence with mutual cooperation behaviour in students of public high schools in Malang City. The researcher used descriptive and correlational quantitative research methods which were analyzed using data analysis techniques of percentage, Spearman rank, and ordinal logistics. The results of this study indicate the significance value or p-value obtained is  $0,000 < \alpha$  of  $0,05$ . So  $H_0$  is rejected, it means that democratic parenting and emotional intelligence simultaneously have a significant correlation with mutual cooperation behavior in public high school students in Malang City. The importance of the cooperation behaviour mentality stems from the assumption that the important values of quality and self-confidence only find their full meaning in a network of values of cooperation with others. Therefore, the efforts to build a mutual cooperation mentality require various efforts that are carried out consistently, sustainably, and in an integrated manner. In its implementation, these efforts should not only be carried out with a vertical approach, but also with a horizontal approach involving all parties from families, schools, communities, mass media, cultural workers, the business, and the government.

Copyright © 2022 (Eva Faradisa dkk). All Right Reserved

How to Cite : Faradisa, E., Supriyono, & Atok, A. R. A. (2022). Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Gotong Royong. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6931>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Gotong royong sebagai nilai fundamental kearifan lokal bangsa Indonesia, lazimnya lebih dikenal dengan kegiatan tolong menolong dan kerja bakti yang dilakukan secara sukarela. Namun seiring pesatnya laju globalisasi, konsep gotong royong mengalami metamorfosis dalam proses konstruksi sosial (Irfan, 2017). Realita sosial membuktikan kegiatan gotong royong dapat dilakukan tanpa harus melakukan kontak fisik namun tetap memunculkan kaidah-kaidah yang seharusnya. Misalnya, kepedulian masyarakat dengan cara menggalang donasi online guna mengulurkan bantuan kepada masyarakat yang terpapar pandemi Covid-19 sebagai salah satu manifestasi kultur baru, yakni gotong royong digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi secara arif sehingga area cakupannya menjadi lebih luas (Faedlulloh, Meutia, Yulianti, & Karmilasar, 2021).

Sejatinya, proses globalisasi telah memperlihatkan sifat dua maka, globalisasi tidak hanya menyediakan peluang-peluang, kemudahan-kemudahan, dan kebebasan hidup yang lebih menjanjikan, tetapi juga disertai dengan potensi ancaman dehumanisasi baru berupa kemerosotan tata nilai. Realitas permasalahan remaja saat ini banyak berkaitan dengan masalah kepribadian dan interaksi sosial, salah satunya ialah rendahnya perilaku prososialitas yang menyebabkan degradasi budaya gotong royong (Pertwi, 2018). Miris, dorongan globalisasi ke arah sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan justru dengan mudahnya mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional umat manusia yang telah mengakar. Alhasil, globalisasi melahirkan efek yang bersifat paradoks.

Padahal, eksistensi budaya dan juga keberagaman nilai luhur kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun publik. Dalam perkembangannya, konsep gotong royong tidak dapat dimaknai secara dangkal sebatas pada kegiatan solidaritas sosial pedesaan seperti bergotong royong membangun rumah, pelaksanaan tradisi, ataupun perayaan peribadatan (Nashihin & Dewi, 2019). Namun, perilaku gotong royong dapat diekspresikan melalui kesediaan menjadi sukarelawan dalam kegiatan amal ataupun kesediaan mematuhi protokol kesehatan dengan tujuan meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 (Mahardika, Trisiana, Widyastuti, Juhaena, & Kirani, 2020). Bahkan konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena dapat menjadi modal sosial guna membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, negara, dan lintas negara dalam mewujudkan kesejahteraan (Permana & Mursidi, 2020). Karena sejatinya, perilaku gotong royong menghendaki sosiabilitas kebangsaan yang dapat mengatasi kecenderungan individualitas.

Orang tua dengan pola asuh demokratis memiliki hubungan signifikan dengan pembentukan karakter gotong royong (Setianingrum, 2019). Pola pengasuhan secara demokratis berarti memberikan hak kepada anak untuk bereksplorasi secara merdeka yang disertai komitmen tanggung jawab guna mengembangkan kehidupannya sebagai manusia seutuhnya, namun tetap dibarengi dengan pengawasan secara bijaksana dari orang tua (Anggraeni, Andriani, Muliawati, & Faozi, 2018). Sehingga, tugas orang tua bukan justru memaksakan sesuatu hal pada anak, melainkan membantu tumbuhnya potensi dalam diri anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya. Akhirnya, anak akan mampu bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang-orang disekitarnya sesuai dengan nilai-nilai positif yang telah dipelajarinya. Karena sejatinya, anak bukanlah sehelai kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ditulisi dengan dasar-dasar sketsa yang masih buram. Dengan itu, tugas orang tua ialah menebalkan



segala tulisan buram yang berisi elemen baik agar nampak sebagai budi pekerti. Saat yang sama, tulisan buram yang berisi elemen buruk hendaknya ditipiskan bahkan makin dikaburkan agar tak dapat berkembang. Tidak sedikit para orang tua yang merasa telah bersungguh-sungguh berjuang untuk anaknya. Padahal yang terjadi sesungguhnya ialah justru memaksa mereka untuk menjadi seperti yang orang tua inginkan. Hal ini membuat orang tua lupa, bahwasanya anak diciptakan bukanlah untuk menghadapi zaman ini, akan tetapi diciptakan untuk menghadapi tantangan zaman lain yang berbeda.

Selain penerapan pola asuh orang tua yang demokratis, eksistensi karakter gotong royong juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kecerdasan emosional (Noya, 2019). Kecerdasan emosional ialah kemampuan dalam mengontrol dan mengelola emosi yang dirasakan secara bijaksana (Scorsinni, Manurung, Erick, & Pasaribu, 2020). Seseorang yang mempunyai kematangan dalam hal emosi, cenderung memiliki rasa empati yang memunculkan rasa kemanusiaan (Sisrazeni, 2018). Tak pelak, pandangan tentang kodrat manusia yang sering kali cuai terhadap kekuatan emosi, jelas adalah pandangan yang amat dangkal. Karena memiliki kecerdasan emosional telah menjadi suatu kebutuhan yang penting, sebab empati merupakan nilai dasar terciptanya kehidupan sosial yang positif seperti bergotong royong memberi pertolongan kepada setiap orang yang mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan karena emosi dapat menguasai kebiasaan pikiran dan mendorong untuk berbuat lebih produktif.

Akan tetapi, wacana tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan di Indonesia kerap kali mengalami miskonsepsi. Manusia ialah makhluk yang dikaruniai potensi intelegensia yang beraneka, sehingga tugas pendidikan adalah memfasilitasi sekaligus mendorong aktualisasi potensi yang dimiliki masing-masing individu (Fachrudin, 2020). Ironisnya, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dunia kerja sekalipun, ukuran kualitas SDM lebih tertuju pada intelegensi matematis logis semata. Pengutamaan secara berlebihan dilandaskan pada argumen pragmatis bahwa tumpuan daya saing dan kesempatan kerja lebih mengandalkan penguasaan teknologi berupa logika matematika dan keterampilan teknis. Realita dunia pendidikan yang mengalami proses pengerdilan justru semakin menampakkan urgensi pendidikan untuk menanamkan kapabilitas nilai karakter gotong royong dalam menghadapi tantangan teknologi baru (Rimayati, Handayani, Sayekti, & Redjeki, 2021). Dalam usaha menghindari sisi negatif tersebut, dunia pendidikan berperan penting untuk memastikan agar ketertarikan masyarakat ke arah teknologi sejalan dengan penguatan sentuhan nilai. Karenanya, usaha membangun mental gotong royong memerlukan berbagai usaha yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Dalam implementasinya, usaha-usaha tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal saja, namun juga dengan pendekatan horisontal yang melibatkan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media massa, pekerja budaya, dunia usaha, dan pemerintah.

## Metode

Rancangan penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif deskriptif dan korelasional. Populasi penelitian ialah siswa SMA Negeri Kota Malang tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 10.112 siswa. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan total sampel yang diperoleh sebanyak 385 siswa mulai dari siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Sedangkan penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling secara acak. Data dalam penelitian

dikumpulkan menggunakan angket online melalui google form disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Data yang terkumpul kemudian dilakukan dua uji kelayakan, yakni uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data persentase, spearman rank, dan logistik ordinal untuk ditarik kesimpulan secara umum.

### Hasil dan Pembahasan

Paparan pertama menjelaskan hubungan pola asuh demokratis dengan perilaku gotong royong. Analisis *spearman rank* digunakan guna membuktikan apakah terdapat hubungan pola asuh demokratis dengan perilaku gotong royong. Berikut hasil olah data yang dihasilkan.

Tabel 1.1 Hasil Uji *Spearman Rank* Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Gotong Royong pada Siswa SMA Negeri Kota Malang

Correlations				
			Pola Asuh Demokratis	Perilaku Gotong Royong
Spearman's rho	Pola Asuh Demokratis	Correlation Coefficient	1.000	.455**
		Sig. (2-tailed)		.000
	N		385	385
	Perilaku Gotong Royong	Perilaku Gotong Royong	Correlation Coefficient	.455**
Sig. (2-tailed)			.000	
N		385	385	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: data mentah diolah oleh peneliti)

Sedangkan hasil olah data deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi pola asuh demokratis pada siswa SMA Negeri Kota Malang. Berikut hasil olah data yang dihasilkan.

Tabel 1.2 Pola Asuh Demokratis pada Siswa SMA Negeri Kota Malang

No.	Kategori	Interval Persentase	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Tinggi	≥81%	244	63,4%
2.	Tinggi	61% - 80%	131	34,0%
3.	Rendah	41% - 60%	9	2,3%
4.	Sangat Rendah	≤40%	1	0,3%
Total			385	100%

(Sumber: data mentah diolah oleh peneliti)

Diketahui nilai signifikansi yang didapatkan sebesar  $0,000 < \alpha$  sebesar 0,05. Maka  $H_0$  ditolak, artinya pola asuh demokratis memiliki hubungan signifikan dengan perilaku gotong royong. Dilihat dari hasil tersebut, 63,4% siswa mendapatkan penerapan pola asuh demokratis sangat tinggi. Selibhnya, 34,0% termasuk tinggi, 2,3% termasuk rendah, dan 0,3% termasuk sangat rendah. Maka dapat ditarik kesimpulan, rata-rata siswa SMA Negeri Kota Malang memperoleh penerapan pola asuh demokratis pada kategori sangat tinggi. Hasil tersebut ditinjau dari beberapa aspek, yakni aspek kehangatan, aspek penerimaan, aspek kedisiplinan, aspek kebebasan terkontrol, aspek hadiah dan juga hukuman yang rasional.

Hasil tersebut sesuai dengan beberapa teori diantaranya penelitian oleh Sulistiyana (2017) yang menunjukkan hubungan signifikan pola asuh demokratis dengan perilaku gotong royong. Dimana, remaja yang memperoleh pola pengasuhan secara demokratis cenderung memiliki kompetensi sosial, salah satunya mampu menjalin kerja sama dengan orang-orang disekitarnya. Selanjutnya, penelitian oleh Setianingrum (2019) juga menunjukkan hasil yang sama. Dimana, remaja yang berasal dari keluarga yang padu atau kohesif lebih memungkinkan anak tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepedulian sosial sebagai sifat dasar pembentuk perilaku gotong royong.

Seiring pesatnya laju globalisasi, tak pelak bahwa lingkungan keluarga memang memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan karakter melalui penerapan pola asuh yang tepat secara terus menerus dan berkesinambungan (Mujiwati, 2017). Pada zaman ini, tidaklah berarti apa-apa apabila seorang anak hanya unggul dalam intelektualitas, namun lemah dalam karakter. Sebab, karakter merupakan gambaran dari eksistensi seseorang (Surahman, 2021). Oleh karena itu, orang tua perlu merumuskan tujuan pengasuhan, sehingga ada yang disepakati antara kedua orang tua tentang kemana arah dari pengasuhan tersebut. Namun, ditengah lingkungan yang berkembang, cara orang tua dalam membimbing anak perlu penyesuaian, misalnya memberikan pilihan dan kepercayaan pada anak untuk menentukan apa yang menurut anak baik setelah tentunya didiskusikan dengan orang tua. Karena sejatinya, anak bukanlah sehelai kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ditulisi dengan dasar-dasar sketsa yang masih buram. Oleh karena itu, tugas orang tua adalah menebalkan segala tulisan buram yang berisi elemen baik agar nampak sebagai budi pekerti. Saat yang sama, tulisan buram yang berisi elemen buruk hendaknya ditipiskan bahkan makin dikaburkan agar tak dapat berkembang.

Pemaparan kedua tentang hubungan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong pada siswa SMA Negeri Kota Malang. Analisis *spearman rank* digunakan guna membuktikan apakah terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong. Berikut hasil olah data yang dihasilkan.

Tabel 1.3 Hasil Uji *Spearman Rank* Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Gotong Royong pada Siswa SMA Negeri Kota Malang

		Correlations		
			Kecerdasan Emosional	Perilaku Gotong Royong
Spearman's rho	Kecerdasan Emosional	Correlation	1.000	.468**
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		.000
		N	385	385
	Perilaku Gotong Royong	Correlation	.468**	1.000
		Coefficient		
Sig. (2-tailed)		.000		
	N	385	385	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: data mentah diolah oleh peneliti)

Sedangkan hasil olah data deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi kecerdasan emosional pada siswa SMA Negeri Kota Malang. Berikut hasil olah data yang dihasilkan.

Tabel 1.4 Kecerdasan Emosional pada Siswa SMA Negeri Kota Malang

No.	Kategori	Interval Persentase	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Tinggi	$\geq 57\%$	286	74,3%
2.	Tinggi	43% - 56%	71	18,4%
3.	Rendah	29% - 42%	26	6,8%
4.	Sangat Rendah	$\leq 28\%$	2	0,5%
Total			385	100%

(Sumber: data mentah diolah oleh peneliti)

Diketahui nilai signifikansi yang didapatkan sebesar  $0,000 < \alpha$  sebesar 0,05. Maka  $H_0$  ditolak, artinya kecerdasan emosional juga memiliki hubungan signifikan dengan perilaku gotong royong. Dilihat dari hasil tersebut, 74,3% siswa memiliki kecerdasan emosional sangat tinggi. Selibuhnya, 18,4% termasuk tinggi, 6,8% termasuk rendah, dan 0,5% termasuk sangat rendah. Maka dapat ditarik kesimpulan, rata-rata kecerdasan emosional pada siswa SMA Negeri Kota Malang berada pada kategori sangat tinggi. Hasil tersebut ditinjau dari beberapa aspek, yakni mengenali, mengendalikan, dan memanfaatkan emosi dalam diri, serta menghargai, menghormati, dan menjalin hubungan harmonis dengan orang lain.

Hasil tersebut sesuai dengan beberapa teori diantaranya penelitian oleh Noya (2019) yang menunjukkan hubungan signifikan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong. Dimana, ditemukan hubungan erat antara keduanya, khususnya perasaan emosional berupa rasa empati. Selanjutnya, penelitian oleh Aisyi & Djamhoer (2020) juga menunjukkan hasil yang sama. Dimana, remaja yang memiliki kecerdasan emosi akan mampu berempati dan memiliki tanggung jawab sosial memecahkan masalah dengan penilaian realistis. Dengan begitu, remaja tersebut akan mampu bergotong royong dengan tujuan meringankan masalah yang dialami orang lain. Oleh karenanya, anak yang memiliki kecerdasan emosional, akan tumbuh menjadi pribadi yang cakap, optimis, empatik, toleran, dan gemar membangun kolektifitas (Ghufroon, 2016). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kunci seorang individu mampu melaksanakan gotong royong (Maghfiroh & Suwanda, 2017).

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, miskonsepsi tentang pembangunan sumber daya manusia perlu diluruskan. Ada kesan bahwa keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang anak hanya terbatas pada logika matematika dan keterampilan teknis semata. Nyatanya, dari sekian faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, kekuatan kognitif hanya menyumbang 20 persen, sedangkan 80 persennya diisi oleh kekuatan lain termasuk kecerdasan emosi (Perbowosari, 2016). Sehingga, kurikulum pendidikan berkewajiban memberi ruang kepada peserta didik untuk mengasah daya-daya afektif dengan semangat gotong royong yang menempatkan sila-sila Pancasila sebagai kaidah emas dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Demokratisasi pendidikan harus menunjukkan kesiapannya dalam memberi ruang aktualisasi bagi keberagaman intelegensia yang dimiliki setiap individu.

Pemaparan ketiga tentang hubungan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong pada siswa SMA Negeri Kota Malang. Analisis *logistik ordinal* digunakan guna membuktikan apakah terdapat hubungan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong. Berikut hasil olah data yang dihasilkan.

Tabel 1.5 Hasil Uji Simultan Logistik Ordinal

Model Fitting Information				
Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	118.472			
Final	65.810	52.662	6	.000
Link function: Logit.				

(Sumber: data mentah diolah oleh peneliti)

Sedangkan hasil olah data deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi perilaku gotong royong pada siswa SMA Negeri Kota Malang. Berikut hasil olah data yang dihasilkan.

Tabel 1.6 Perilaku Gotong Royong pada Siswa SMA Negeri di Kota Malang

No	Kategori	Interval Persentase	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Tinggi	$\geq 73\%$	226	58,7%
2.	Tinggi	55% - 72%	136	35,3%
3.	Rendah	37% - 54%	22	5,7%
4.	Sangat Rendah	$\leq 36\%$	1	0,3%
Total			385	100%

(Sumber: data mentah diolah oleh peneliti)

Diketahui nilai signifikansi atau *p-value* yang didapatkan sebesar  $0,000 < \alpha$  sebesar 0,05. Maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat hubungan signifikan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong dengan tingkat kepercayaan 95%. Dilihat dari hasil tersebut, 58,7% siswa menerapkan perilaku gotong royong yang sangat tinggi. Selebihnya, 35,3% termasuk tinggi, 5,7% termasuk rendah, dan 0,3% termasuk sangat rendah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, rata-rata perilaku gotong royong pada siswa SMA Negeri Kota Malang berada pada kategori sangat tinggi. Hasil tersebut ditinjau dari beberapa aspek, yakni sikap menghargai, empati, tolong menolong, solidaritas, musyawarah mufakat, dan sikap kerelawanan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Husada (2017), dimana penelitiannya menunjukkan hubungan signifikansi pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong. Artinya, dua variabel bebas tersebut dapat digunakan sebagai prediktor guna memprediksi perilaku gotong royong. Sejatinya, anak yang memiliki rasa empati berasal dari keluarga yang demokratis (Sulistiyana, 2017). Akhirnya, anak-anak tersebut tumbuh menjadi seseorang yang memiliki pengelolaan emosi dengan penalaran moral yang baik (Noya, 2019). Fakta ini mendorong mudahnya menginternalisasikan standar nilai yang diberikan, seperti perilaku gotong royong sebagai nilai fundamental kearifan lokal bangsa Indonesia.

## Simpulan

Berlandaskan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, terdapat hubungan signifikan pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional dengan perilaku gotong royong pada siswa SMA Negeri Kota Malang. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi atau *p-value* yang didapatkan sebesar  $0,000 < \alpha$  sebesar 0,05. Namun, pembangunan mental karakter khususnya karakter gotong royong harus tetap dilaksanakan dengan serius. Dalam implementasinya, gerakan pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan

vertikal saja, namun juga dengan pendekatan horisontal yang melibatkan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, media massa, pekerja budaya, dunia usaha, dan pemerintah.

## Referensi

- Aisyi, F. R. N., & Djamhoer, T. D. (2020). Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Prosocial pada Siswa SMA di Kota Bandung. *Jurnal Psikologi*, 6(2), 842. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/171>.
- Anggraeni, N., Andriani, S. S., Muliawati, S., & Faozi, C. (2018). Pola Asuh Demokratis untuk Mengembangkan Perilaku Altruisme Anak di Era Global. *Journal of Innovative Counseling*, 2(2), 61–62. Retrieved from [https://umtas.ac.id/journal/index.php/innovative\\_counseling/issue/view/27](https://umtas.ac.id/journal/index.php/innovative_counseling/issue/view/27).
- Fachrudin, Y. (2020). Penyelenggaraan Program Akselerasi Bagi Anak Berbakat di Smart Ekselensia Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 3(1), 96–97. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/171>.
- Faedlulloh, D., Meutia, I. Fitri, Yulianti, D., & Karmilaras, V. (2021). Gotong Royong Digital: Praktik Baru Solidaritas Warga di Era Pandemi. *Jurnal Jantria*, 16(1), 3. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/33367/>.
- Ghufroon, M. N. (2016). Peran Kecerdasan Emosi dalam Meningkatkan Toleransi Beragama. *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 141–142. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/viewFile/1664/pdf>.
- Husada, A. K. (2017). Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Prosocial pada Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 2(3), 270–271. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/160>.
- Irfan, M. (2017). Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(1), 3–4. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/article/view/14204>.
- Maghfiroh, R. L., & Suwanda, I. M. (2017). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Prosocial Siswa di SMP Negeri 2 Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 199. Retrieved from <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/GSA>.
- Mahardika, M. N., Trisiana, A., Widyastuti, A., Juhaena, J. S., & Kirani, R. M. A. (2020). Strategi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong. *Jurnal Global Citizen*, 10(1), 48. Retrieved from <http://jurnalnu.com>.
- Mujiwati, Y. (2017). Peranan Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Ilmiah Edukasi Dan Sosial*, 8(2), 168. Retrieved from <http://jiesjournal.com/index.php/jies/article/view/102>
- Nashihin, H., & Dewi, P. A. (2019). Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 429–433. Retrieved from <http://jurnalnu.com>.
- Noya, A. (2019). Hubungan Kecerdasan Emosional dan Perilaku Prosocial Siswa di SMA Negeri 9 Halmahera Selatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 2(1), 22–23. Retrieved from <https://ejournal.upg45ntt.ac.id/ciencias/article/view/25>.
- Perbowosari, H. (2016). Peran Kecerdasan Emosional dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 168. Retrieved from <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/PN/article/view/213>.
- Permana, B. I., & Mursidi, A. (2020). Peranan Nilai Gotong Royong Sebagai Bentuk Penerapan Sila Ketiga Pancasila di Desa. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 14. Retrieved from <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>.
- Pertiwi, R. E. (2018). Pendekatan Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Budaya Gotong Royong untuk Meningkatkan Empati Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan*, 2(1), 56. Retrieved from <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/461>.
- Rimayati, E., Handayani, D. A. K., Sayekti, S., & Redjeki, S. (2021). Efektivitas Peran Keluarga

- dalam Perkembangan Teknologi Digital. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 31-32. Retrieved from <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/manggali/article/view/1546>.
- Scorsinni, C., Manurung, Y. S., Erick, & Pasaribu, J. C. (2020). Perilaku Prosocial Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional pada Siswa Kelas X SMA Swasta Sultan Iskandar Muda. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi, Dan Kesehatan*, 1(3), 234. Retrieved from <http://www.jurnalp3k.com/index.php/J-P3K/article/view/46>.
- Setianingrum, M. E. (2019). Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis dengan Perilaku Prosocial pada Remaja Akhir di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. *Jurnal Widya Sari Press*, 3(7), 3. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.09.003>.
- Sisrazeni. (2018). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional dan Sikap Keberagaman Mahasiswa Batusangkar. *Jurnal Psikologi*, 3(2), 323. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/5627>.
- Sulistiyana. (2017). Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Prosocial pada Siswa Kelas X SMA Negeri 11 Banjarmasin. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Fitrah*, 1(2), 9. Retrieved from <http://eprints.ulm.ac.id/1435/>.
- Surahman, B. (2021). *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*. Bengkulu: CV Zigie Utama.

## Traditional Wisdom in Cikondang Traditional Village: A Study of Sabilulungan's Value

Tuti Istianti,<sup>a,1\*</sup>, Enok Maryani,<sup>b,2</sup>, Bunyamin Maftuh<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> [tutiistianti@upi.edu](mailto:tutiistianti@upi.edu)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 23 November 2021;

Revised: 11 Januari 2022;

Accepted: 9 Juni 2022.

---

### Kata-kata kunci:

Kajian Nilai;

Kearifan Lokal

Sabilulungan;

Kampung Adat.

---

### Keywords:

Value Study;

Sabilulungan Local

Wisdom;

Traditional Village.

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Sabilulungan di kampung adat Cikondang. Gerakan pengembangan kearifan lokal mengutamakan karakter gotong royong, persatuan dan kebersamaan untuk menciptakan hubungan relasi sosial yang harmonis. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengungkap data secara mendalam yang ada di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Responden terdiri dari sesepuh atau tokoh adat, warga kampung adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sabilulungan merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di masyarakat Sunda yang menekankan pada prinsip kerukunan hidup. Selain itu, nilai kearifan lokal Sabilulungan yaitu gotong-royong, kesatuan, kebersamaan, keadilan dan kemanusiaan. Nilai kearifan lokal Sabilulungan di kampung adat Cikondang terbukti mampu menjaga harmonisasi dalam aktivitas gotong-royong dalam kesehariannya dan di setiap tradisi adat dilandasi spontanitas. Konsep Sabilulungan dalam dunia pendidikan dalam rangka membantu seseorang mencapai pembentukan karakter yang menghasilkan generasi yang memiliki watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat.

---

### ABSTRACT

*The Value Study of Sabilulungan Local Wisdom in Cikondang Traditional Village. The aim of this study is to explore the values contained in the local wisdom of Sabilulungan in the Cikondang village. The development of local wisdom prioritizes the character of mutual cooperation, unity and togetherness to create harmonious social relations. This research method uses a qualitative descriptive method by revealing in-depth data in the locus of research. Data collection techniques are field observations, interviews, and documentation. Respondents consisted of elders or traditional leaders, residents of indigenous villages. The results found that Sabilulungan is one of the local wisdom that exists in the Sundanese community that emphasizes the principle of harmony in life. In addition, the values of Sabilulungan's local wisdom are mutual cooperation, unity, togetherness, justice, and humanity. The value of Sabilulungan local wisdom in the Cikondang traditional village has proven to be able to maintain harmonization in mutual aid activities in daily life and in every customary tradition based on spontaneity. The concept of Sabilulungan in the world of education in order to help a person achieve character building that produces a generation that has a dignified character, personality, and civilization.*

---

Copyright © 2022 (Tuti Istianti dkk). All Right Reserved

How to Cite : Istianti, T., Maryani, E., & Maftuh, B. (2022). Traditional Wisdom in Cikondang Traditional Village: A Study of Sabilulungan's Value. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 10-21. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6256>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.



## Introduction

Conflicts arise as a result of friction, differences in interests, attitudes, and feelings, which create problems that threaten to fracture social relations. Conflict is a type of social interaction that occurs when two people have opposing interests and lose harmony with one another (Maftuh, 2008). According to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), there will be 9000 land conflict disputes and court cases up to October 2020. Meanwhile, the Consortium for Agrarian Reform (KPA) reported 241 cases of land conflict in 359 villages/villages, involving 135,337 families and covering an area of 624,272,111 hectares. (Source: [kemendagri.go.id/berita/baca/30551/badan-litbang-kemendagri-cari-solusi-konflik-pertanahan](http://kemendagri.go.id/berita/baca/30551/badan-litbang-kemendagri-cari-solusi-konflik-pertanahan) diakses tanggal 21 November 2021)

A culture of violence also emerged with the throwing of stones between residents of Jalan Rajawali 1 and Belibis in Perumnas Mandala, Medan City. The clashes began when residents of Jalan Rajawali opened a wine stall on the railing. One of the challenges presented by the pluralistic condition of the community structure is that disagreements become prone to conflict if they cannot be resolved constructively, leading to violence. Conflict, according to Abdul Jamil Wahab (2014), is not always synonymous with violence, but violence can occur as a result of conflict.

Conflict situations in schools can arise from unfavorable interpersonal relationships. In such circumstances, children who are perceived as weak frequently become victims of verbal and gestural bullying; potential conflicts in children can arise from trivial matters. Bullying is an aggressive act committed by individuals, both physically and verbally (Schott, 2014). Conflicts between students, individuals, or groups can range from bullying to mass brawls (Dewanta, et al, 2014). According to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), 107 children were bullied at school in 2018. According to the 2018 Program for International Student Assessment (PISA) report, as many as 41% of students in Indonesia claimed to have been bullied.

The fundamental issue is conflict, bullying, and mass fights as a result of decreased values of togetherness in social life. These values are best taught in schools through character or moral lessons. Character education is then practiced in groups as students learn to help and respect one another. In essence, mutual cooperation is developed in schools through pedagogy, which can then be sustained in the lives of students in social relationships in both the family and the community.

Traditional values, particularly local wisdom, must also be developed. In the context of this study, the value of local wisdom is focused on the Sabilulungan cultural value in Cikondang village. A number of traditional traditions are still practiced and preserved by the community. This study focuses on values in the Sabilulungan culture that contain local wisdom. Heru Ryanto Budiana, Atwar Bajari, and Rahman Mulyawan conducted previous research on the value of Sabilulungan. Transforming the value of Sabilulungan in public service communication activities in the Bandung Regency Government is the title of their study. This study focuses on the transformation of the value of Sabilulungan local wisdom in public service communication activities in the Bandung Regency Government under the leadership of Dadang Naser (Budiana, Bajari, & Mulyawan, 2020).

The following study, "The Potential of Visual Culture in Cikondang Traditional Village, Bandung Regency as a Source of Ethnopedagogy of Community Character," was written by Nia Emilda, Aijuju Rohaeni, and Wanda. This research focuses on efforts to describe the

ethnopedagogical process in depth using the philosophical and pedagogical values of the Cikondang Traditional House (Emilda, Rohaeni, & Wanda, 2018).

The two studies mentioned above confirm that this research is still in its early stages. Because this study differs from the two previous studies, as well as the focus of the research, it is relatively new. As a result, the title of this study is " Traditional Wisdom in Cikondang Traditional Village: A Study of Sabilulungan's Value."

## Method

This research method uses descriptive-qualitative analysis. This analysis is useful for obtaining the views and meanings of local wisdom of Sabilulungan in the Cikondang Traditional Village community. Data collection techniques by means of field observations, interviews, and documentation. Respondents consisted of elders/traditional leaders, traditional village residents. The data analysis technique uses interpretation by revealing the meaning of the local wisdom value of Sabilulungan.

## Results and Discussion

Cikondang traditional village is the name of a pleasant and peaceful village on the slopes of Gunung Tilu. The people of Kampung Cikondang are still steadfast in upholding their ancestral traditions and customs that have been passed down through generations. Traditional rituals like *Wuku Taun*, *Ngaruat Lembur* (Hajat Lembur), *Ngaruat Bumi* Tradition, *Ruat Solokan* Tradition, *Ruat Hajat* Tradition, *Agricultural Ceremony* Tradition, and *Paralon Hajat* Ceremony Tradition are still practiced. People in Cikondang traditional village still believe in the existence of ancestral spirits, who are said to be capable of balancing humans and God. The culture of gotong royong is still well maintained due to the nature of the wisdom possessed by the residents, one of which is when performing certain traditional rituals and in their daily lives.

According to Anom Juhana, the caretaker of the fifth generation of the Cikondang Traditional Village, the establishment of the traditional village is difficult to prove, and the history of Cikondang itself is disputed. Cikondang was derived from two Sundanese words, *Ci* or *Cai*, which mean water or springs, according to the previous caretaker. First, the famous tree is taken from a very fertile tree growing in the village. Cikondang is a combination of a water source and a well-known tree. Second, according to the elders who were formerly the ulema who were in charge of spreading Islam or the guardians there, Cikondang was derived from two words. In Indonesian, *ci* or *cai* means water.

The Cikondang people belong to the Sundanese ethnic group and are classified as indigenous communities because they still follow their ancestors' teachings. The majority of Cikondang people are Muslims, and there has long been a process of integrating Islam and Sundanese culture in all aspects of life. Even Praja, (2005) mentions the pattern of the close relationship between Islam and Sundanese culture, such as the phrase "*Islam teh Sunda, Sunda teh Islam*" or "*Urang Sunda mah geus Islam samemeh Islam*," which means that the Sundanese were already Muslim before Islam. Based on this expression, Islam and Sundanese culture are not isolated, but rather position Islam as integrated with culture, both of which are functionally related to indigenous peoples. Culturally, they maintain their Sundanese identity, but they also prioritize the values of Islamic teachings.

Islam and its culture are classified as integration criteria with an acculturative pattern, with Islam and Sundanese being more prominent. According to local wisdom, religious issues

cannot be separated from the culture that grows in the indigenous community itself; this can be manifested in the form of ritual traditions or religious ceremonies that are held concurrently with the culture. The existence of spirits of the *karuhun* (ancestors) who protect this cannot be separated from the entry of cultural influences other than animism (worship of spirits), Hinduism, and Buddhism. The Cikondang indigenous peoples are still attached to religion and culture because of the strong influence of foreign cultures in the form of Islamic beliefs, which they now adhere to.

The Cikondang indigenous people believe that ancestral spirits have power over life in the world, protecting it from various problems while also preventing harm that threatens at any time. *Eyang Pameugeut* and *Eyang Istri* are revered ancestors who are thought to have founded settlements in Cikondang village at the beginning of the nineteenth century or around 1800. The local community regards these two grandparents as one of the guardians in charge of spreading Islam in the Bandung area. South, particularly in Cikondang village This is where the two grandparents died, leaving no trace of their existence. Locals believe that these two grandparents are "*tilem*," despite the fact that there is no written or oral evidence to support this claim.

The Cikondang people, through their perseverance, continue to maintain traditions and honor their ancestors through social activities and traditions. According to the Cikondang Traditional Village's fourth generation Kuncen Anom Juhana, ancestral equipment such as *leuit* (a warehouse where rice harvests are stored) and *lisung* are still kept (a place for pounding rice). "We carry out our ancestors' message not to change traditions," said Monday (12/12/2019). Another type of tradition is that the surrounding community celebrates the Prophet Muhammad SAW's birthday every year with a *tumpeng* and recitation. During the celebration, there is a tradition that stands out by providing three types of *tumpeng*, which are huma rice, lowland rice, and glutinous rice. The three *tumpeng's* are accompanied by 250 other *tumpeng's* made at indigenous people's homes, and the finished *tumpeng's* are collected in a traditional house with side dishes such as chicken as a complement. This is a cone, and there are 11 other types of food whose raw materials are rice, glutinous rice, and sugar cane treats. The *tumpeng* is designed to be served to the 700 guests present, but you can also enjoy processed *tumpeng* rice with the surrounding community. One *tumpeng* is usually enough to feed 5-8 people.

The Cikondang traditional village community performs the traditional *tasyakuran* ritual, the *Binimah Wuku Taun* tradition (closing the year) and *mapag taun* (opening the year) once a year as a sign of gratitude to the Creator. Guests attended the ritual ceremony, chanting the holy verses of the Koran, which was accompanied by a prayer to Allah SWT as a form of gratitude to the Almighty for passing one year safely. The traditional house is the focal point for the implementation of traditional ceremonies. According to the *Kuncen*, *Wuku* means "book," which means "turning over a new leaf." *Wuku Taun* is a traditional ceremony held at the start of the Hijri calendar year. The annual *Wuku* ceremony begins on 1-24 Muharram and concludes on 15 Muharram. *Wuku Taun* has become a tradition for residents in the Cikondang Traditional Village to celebrate the beginning of the Hijri New Year; even outsiders are invited to the tradition; the *Wuku Taun* tradition is also a gathering event with relatives.

Indigenous people believe that the *wuku taun* ceremony is performed in addition to asking Allah SWT's salvation, village ancestors, repellent reinforcements, and preserving the tradition of mutual cooperation, prioritizing deliberation in decision-making, which has long been embraced by the community for many years. The mutual cooperation of the residents

reflects indications of the residents' sense of togetherness. The environment of indigenous peoples is peaceful, serene, full of love, and surrender to God Almighty, and the community accepts the formation of the environment by itself, forming a mindset that prioritizes harmony and peace in life. The Cikondang indigenous people's situation is so orderly because the order is shaped by the norms to which they have so far adhered (Rozy, Rusyana, & Ristiani, 2022).

In addition to the essential nature and daily habits of mutual cooperation, such as community service activities in the RT and RW environments, local customs with mutual cooperation are manifested in the Cikondang community during the *Wuku Taun* ceremony. The collaborative nature of the *wuku taun* ritual can be seen in the community's cooperation in organizing events such as side dishes, rice, and other food ingredients, which are carried out by women and men in charge of wrapping snacks in banana leaves. According to Anom Juhana, the Cikondang traditional village's *kuncen*, "there are twelve kinds of snacks and seven kinds of *rencang sangu* (food side dishes) wrapped in banana or *konca* leaves that are served when the *Wuku Taun* celebration comes," Saturday (23/11). The twelve colors of food represent the twelve months of the year, and the seven types of food represent the seven days of the week.

The event at the turn of the 14th to the 15th of Muharram, before the customary implementation, the cleaning of heirlooms such as kris, knives, spears, machetes, and others can only be done by descendants of the Cikondang Traditional Village Ancestors who are attended by the general public as well as the indigenous people themselves. Commemoration of *wuku taun* and *mapag taun*, as well as praying a thanksgiving prayer, and a meeting place for *Mama Sepuh's* descendants (customers) to reconnect relatives who have not seen each other in a long time.

Several ceremonies were held, including the following: first, *ngaruat lembur* (*hajat lembur*). The *Hajat Lembur* Ceremony, also known as *Ngaruat Lembur*, is one of the traditional/traditional ceremonies that are still performed in several areas throughout the Sundanese region, including the Cikondang Traditional Village, Lamajang Village, Pangaléngan District, Bandung Regency. The *Ngaruat Hajat* ceremony is held once a year during the Safar month, on Tuesday or Thursday from 11 a.m. to 15 a.m. What *Ngaruat Lembur* or *Hajat Lembur* refers to is a celebration held for the safety of his hometown. This salvation is similar to the *Wuku Taun* ritual of creating a cone and *hamin* by the *kuncen*. Everyone contributed to the success of this event.

Since 1947, the tradition of *ngaruat hajat* has been passed down from generation to generation. The purpose of carrying out the *ngaruat hajat* tradition is to express gratitude for *bini'mah* and to ask the Almighty for safety in maintaining the village (*ngamumule lembur*), particularly the residents of the Cikondang community. The ceremony is held on customary land and serves as a gathering place for relatives and *sabilulungan* among the surrounding residents. Every activity related to traditional ceremonies must take place on the caretaker's customary land. It is currently being preserved as a place or place for the local community to carry out activities, particularly during the celebration of traditional ceremonies (Rahmawaty & Maharani, 2014).

This interaction relationship is visible when the local community conducts activities; the day before the ceremony, the community participates and collaborates to prepare all of the ceremony's needs up to the peak event. The activity carried out by the *ngaruat lembur* (*hajat lembur*) ritual is the delivery of moral messages to the community from village elders. Furthermore, the community held a light, open discussion on a regular basis about the message

of preserving the village, which was followed by eating tumpeng and traditional dishes with the residents present. The tumpeng is distributed to residents living around the traditional village who are involved in traditional rituals.

The residents work together to prepare all other ceremonial necessities the day before the *Hajat Lembur* ceremony begins. The *Hajat Lembur* Ceremony is held early in the morning from 07:00 to 09:00, and the location must be in the middle of *Lembur* (the village), which is the standard. Previously, the Cikondang Traditional Village was divided into two RWs; however, the indigenous people believed that the location of RT 03 RW 04 Cikondang (exactly Father Amri's house) was the best location for indigenous people's activities in processing food and other dishes to support the *Ruat Hajat* ceremony. However, after the area was divided into two RWs, the indigenous people's activities shifted to Father Rahmat's yard, specifically at RT 0 RW 03 Cikondang, which was in the middle of *lembur* (the village). The indigenous people perform traditional rituals again in the afternoon, from 10 a.m. to 11.30 a.m., on an incline in the form of climbing a small hill on Jalan Cikondang. Following the *Hajat Lembur* ceremony, the activity continued with residents eating the tumpeng dishes that were already available, as well as other special foods, and concluded with the residents distributing the tumpeng that they had collected. Beginning at 13:00 and continuing until the end of the thanksgiving and praying together as a form of gratitude to Allah SWT, and asking for protection so that the inhabited or occupied environment receives the blessing of life safety.

The second tradition is the *Paralon Hajat* ceremony. The ritual tradition of *Hajat Paralon*, or salvation, is still practiced by indigenous people from generation to generation. Intention comes from the Sundanese dialect, specifically *Nyalametkeun* (meaning safe) to avoid danger. The *Hajat Paralon* ceremony is held to express gratitude to the Creator of the universe for the natural wealth available in the Cikondang Traditional Village in the form of springs that can be used by indigenous peoples and are channeled through *paralon* media through a holding tank. The contents of *hajat* are derived from the word *hayat* or living, which means there is no scarcity of water. The *Paralon Hajat* ritual is performed at the springs, approximately 40 minutes from Cikondang Village. The activities discuss water sustainability for local residents so that all residents participate in caring for and maintaining sewer water that can be used optimally by residents. Traditional rituals are carried out with the participation of local government elders and caretakers.

The indigenous peoples of Cikondang have their own set of values. The existence of Kampung Cikondang, whose people still hold fast to what was passed down from their forefathers, such as self-religion, is a philosophy adopted by the Cikondang Traditional Village community that carries the message of creating conditions so that there is a balance between humans as individuals, human and human relationships, and with God. In terms of worldview, understanding the spirit value of self-awareness is considered an absolute truth of daily life, which is contained in the life view of kudu *handap asor* (must be polite) in behaving towards others *kudu someah ka semah* (must be good) to guests). Based on an understanding of their way of life, so that no disputes between their citizens are heard by the Cikondang indigenous people (Yulianti, 2015).

The Cikondang indigenous people are part of the Sundanese community and have a way of life expressed through proverbs. Behind thought means being aware of bad deeds and performing good deeds. Taking what is not their right, *mipit teu amit, ngala teu menta*, indigenous peoples have taboos against taking what is not their right.

Other forms of culture that are ideas/views of life in the Cikondang indigenous people can be seen in the community's involvement in the tradition's implementation from the beginning to the end, in every schedule of traditional ceremonial activities known as expressions of penance, penance, and penance. Compassion for compassion means loving, so the first step is to not hate and hurt each other; penance honing guides each other; and penance nurturing means advising each other to goodness and truth. This expression conveys love and peace while anticipating commotion/chaos.

According to the search results, the Cikondang Traditional Village community's peace-loving character has been owned for a long time, and this character leads to Sabilulungan values. For more information, the Sabilulungan Local Wisdom Values can be found in the activities of the Cikondang Traditional Village Community in the Sundanese proverbs listed below:

Tabel: 1 Sabilulungan Local Wisdom Values in Society  
 Cikondang Traditional Village in Sundanese Proverb

Sabilulungan Wisdom Proverbs	Local Values in	The Actualization of the Cikondang Indigenous Peoples in Tradition	Key Values
<i>Tina Peurih Jadi Peurah</i> (Work hard)		Seek and find ways to preserve the balance of the natural environment for prosperity	Never give up.
<i>Kudu soméah ulah goreng bagug dan basa mah teu meuli.</i> (must be friendly to anyone because Language does not buy)		In everyday life, talking with guests using a smooth Sundanese language that shows hospitality	Friendly
<i>Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun</i> (Must hold each other's hands).		Indigenous peoples in their daily activities or collective activities periodically packaged in a tradition	Collaboration and mutual support in goodness
<i>Manusa hirup ku akalna</i> (Man lives with his mind)		Religious traditions and other values that are cultivated are still maintained and implemented in their lives because they are a mandate from their ancestors	Logic-based reasoning
<i>Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang.</i> (All words must be considered before they are spoken, always control yourself in speaking)		Prohibition of speaking loudly, defecating in the open, respectful and obedient to parents and others.	Following the rules
<i>Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan</i> (agree together to eradicate differences of		The Cikondang indigenous people, are so polite in their daily lives, there is no dispute between residents	Avoid squabbles.

opinion that cause division)		
<i>Kudu paheuyek-heuyek leungleun</i> (must help each other)	The embodiment of true mutual cooperation in daily life and every scheduled traditional ritual, starting from the initial preparation, the process of implementing the tradition, to the implementation of the tradition without any strings attached.	Help each other out, gotong royong.
<i>Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan</i> (Stubborn and brave not afraid of being wrong)	The management and use of forest natural resources is carried out at the customary deliberations led by traditional leaders and traditional elders	Agreement
<i>Hirup sauyunan Silih pikaheman</i> (support each other)	The annual change ceremony on the 15th of Muaharam, all people actively work according to their abilities and skills	Right and position equality
<i>Kawas gula jeung peueut</i> (Like sugar with ripe sap)	Family ties that are still strong make the Wuku Taun ritual a success	Kerukunan
<i>Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea</i> (Must lead to the law, lead to the foot of the state, agree with the people)	Various rules and prohibitions are well understood and obeyed by indigenous peoples as guidelines for daily life as part of customary provisions. It is forbidden to take off sandals entering the forest and first stepping with the right foot.	Kemufakatan
<i>Ka Cai Jadi Saleuwi, ka Darat Jadi Salogak</i> (living life, we must be together and compact)	Cohesiveness in carrying out cooperation in commemorating the Islamic New Year ceremony for the Hijri New Year.	Interdependence
<i>Mipit teu amit, ngala teu menta</i> (taking what is not rightfully his)	Do not arbitrarily cut down trees around the forest	Obligations and rights
<i>Silih asah, Silih asih, Silih asuh; Silih wawangi</i> (Sending each other, loving each other, caring for each other, giving each other positive things to each other)	Indigenous peoples with their traditions are able to maintain the harmonization of human relations with God, with nature, and establish humanism with humans with the slogans of compassion, compassion and fostering. Believing with the triangle of harmony to avoid conflict	Tolerance, peace, and harmony

The following explains the significance of *Sabilulungan* local wisdom. Local wisdom has a very broad meaning and definition in terms of terminology. However, essentially, local wisdom is related to the value of people's knowledge, ideas, skills, experience, behavior, and customary habits in specific areas (Keraf, 2002; Aprianto et al, 2008; Yamani, 2011). Local wisdom is derived from the words wisdom (wisdom) and local (locality). Based on this understanding, local wisdom is part of a culture that contains local (local) ideas, values, and points of view that are wise, intelligent, full of wisdom, and of good value, and have been embedded in the community for a long time (Sungkharat, et al., 2010; Mungmachon, 2012; Sibarani, 2018). In this context, values serve as a motivator while also guiding humans to do good.

Spiritual values (religious ethics) are interpreted as honesty, solidarity, brotherhood, a sense of sociality, justice, helping, generous, forgiving, patient, kind, telling the truth, generous, friendly, clean-hearted, brave, chaste, thrifty, discipline, love knowledge, and straight-minded. It is common that wherever society and culture exist, there is a value system that applies and serves as a guide for community members to live in harmony, harmony, and harmony. According to Rokeah (1973), values serve as general plans in conflict resolution and decision making. It describes the community's determination in upholding their sacred customs and habits in local Sundanese culture. Local wisdom in Sundanese contains many exemplary values and life wisdom (Toharudin & Kurniawan, 2017; Indrawardana, 2012; Herlambang 2015).

*Sabilulungan* is one of the Sundanese local wisdoms that emphasizes the principle of harmony in life. *Sabilulungan's* mission is to carry on the ancestors' desire to establish harmony between the people of Sunda and West Java in accordance with the paradigm of life as a nation, state, community, and family. Its value is not only mutual cooperation, but also unity, togetherness, justice, and humanity as a national culture that must be preserved. According to Naser (2020), the Regent of Bandung was then re-elected for the 2016–2021 period, stating that the *Sabilulungan* concept embodies the Sundanese people's values and traditions of mutual support and cooperation. Also, mobilize all available potential while maintaining a sense of responsibility for the common good. (<http://www.bandungkab.go.id/arsip/sabilulungan-milik-masyarakat-sunda>, diakses tanggal 19 Maret 2020).

The basic concept of *Sabilulungan* is to help and mutual assistance; the meaning is straightforward and universal. In the world of education, the concept of *sabilulungan* is used to help someone achieve character formation, which results in a generation with a dignified character, personality, and civilization. *Sabilulungan* has several meanings, one of which describes the nature of *silih rojong* or mutual support and demonstrates a strong unity. *Sabilulungan* is a servant who "*segut singkil ngabasmi pasalingsingan*" or minimizes differences and eliminates misunderstandings, and it is synonymous with unity. Through the foundation of *Sabilulungan*, in addition to growing and preserving the local Sundanese culture itself, which is the identity of the Sundanese people's ancestors, and has the goal of knitting harmony as the principle of harmonious life. *Sabilulungan* means mutual cooperation in Sundanese and has a broader meaning in Indonesian.

*Sabilulungan* refers to the development of noble values in Sundanese society, specifically "*sareundek saigel sabobot saphanean, rempug jukung sauyunan rampak gawe babarengan*," which translates as one-sidedness, one-step, one-step understanding, one-many fate, mutual support, mutual love, helping each other, working together, a close sense of brotherhood and (Sutarman 2017). The shift in thinking that has a significant impact on the erosion of mutual cooperation awareness, as well as the dynamics of the culture that is currently developing, is



more oriented towards individualism and materialism and begins to forget about *gotong royong* activities found in local culture. According to Collette (1987), *gotong royong* is the most important original institution in community development because it is entrenched and rooted in the lives of the Indonesian people.

The significance of transforming the *Sabilulungan* local wisdom values owned by the Cikondang Indigenous Village community in order to build the character of mutual cooperation, mutual assistance, and working hand in hand between members of the community to meet common needs and interests based on social solidarity. Emil Durkheim defines social solidarity as "equal values, equal challenges, and equal opportunities based on hope and trust." The principle of social solidarity is synonymous with helping one another, cooperating, being friendly (compact), and being sincere. Social interactions that occur as a result of cultural ties, which are primarily caused by the emergence of community sentiment, its elements, have an impact on social solidarity. According to Emile Durkheim, mechanical solidarity is formed by repressive laws because members of the community share similarities and are highly inclined to believe in a shared morality (Ritzer, 2012). Each individual is aware of his role in the group and the circumstances of the community itself; it is very possible for their roles in groups to run and need each other, namely individuals who are dependent in the local community feel physically and psychologically dependent on their community (Nasution, 2009).

## Conclusion

The study of values on the *sabilulungan* concept by looking at reality on the ground describes the quality of the Sundanese people in general and the Cikondang indigenous people who still uphold the values of peace as contained in the keywords above, which are identical to the characters "*sauyunan*" (intimacy), "*silih pikaheman*" (mutual paying attention), "*tulung tinulungan*" (helping each other), *Rempug jukung* (supporting each other in goodness). The life philosophy that is still maintained by the people of the Cikondang Traditional Village to always have a harmonious life intention or purpose / The impact of the Cikondang Village community's beliefs and customs has a conducive value, namely believing in the triangle of harmony with the slogans of compassion, penance, and parenting that triggers the spirit work together (*Sabilulungan*).

## References

- Abdul Jamil Wahab, (2014) *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia
- Aprianto, Y., Pardede, I.A., & Fernando, E.R. (2008). *Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan*. Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Barbara S. Tint & G. Koteswara P. (2007). *Peace Education in India: Academics Politics and Peace*. *Jurnal The Canadian Journal of peace and conflict Studies*
- Budiana, H. R., Bajari, A., & Mulyawan, R. (2020). Transformasi nilai Sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 42-56.
- Colleta, Nat J. 1987. *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan Ilmu Pengetahuan Sosial Di Indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2004). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa

- Emilda, N., Rohaeni, A., & Wanda. (2018). Potensi Budaya Rupa Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung sebagai Sumber Etnopedagogi Karakter Masyarakat. *Narada, Jurnal Desain & Seni*, 5(3), 291057..
- Herlambang, Y T. (2015). "Pendidikan Kearifan Etnik dalam Mengembangkan Karakter". *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 7, (1), 40-50.
- Indrawardana, I. (2012). *Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda dalam Hubungan dengan Lingkungan Alam*. Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture 4(1): 32-34.
- Keraf, A.S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mungmachon, R. (2012). *Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*. Ubun Ratchathani University, Thailand, Vol. 2(13).
- Naser (2020). *Sabilulungan Milik Masyarakat Sunda*. Sumber: Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Diakses tanggal 28 April 2021
- Nasution, Z. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi: Suatu Tinjauan Sosiologis*. UMM Press.
- Ni Ketut Agustini, I Wayan Sujana, I Ketut Adnyana Putra. (2019). *Korelasi Antara Kecerdasan Emosional dengan Interaksi Sosial Siswa Kelas V SD Gugus VI Pangeran Diponegoro Denpasar Barat*. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*. Vol 2, No.1
- Nurnisa Dewanta, Wibowo Budi (2014). *Penerapan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah Studi Kasus Di Dua Sekolah*. *Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan* Vol 2, No.1, hlm. 93
- Praja, Juhaya S. (ed.). 2005. "Hukum Islam dalam Tradisi dan Budaya Masyarakat Sunda", dalam *Pergumulan Islam Dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda*. Cetakan ke-1. Bandung: Kaki Langit.
- Rahmawaty, U., & Maharani, Y. (2014). *Pelestarian Budaya Indonesia Melalui Pembangunan Fasilitas Pusat Jajanan Tradisional Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Bandung Institute of Technology).
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi ( Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Value*. New York: Free Press
- Rozy, M. I. A., Rusyana, Y., & Ristiani, I. (2022). Etnopedagogi dan Pendidikan Karakter dalam Cerita "Raden Aria Cikondang". *Dinamika*, 5(1), 42-50.
- Schott, R. M., & Søndergaard, D. M. (Eds.). (2014). *School bullying: New theories in context*. Cambridge University Press.
- Sibarani, R (2012). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Stevenson, N. (2003). *Cultural Citizenship. Cosmopolitan Questions. Issues in Cultural and Media Studies*. Berkshire: Open University Press.
- Sue McGregor. (2014). *Prospective Philosophical Foundations of Peace Education. Journal of peace education and social justice*. Vol 8 Number 2
- Sungkharat, U., dkk. (2010). *Local Wisdom: The Development of Community Culture and Production Processes In Thailand*. *International Business & Economic Research Journal*. Vol. 9(11),
- Sutarman, U. (2017). Penerapan Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Sunda (sabilulungan) dalam Pembelajaran Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, vol. 1 no. 1 / 2017.
- Toharudin, U & Kurniawan, S. (2017). *Sundanese Cultural Values of Local Wisdom: Integrated to Develop a Model of Learning Bilogy*. *International Journal of Science Basic and Applied Research (IJSBAR)*. ISSN 2307-4531
- Warto, (2014), *Budaya Lokal sebagai Wahana Pelestarian Nilai Kesetiakawanan Sosial*, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Edisi 13 No 4 Desember 2014.
- Yamani, M. 2011. *Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Eman Komunitas Adat Daerah Bengkulu*. *Jurnal Hukum*. Vol. 18 (2). 175-192.

Yulianti, I. (2015). Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Cikondang Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Al-Hijrah. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 1(1), 112-133.

## Analisis Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Anak Didik di Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Hendri Nuryadi<sup>a,1\*</sup>, Pipit Widiatmaka<sup>b,2</sup>

<sup>a</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>b</sup>Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

<sup>1</sup>hendri@staff.uns.ac.id\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 19 Januari 2021;

Revised: 24 Mei 2022;

Accepted: 9 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Analisis Proses

Pembelajaran;

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Karakter Anak Didik;

Pandemi Covid-19.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter di era pandemi Covid-19. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter anak didik, namun saat ini banyak anak didik yang sedang mengalami krisis karakter karena adanya situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan analisis proses pertama, implementasi pendidikan kewarganegaraan dengan jalur pendidikan formal yaitu memberikan teladan. Analisis proses kedua, upaya membentuk karakter anak didik menekankan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Keberhasilan pembelajaran dilakukan dengan memahami kondisi psikologis anak didik. Hal ini untuk mengetahui tindakan dan strategi pembelajaran. Analisis proses ketiga bahwa pembentukan karakter di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya di era pandemi Covid-19 akan berjalan dengan efektif dengan adanya variasi metode pembelajaran dengan dalam membentuk karakter. Para pendidik juga perlu memiliki kompetensi pedagogik dan kepribadian.

ABSTRACT

*The Analysis of the Learning Process of Civic Education in Shaping the Character of Students in Covid-19 Pandemic. This study aims to describe the role and constraints of Civic Education in shaping character in the era of the Covid-19 pandemic. Civic Education has the responsibility to shape the character of students, but currently many students are experiencing a character crisis due to a situation that is contrary to the values of Pancasila. This research uses a qualitative approach and a descriptive method. Data collection techniques use interviews, observations and literature reviews. The data analysis technique used is interactive data analysis. The results showed an analysis of the first process, the implementation of civic education with a formal education path, namely providing an example. The analysis of the second process, the attempt to shape the character of the protégé emphasizes cognitive, affective and psychomotor aspects. Successful learning is carried out by understanding the psychological condition of students. This is to know the learning actions and strategies. Analysis of the third process that character building in civic education learning is basically in the era of the Covid-19 pandemic will run effectively with the existence of variations in learning methods by forming character. Educators also need to have pedagogical competence and personality.*

Keywords:

Learning Process

Analysis;

Civic Education;

Students Character;

Pandemic of Covid-19.

Copyright © 2022 (Muhammad Hendri Nuryadi & Pipit Widiatmaka). All Right Reserved

How to Cite : Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022). Analisis Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Anak Didik di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 22-31. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6558>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan harus diaplikasikan secara nyata, demi mewujudkan manusia yang beradab (Iswardhana, 2020). Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari proses mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, sehingga tidak dipungkiri dalam memajukan suatu negara dimulai dari pendidikan. Pentingnya peran pendidikan dapat dibuktikan di era penjajahan, setiap negara yang dijajah mampu bangkit melalui proses pendidikan, sehingga rakyat mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan pada akhirnya mampu menjadi negara yang merdeka. Fenomena tersebut pernah terjadi di Indonesia yang dijajah Belanda, setelah berjalannya politik balas budi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian rakyat Indonesia untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, pada akhirnya rakyat Indonesia mampu mengusir para penjajah dan mampu merdeka di tahun 1945. Indonesia, dengan demikian menyadari bahwa pentingnya peran pendidikan demi terwujudnya negara yang merdeka dan sejahtera. Pendidikan yang berhasil yaitu yang mampu membentuk manusia yang berkembang dan memiliki potensi yang utuh melalui pengalaman nyata yang dialami (Fatimah et al., 2021).

Pembangunan sumber daya manusia merupakan gerakan massa di setiap negara khususnya di Indonesia, sehingga tidak dipungkiri pembangunan karakter menjadi tujuan utama di dalam mewujudkan tujuan nasional (Muslich, 2011). Indonesia saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, yang ternyata menjadi kendala di dalam membentuk karakter anak didik karena seluruh pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau daring, demi menurunkan tingkat penularan virus tersebut. Meskipun sedang mengalami pandemi Covid-19, tetapi pembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap berjalan demi masa depan yang cerah (Gultom, 2020). Hal ini membuat segala urusan harus dilakukan dengan cara, seperti silaturahmi, rapat, jual beli dan lain sebagainya.

Pandemi Covid-19 menjadi kendala di dunia pendidikan menjadi kendala. Kendala tersebut dapat dilihat dari data angka putus sekolah di Kota Pontianak semakin meningkat. Jumlah anak didik di tingkat SD dan SMP yang putus sekolah mengalami peningkatan, angka putus sekolah tingkat SD sejumlah 95 anak didik, sedangkan di tingkat SMP mencapai 141 (Agata, 2021). Fenomena ini menjadi permasalahan yang serius di dunia pendidikan karena proses mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terkendala. Pandemi ini memiliki dampak yang luas, baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun pendidikan. Dampak yang sangat terasa yaitu di dunia pendidikan karena banyak tindakan anak didik yang tidak mencerminkan nilai Pancasila sehingga sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia ke depannya (masa depan Indonesia) karena anak didik yang belajar saat ini merupakan pemegang estafet kepemimpinan di masa depan.

Kapolsek Negara di Bali, Gusti Sudarma mengungkapkan peningkatan kenakalan remaja atau anak didik di era pandemi Covid-19 meningkat, karena pembelajaran dilaksanakan di luar sekolah atau secara *daring*. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sebagian besar adalah kasus pencurian, di Bali dalam waktu kurang lebih sebulan terdapat kasus pencurian motor yang dilakukan oleh remaja (Praptono, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa anak didik sedang mengalami krisis karakter, sehingga harus segera ditindaklanjuti agar permasalahan ini tidak berkembang. Di dalam peristiwa ini yang harus bertanggung jawab salah satunya adalah pendidik khususnya yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena permasalahan tersebut berkaitan dengan moral khususnya karakter anak didik.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ujung tombak dalam membangun karakter anak didik yang berdasarkan kepribadian bangsa, namun peran yang dilakukan oleh pendidik

masih kurang maksimal sehingga pembangunan karakter bangsa menjadi terkendala (Widiatmaka, 2021). Karakter adalah suatu nilai-nilai universal tingkah laku manusia yang di dalamnya meliputi segala aspek kehidupan manusia, yang berkaitan antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan, yang terwujud di dalam pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan yang berdasarkan norma dan adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat (Widiatmaka, 2016). Pada dasarnya karakter terbentuk membutuhkan suatu proses yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga dibutuhkan suatu tindakan yang disengaja untuk membentuk atau membentuk karakter khususnya anak didik. Di dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan apabila berjalan dengan maksimal, maka karakter akan terbentuk dengan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan selama ini selalu menekankan pada aspek pengetahuan atau *knowledge*, sehingga keterampilan atau *skills* dan karakter atau *disposition* belum bisa dibangun dengan cara maksimal. Di sisi lain, pandemi Covid-19 ini menjadi kendala pendidikan yang mengampu pembelajaran tersebut. Pada dasarnya permasalahan tersebut, merupakan permasalahan klasik bagi pendidik yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, namun hingga saat ini permasalahan tersebut tidak segera diantisipasi sehingga pembangunan karakter melalui pembelajaran tersebut menjadi terkendala.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatini dan Saylendra menunjukkan pembinaan karakter pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun ketika pandemi Covid-19 menyerang masyarakat Indonesia pembinaan karakter menjadi terkendala karena sistem pembelajaran harus dilakukan dengan daring (Rahmatiani & Saylendra, 2021). Penelitian tersebut berfokus pada kajian deskriptif yang terarah pada pembentukan karakter peserta didik berbasis keterampilan abad 21. Rahmatini dan Saylendra menyimpulkan pola pembiasaan yang dilakukan guru kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya karakter dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada fokus penelitian yaitu pada analisis proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era pandemi Covid-19 dalam membentuk karakter bangsa. Ada beberapa kendala yang dikaji terkait kompetensi pedagogik dan kepribadian.

Penelitian yang kedua dilakukan Sudirman di tahun 2021 dengan judul “Mewujudkan Guru PPKn Yang Ideal Melalui Pengembangan Kualitas Kepribadian Guru”. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada pendidik yang berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal terhadap anak didik khususnya di Indonesia bagian timur khususnya ketika melakukan pembelajaran di era pandemi Covid-19. Situasi tersebut karena anak didik belum memahami materi secara maksimal (Sudirman, 2021). Komparasi dengan penelitian ini terletak pada sasaran dan lokus penelitian. Sasaran penelitian ini ada pada kekuatan analisis proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan lokus penelitian ini bukan di Indonesia bagian timur, tetapi secara umum ada di ruang kelas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rachman dan Azam pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 70% pendidik yang mengampu Pendidikan Kewarganegaraan tidak berkomunikasi dengan orang tua anak didik terkait perkembangan belajar anak didik di rumah khususnya kegiatan yang dilakukan yang dilakukan di rumah (Rachman & Azam, 2021). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena metode penelitian ini bekerja secara kualitatif dengan menganalisis proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama dalam upaya membentuk karakter anak didik.

Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui internet dengan maksimal untuk membentuk karakter anak didik, namun hingga kurang lebih 2 tahun selama pandemi Covid-19, pembangunan karakter anak didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang signifikan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka di dalam penelitian ini akan membahas terkait problematika Pendidikan Kewarganegaraan di dalam membentuk karakter anak didik di era pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat seiring berjalannya waktu di era pandemi Covid-19, para remaja khususnya anak didik mengalami krisis karakter.

### Metode

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengambilan data peneliti menggunakan (1) studi kepustakaan (buku, jurnal, media massa, *proceeding* yang diakses secara *offline* dan juga *online*), (2) wawancara dengan beberapa narasumber yang berprofesi sebagai seorang pendidik atau guru, dan (3) observasi, dengan mengamati anak didik ketika pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berlangsung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif, ada beberapa tahap di dalam analisis data interaktif, yaitu sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data/informasi di lapangan, (2) kondensasi data, (3) menyajikan suatu data, dan (4) menarik suatu kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

### Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang mengimplementasikan pendidikan karakter untuk membentuk karakter anak didik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, *de facto* di era pandemi Covid-19 menjadi suatu fenomena menarik yang menjadi peluang dan hambatan dalam membentuk karakter anak didik. Pandemi Covid-19 dengan demikian menjadi tantangan bagi pendidik, terutama yang mengampu Pendidikan Kewarganegaraan. Situasi ini karena di masa pandemi, para pendidik diwajibkan untuk terampil dalam penguasaan media pembelajaran, karena pembelajaran dilaksanakan secara *daring*. Teknologi pembelajaran seiring berjalannya waktu selalu berkembang terutama di era pandemi Covid-19 atau dapat dikatakan sebagai transisi dari revolusi industri 4.0 ke era *society 5.0*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama akhir tahun 2019 hingga 2021, ketika mengajar ternyata banyak anak didik yang minat belajarnya terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat kurang, karena sebagian besar anak didik berpendapat bahwa pendidik yang mengampu Pendidikan Kewarganegaraan selalu menekankan pada aspek pengetahuan saja, tidak ke upaya implementasi pada ranah afeksi dan psikomotorik. Selain itu, metode pembelajarannya membosankan karena selalu menggunakan metode pembelajaran ceramah dan ketika pembelajaran *daring* selalu menggunakan aplikasi *whatsapp* (Hasil observasi peneliti di lapangan, 2021).

Minat belajar di masa pandemi Covid-19 idealnya mengantarkan anak didik untuk memahami pendidikan karakter dan bisa mengimplementasikannya. Hal ini menjadi kendala, karena pembelajaran secara *daring* menyulitkan adanya pertemuan langsung via tatap muka. Oleh karena itu, pembangunan karakter yang berdasarkan Pancasila sulit untuk diimplementasikan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengimplementasikan Pendidikan karakter (Zuriah, 2021). Pendidik khususnya yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama pandemi Covid-19 mengalami banyak kendala dalam

---

mengimplementasikan pembelajaran secara daring, mengingat masih banyak guru yang belum menguasai perkembangan teknologi yang berbasis digital. Di sisi lain, pendidik saat ini belum mampu menjadi *role model* bagi anak didiknya dalam menggunakan ponselnya atau *handphoneya*, sehingga banyak anak didik yang mengakses situs-situs yang mengandung konten negatif (situs porno). Anak didik di dalam menggunakan ponselnya tidak memandang batas waktu, sehingga bermain game dengan ponselnya hingga larut malam bahkan hingga pagi. Hal tersebut mengganggu kesehatan dan mental anak didik sehingga berdampak pada minat belajar khususnya Pendidikan Kewarganegaraan menjadi berkurang (Diplan, 2019).

Hasil observasi di lapangan tahun pembelajaran 2019 dan 2020 menunjukkan masih banyak pendidik yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melakukan tindakan-tindakan negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti bersikap individualis dengan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan tertentu, seperti kepala sekolah dan melakukan politik praktis ketika diselenggarakan pemilu. Hal tersebut berdampak pada pembelajaran yang kurang maksimal khususnya dalam membangun karakter anak didik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di sisi lain, hasil wawancara dengan dua pendidik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan SMP menyatakan bahwa masih banyak pendidik yang masih buta terhadap perkembangan teknologi sehingga di dalam proses pembelajaran hanya memanfaatkan aplikasi *whatsapp*, tidak menggunakan aplikasi yang lainnya. Selain itu, metode pembelajaran yang diimplementasikan adalah penugasan, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Fenomena tersebut menjadi suatu permasalahan yang serius karena para pendidik seharusnya mampu bersikap dan berperilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti karakter religius, kemanusiaan, persatuan (nasionalisme), demokratis dan keadilan (Jasrudin et al., 2020).

Ada tiga analisis proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter anak didik di masa pandemi Covid-19 diuraikan sebagai berikut. Analisis proses pertama, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk diupayakan tetap dengan jalur pendidikan formal. Hal ini karena dimensi sosial tetap perlu untuk mengembangkan rasa kebersamaan pada anak didik. Walaupun di masa pandemi Covid-19, pembelajaran formal dialihkan dalam bentuk daring (*online*), namun para guru tetap perlu memberikan panutan atau teladan. Teladan yang dimaksud, misalnya menggunakan kata-kata yang sopan, memberi semangat kepada anak didik untuk terus belajar, memberi pendampingan ekstra dalam mendampingi pekerjaan rumah yang sulit, dan sebagainya. Karakter yang mengutamakan teladan ini bisa membuat anak didik termotivasi untuk belajar, walaupun hanya melalui tatap layar dengan aplikasi *online meeting* (seperti zoom, googlemeet, google classroom).

Berdasarkan pada hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo beberapa pendidik melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila yaitu berjudi dan melakukan penipuan terkait jual beli barang. Hal ini menjadi suatu problematika terkait kompetensi kepribadian sebagai seorang pendidik, karena seorang pendidik seharusnya dalam membangun karakter anak didik harus dimulai dari dirinya sendiri dengan cara bersikap dan berperilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Peristiwa tersebut menjadi suatu yang sangat ironi, mengingat seorang pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Pendidik yang mengampu Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengemban amanah seharusnya dalam membangun karakter anak



didik memiliki beberapa sikap, yaitu: (1) mempunyai komitmen untuk mensukseskan tujuan dari pendidikan dan cita-cita anak didik, (2) menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang merupakan kuncinya karakter, (3) mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran baik secara *daring* maupun *luring* dan memecahkan suatu permasalahan, (4) fokus untuk mengembangkan keilmuan (Sugara & Mutmainnah, 2020). Di sisi lain, seorang pendidik juga harus memiliki beberapa kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Melalui sikap dan kompetensi tersebut, maka di dalam analisis proses mengimplementasikan pembentukan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat berjalan dengan baik, dan karakter anak didik dapat terbangun berdasarkan keperibadian bangsa

Pembentukan karakter paling efektif adalah melalui pemberian contoh dan perilaku yang mencerminkan terjadinya relasi sosial yang saling bekerjasama dan memotivasi. Karakter ini yang menjadi model pembelajaran yang menarik selama menjalani pembelajaran online. Selain itu upaya mengembangkan karakter masyarakat yang baik dan cerdas di jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal yang menjadi bagian tujuan pendidikan nasional di negara Indonesia. Pembangunan karakter dapat dilaksanakan di era pandemi Covid-19, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, namun pembangunan tersebut menjadi terkendala karena pembelajaran selalu dilaksanakan dengan cara *daring*. Fenomena ini menunjukkan bahwa seorang pendidik harus mampu berpikir secara inovatif dengan membuat suatu konsep strategi pembelajaran yang efektif dalam rangka membentuk karakter anak didik. Apabila seorang pendidik mampu memilih strategi pembelajaran yang efektif ketika pembelajaran dilaksanakan secara *daring*, maka tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter anak didik dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Analisis proses kedua, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yang sentral dan sangat penting di dalam menumbuhkan dan juga mengembangkan cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang rukun, toleransi dengan tidak meninggalkan keberagaman yang memang sudah menjadi tujuan negara kesatuan Indonesia (Harmanto, 2017). Peran ini dapat mengantisipasi konflik yang ada di Indonesia, baik konflik secara horizontal maupun vertikal. Pada dasarnya Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang sangat efektif di dalam membentuk karakter anak didik, khususnya di era pandemi Covid-19, karena pembelajaran tersebut tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, melainkan juga menekankan pada aspek afektif dan juga aspek psikomotorik. Keberhasilan di dalam pembelajaran ini ditentukan oleh seorang pendidik, sehingga seorang pendidik harus memahami psikologis anak didik agar mengetahui tindakan yang akan diambil serta strategi pembelajaran yang akan diterapkan.

Pendidikan Kewarganegaraan di dalam membentuk peradaban di negara Indonesia khususnya kaitannya dengan pembentukan karakter anak bangsa, mempunyai tujuan yang sangat beragam demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang harus dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan, baik di jenjang pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah maupun di pendidikan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat sentral di dalam membentuk karakter anak bangsa, sehingga mata pelajaran atau mata kuliah tersebut memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar di dalam mewujudkan tujuan nasional. Pada dasarnya peran untuk membentuk karakter bangsa tidak hanya tugas

---

Pendidikan Kewarganegaraan saja, namun juga tugas mata pelajaran yang lain, tetapi Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai beban moral yang sangat besar karena pada dasarnya merupakan pendidikan moral untuk anak bangsa.

Implementasi pembangunan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengembangan budaya literasi di lingkungan sekolah. Implementasi karakter Pancasila dapat dilakukan dengan mengembangkan budaya literasi yang berkaitan dengan Pancasila sehingga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya dipelajari saja, melainkan juga diimplementasikan oleh anak didik. Pada dasarnya pembangunan karakter anak didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seorang pendidik tinggal memformulasikan strategi pembelajarannya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal (Aisyah, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan pada intinya menumbuhkembangkan tiga kompetensi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu (1) *civic knowledge*, yang menekankan pada aspek pengetahuan kewarganegaraan, (2) *civic skills*, yang menekankan pada keterampilan kewarganegaraan, dan (3) *civic disposition*, yang menekankan pada aspek kepribadian atau karakter kewarganegaraan. Pada dasarnya secara teori pembelajaran tersebut memiliki peran sentral dalam membangun moral dan karakter anak didik, karena secara yuridis maupun keilmuan sangat efektif mengemban tugas tersebut.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk karakter anak didik dengan maksimal, apabila seorang pendidik yang mengampu pembelajaran tersebut memiliki keseriusan, keinginan yang tinggi dan kompetensi yang berkualitas. Pada dasarnya peran yang paling sentral di dalam hal ini adalah pendidik atau guru yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidik merupakan penentu atau pembentuk masa depan anak bangsa, sehingga peran pendidik di sini sangat dibutuhkan, tidak hanya di Indonesia saja melainkan juga seluruh dunia. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memberikan suatu kebijakan yang mendorong terselenggaranya pendidikan karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa khususnya di era pandemi Covid-19, seperti yang diungkapkan oleh Salamor yang menjelaskan bahwa kepemimpinan suatu instansi juga sangat mempengaruhi terbentuknya karakter anak didik, karena sebagai pemangku kebijakan (Salamor, 2016).

Djamarah menjelaskan bahwa ada beberapa peran penting seorang pendidik yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: (1) sebagai seorang korektor, (2) sebagai Inspirator atau mampu menginspirasi anak didik, (3) salah satu sumber informasi, (4) organisator, (5) mampu memotivasi anak didik, (6) mampu menginisiasi, (7) mampu memotivasi anak didik, (8) membimbing anak didik, (9) mampu mengelola kelas, (10) mampu menjadi mediator, (11) mampu mendemostrasikan, (12) menjadi seorang supervisor, dan (13) mampu mengevaluasi (Sudirman, 2021). Pada dasarnya seorang pendidik memiliki peran yang sangat mulia, karena berusaha untuk mendidik anak didik untuk menjadi manusia seutuhnya (dalam konteks keindonesiaan membentuk manusia Pancasila) sehingga harus memiliki sikap yang baik. Seorang pendidik merupakan suri tauladan bagi anak didiknya, sehingga harus mampu memberikan contoh dalam hal bersikap atau bertingkah laku baik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, seorang pendidik harus menguasai bahkan memiliki kompetensi seorang pendidik, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial agar dapat membentuk karakter anak didik khususnya di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan keterangan beberapa pendidik yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten (Asep Wibowo guru MTs

Negeri 4 Klaten, Auliya Setiyawan guru SMP Negeri 1 Gatak, Sukoharjo) memaparkan hal yang sama, yaitu masih banyak guru khususnya yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan metode pembelajaran yang monoton, seperti ceramah melalui pembelajaran daring dan metode penugasan sehingga anak didik selalu diberi tugas melalui *watshaap*. Pada dasarnya metode yang diimplementasikan kurang bervariasi dan menimbulkan kebosanan pada anak didik dan pada akhirnya minat belajar pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi berkurang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa beberapa anak didik menunjukkan bahwa anak didik mengalami kebosanan dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena metode pembelajaran kurang bervariasi.

Analisis proses ketiga yaitu bahwa pembentukan karakter di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya di era pandemi Covid-19 akan berjalan dengan efektif, selain metode yang bervariasi seorang pendidik harus secara intensif berkomunikasi langsung dengan orang tua anak didik karena pembelajaran dilaksanakan secara daring khususnya berkaitan dengan perkembangan pembelajaran anak didik di rumah. Apabila hal tersebut terjadi, maka potensi krisis karakter anak didik menjadi sangat kecil dan yang terjadi sebaliknya. Untuk itu, para pendidik atau guru juga perlu memiliki kompetensi pedagogik dan kepribadian sehingga tujuan pembelajaran tercapai.

Bencana pandemi Covid-19 menjadi suatu kendala bahkan bisa menjadi tantangan ketika seorang pendidik mampu mengembangkan kompetensinya khususnya dalam penguasaan teknologi. Berdasarkan hasil observasi ternyata sebagian besar pendidik saat ini termasuk generasi X, yang pada dasarnya rata-rata umurnya 50 tahun ke atas dan tidak menguasai teknologi informasi. Padahal di revolusi industri 4.0 semua orang dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam mencari segala informasi atau data. Hal tersebut menjadi kendala bagi seorang pendidik yang termasuk generasi X sehingga pembelajaran di era pandemi Covid-19 melalui daring tidak berjalan dengan efektif dan pembangunan karakter anak didik menjadi terkendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Wibowo, pendidik yang mengampu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan ternyata di dalam proses pembelajaran secara daring hanya menggunakan aplikasi *Whatsapp*, dan tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi *zoom meeting*, *goggle meet* dan lain sebagainya (wawancara, 2021). Hal ini menjadi keprihatinan karena banyak seorang pendidik yang tidak bisa menguasai teknologi yang berkembang sehingga metode pembelajaran yang diimplementasikan monoton dan pembangunan karakter anak didik menjadi terkendala. Padahal anak didik saat ini merupakan pemegang estafet kepemimpinan di masa depan. di era saat ini masih ada pendidik yang melakukan tindakan yang tidak humanis kepada anak didiknya, karena tidak memiliki kesabaran dalam mendidik anak didik atau tidak menguasai kompetensi kepribadian.

Suwarma melakukan penelitian di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn di jalur pendidikan formal, tujuan pembelajaran tidak tercapai dan menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan atau *civic knowledge*. Hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 1) tidak bertindak sebagai seorang pemberi fasilitas (fasilitator), tetapi bertindak sebagai sumber utama belajar, 2) lebih banyak bertindak sebagai pemberi materi pembelajaran, namun belum menunjukkan sebagai seorang pembelajar, 3) masih belum bisa mengelola kelas dengan baik, dan hanya sebagai pemberi berita atau informasi dari referensi, 4) masih belum merencanakan dengan baik dalam membentuk kemampuan berpikir anak didik, 5) masih bertindak sebagai seorang pengajar, dan belum menjadi seorang panutan, dan 6) belum bertindak sebagai seorang pemberi motivasi atau motivator (Winarno, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan masih banyak pendidik kurang kreatif dan inovatif khususnya yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, untuk itu setiap pendidik harus memiliki kesadaran atau pandai introspeksi diri mengenai pembelajaran yang dilaksanakannya masih jauh dari harapan tentang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya seorang pendidik harus bisa mengimplementasikan metode pembelajaran yang bervariasi ketika pembelajaran dari, misal metode isu kontroversial berkaitan dengan bhineka tunggal ika, secara langsung maupun tidak langsung metode tersebut dapat membentuk karakter. Metode pembelajaran isu kontroversial dapat membangkitkan pemikiran anak didik untuk menjadi kritis terkait isu-isu bhineka tunggal ika di dalam kehidupannya. Hal ini dapat membentuk karakter nasionalisme dan toleransi anak didik (W. W. Winarno et al., 2020).

Permasalahan ini ternyata hingga saat ini ketika terjadi pandemi Covid-19 masih sama, sehingga hal tersebut pada dasarnya permasalahan klasik yang harus segera diantisipasi agar proses pembangunan karakter dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Masih menekankan aspek kognitif juga menjadi permasalahan pada pembelajaran daring, selain itu masih banyak pendidik yang belum menguasai atau mengoperasikan teknologi di dalam proses pembelajaran dengan baik, bahkan lebih pandai anak didiknya. Hal ini menjadi sangat ironis, ketika seorang pendidik tidak bisa membentuk karakter anak didik di dalam pembelajaran daring dan melakukan tindakan kekerasan verbal dan non verbal sehingga banyak anak didik yang mengalami krisis karakter.

### **Simpulan**

Pendidikan Kewarganegaraan menekankan adanya karakter dalam proses pembelajarannya. Para guru dan anak didik memerlukan relasi sosial untuk saling mendukung dalam proses belajar di sekolah. Pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam mewujudkan relasi tersebut karena tatap muka di kelas berubah menjadi tatap maya yang difasilitasi secara daring. Penelitian ini menyimpulkan tiga yaitu analisis proses pertama, implementasi pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk diupayakan tetap dengan jalur pendidikan formal dengan mengutamakan dimensi sosial bahwa para guru tetap perlu memberikan panutan atau teladan. Analisis proses kedua, upaya membentuk karakter anak didik, khususnya di era pandemi Covid-19, menekankan pada aspek kognitif afektif dan psikomotorik. Keberhasilan di dalam pembelajaran ini ditentukan oleh seorang pendidik, sehingga seorang pendidik harus memahami psikologis anak didik agar mengetahui tindakan yang akan diambil serta strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Analisis proses ketiga, yaitu bahwa pembentukan karakter di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya di era pandemi Covid-19 akan berjalan dengan efektif dengan adanya variasi metode pembelajaran dengan dalam membentuk karakter. Para pendidik juga perlu memiliki kompetensi pedagogik dan kepribadian sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu, para pendidik secara intensif berkomunikasi langsung dengan orang tua anak didik karena pembelajaran dilaksanakan secara daring khususnya berkaitan dengan perkembangan pembelajaran anak didik di rumah.

### **Rerefensi**

- Agata, R. (2021). *Angka Putus Sekolah Tinggi Selama Pandemi*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/pontianak/pendidikan-kebudayaan/1098956/angka-putus-sekolah-tinggi-selama-pandemi>
- Aisyah, S. (2021). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Literasi Budaya Menyongsong Era Revolusi 4.0 di SMKN 3 Banjarbaru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 49–56.

- Diplan. (2019). Tentang Pendidikan Di Era Digital. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 14(2), 41-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.33654/jpl.v14i2.888>
- Fatihah, H., Waluyati, S. A., & Dianti, P. (2021). Pengembangan Buku Ajar Berbasis Kontekstual pada Mata Kuliah Dasar dan Konsep Pendidikan Moral. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 22-33.
- Gultom, Andri, "Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1," Researchgate, 2020<[https://www.researchgate.net/publication/340091676\\_Filsafat\\_Corona\\_dan\\_Kepanikan\\_Kita](https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita)>
- Harmanto. (2017). *Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguatan Karakter Bangsa*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Iswardhana, M. R. (2020). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Jasrudin, J., Putera, Z., & Wajdi, F. (2020). Membangun Karakter Peserta Didik Melalui Penguatan Kompetensi PKn Dan Penerapan Alternatif Pendekatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 42-52.
- Miles, Huberman & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Praptono, D. D. (2021). *Potensi Kenakalan Remaja di Negara Meningkat Saat Pandemi*. Jawapos.Com. <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/19/05/2021/potensi-kenakalan-remaja-di-negara-meningkat-saat-pandemi>
- Rachman, F., & Azam, Q. (2021). Pembelajaran Jarak Jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 42-55.
- Rahmatiani, L., & Saylendra, N. P. (2021). Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad 21. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 54-63.
- Salamor, L. (2016). Pengembangan Model Pembelajaran Jurisprudential pada Mata Pelajaran PKn. *Pedagogika: Jurnal Pedagogika Dan Dinamika Pendidikan*, 4(1), 1-16.
- Sudirman, S. (2021). Mewujudkan Guru PPKn Yang Ideal Melalui Pengembangan Kualitas Kepribadian Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 57-70.
- Sugara, H., & Mutmainnah, F. (2020). Peran Guru PPKn dalam Membangun Karakter Bangsa Sebagai Respon dan Tantangan Abad Ke-21. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(29), 16-30.
- Widiatmaka, P. (2016). Pembangunan karakter nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama Islam. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 25-33.
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 176-185. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.41>
- Winarno, W. (2013). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: Isi, strategi, dan penilaian. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Winarno, W. W., Rusnaini, R., Muchtarom, M., Yuliandri, E., Al Rasyid, M., & Suryaningsih, A. (2020). Analisis Kesulitan Guru PPKn dalam Mengembangkan Materi Pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(2), 97-112.
- Zuriah, N. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Polysynchronous di Era New Normal. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(1), 12-25.

## Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter

Hendri<sup>a,1\*</sup>, Ichwani Siti Utami<sup>b,2</sup>, Lili Nurlaili<sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Pamulang, Indonesia

<sup>1</sup> [doseno2650@unpam.ac.id](mailto:doseno2650@unpam.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 10 Januari 2021;

Revised: 24 Mei 2022;

Accepted: 14 Juni 2022.

---

### Kata-kata kunci:

Optimalisasi Peran Sekolah;  
Analisis Interaktif;  
Penguatan Pendidikan Karakter;  
Peserta Didik.

---

### Keywords:

Learning Process  
Analysis;  
Civic Education;  
Students Character;  
Pandemic of Covid-19.

---

### ABSTRAK

Warga Negara Indonesia menjunjung tinggi adab atau akhlak menjadi suatu keniscayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memperhatikan hal tersebut, karena berperan untuk membuat warga memiliki karakter. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis optimalisasi peran sekolah bagi penguatan pendidikan karakter. Sasaran penelitian yaitu peserta didik di SMPN 02 Ciseeng, desa Kuripan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: pertama, keteladanan guru dan seluruh stakeholder sekolah mampu memberikan dampak positif pada karakter siswa. Kedua, lingkungan dan budaya sekolah yang baik berpotensi pada perkembangan karakter siswa. Ketiga, seluruh aktivitas sekolah yang dibuat melalui musyawarah mufakat yang bertujuan mendisiplinkan karakter siswa yang ada. Jadi, penguatan pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari budaya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menciptakan dan menekankan pada tingkat intelektual dan emosional siswa.

---

### ABSTRACT

**Optimization the Role of Schools with Interactive Analysis for Strengthening Character Education.** Good bad character of a nation depends on how much the role of the nation in trying to change, care for and educate the nation itself, including the Indonesian nation. Indonesia as a country that upholds adab or morals becomes an inevitability for all levels of society, the government to pay attention to this, because the role of both is very important in determining the future of a civilized nation. The purpose of this study is to find out the form of school optimization in strengthening student character education at SMPN 02 Ciseeng, Kuripan village. This research intends to focus on the school's efforts in strengthening the character of SMPN 02 Ciseeng students. This research uses descriptive methods with a qualitative approach. In data collection using interviews, observations and documentation. Then analyzed using interactive analysis, namely: starting from data collection, reduction, presentation, and conclusion. The research findings show that: (1) the transparency of teachers and all school stakeholders is able to have a positive impact on student character; (2) a good school environment and culture have the potential to develop student character; (3) all school activities made through consensus deliberation aimed at approving the character of existing students. Thus, the strengthening of character education cannot be separated from school culture as an educational institution that creates and emphasizes on the intellectual and emotional level of students.

Copyright © 2022 (Hendri dkk). All Right Reserved

How to Cite : Hendri, Utami, I. S., & Nurlaili, L. (2022). Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 32-43.  
<https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6464>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Indonesia saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini karena, ada penyimpangan perilaku yang ditemukan saat ini, baik di dunia nyata lebih lagi di dunia maya (Najib, 2012). Pertikaian dimana-mana, saling menghujat, mencaci, mencuri, kekerasan seksual dan lain sebagainya, seperti bangsa yang tidak punya landasan moral, padahal Pancasila hadir sebagai landasan yang diciptakan oleh tokoh bangsa untuk menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar Negara yang menjunjung tinggi nilai keadaban, sopan santun, penuh kasih sayang dan persatuan (Kariadi & Suprpto, 2017). Oleh karenanya peran setiap lapisan masyarakat, instansi perlu turut andil dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dengan kapasitas yang dimiliki oleh mereka, lebih-lebih lembaga pendidikan yang notabennya memang sangat tepat sebagai lembaga edukasi (Ria Yuni Lestari, 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 3, menyebutkan tentang fungsi pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir, membangun keadaban (karakter), dan menciptakan kehidupan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan martabat dalam rangka melaksanakan amanah pembukaan Undang-Undang dasar 1945, alinea ke-4 yaitu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan ini didukung oleh Budiman & Ismatullah (2015) bahwa pendidikan menentukan perkembangan individu dalam membentuk karakter kemandirian, tanggungjawab, kreatif, sehat, berilmu, berakhlak mulia dan mampu memberikan energi positif masyarakat lingkungan setempat. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu bertujuan meningkatkan potensi siswa dengan menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya

Penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Dalyono & Lestariningsih di tahun 2017 yang berjudul "Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah." Penelitian tersebut terarah pada upaya mewujudkan bahwa penguatan pendidikan karakter terarah pada potensi religius yang tinggi ditandai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyai kecakapan sosial yang baik, tanggung jawab, mandiri, toleransi, kreatif, inovatif, dinamis, dan demokratis (Dalyono & Lestariningsih, 2017). Hal tersebut kemudian dikonsepsikan menjadi lima karakter prioritas yaitu: (1) karakter religius; (2) karakter nasionalis; (3) karakter mandiri; (4) karakter gotong-royong dan; (5) karakter integritas (Kemendikbud., 2017). Semua tersebut harus didukung oleh pendidikan, terutama di sekolah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, pada penelitian Dalyono & Lestariningsih terarah pada implementasi penguatan, sedangkan penelitian ini fokus pada optimalisasi peran sekolah. Ada kesamaan yaitu upaya metodologi pada penguatan pendidikan karakter, hanya subject matter penelitian ini lebih pada upaya mengoptimalkan peran sekolah dengan menekankan pada nilai-nilai yang ada dan diajarkan di sekolah.

Penelitian sebelumnya yang kedua, dilakukan oleh Dalyono & Lestariningsih. Dalam penelitiannya dengan judul memperkuat karakter bangsa, diperoleh sebuah pernyataan bahwa implementasi penguatan pendidikan karakter dapat dengan mudah dilakukan dan dibentuk di sekolah. Walaupun, lingkungan masyarakat dan keluarga sama-sama mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter bangsa. Tetapi, sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang kunci utama dalam penanaman karakter dan akhlak peserta didik. Sekolah dengan otonominya menempatkan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, mengintegrasikan nilai-nilai dan karakter-karakter dalam setiap mata pelajaran. Tidak sampai disitu, melalui sebuah kegiatan tambahan (ektrakurikuler) yang berorientasi

---

pembinaan karakter siswa dapat pula membantu siswa/ atau peserta didik menjadi lebih terampil dalam bersikap dan berakhlak mulia (Dalyono & Lestariningsih, 2020).

Hasil penelitian Thomy Satra Atmaja, Jagad Aditya Dewantara dan Bambang Budi Utomo juga menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter di Sekolah Menengah Atas perbatasan Entikong Kalimantan Barat dilakukan melalui tiga program yakni: (1) penguatan pendidikan karakter melalui program pengembangan diri; (2) penguatan pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran; (3) penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah (Atmaja et al., 2020). Penelitian Atmaja, dkk dalam paradigma ini memiliki perbedaan, karena penelitian ini lebih berfokus pertama, pada optimalisasi peran sekolah dengan analisis interaktif bagi penguatan pendidikan karakter. Kedua, lokus penelitian ini juga berbeda, penelitian Atmaja, dkk di Entikong, Kalimantan Barat, sedangkan penelitian ini berada di desa Kuripan, Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Ketiga penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas, menandakan bahwa penelitian ini masih tergolong penelitian yang relatif baru. Relatif baru, karena ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Artinya, dimensi *state of the arts* dari penelitian ini terpenuhi dan menjadi bentuk penelitian yang layak untuk dikaji. Ranah kajian dari penelitian ini adalah sekolah lembaga pendidikan yang memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dan pengawasan yang kemudian menjadi kearifan budaya dalam sebuah sekolah tentu mempunyai peran besar dalam terbentuknya pembiasaan karakter siswa (Andriani et al. 2018 & Satria 2018). Oleh sebab itu sekolah dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk siswa berkarakter dan upaya memperkuat karakter tersebut, maka perlu strategi yang baik bagi setiap sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Ciseeng desa Kuripan agar dapat membentuk siswa menjadi generasi unggul berdaya saing menyambut tahun 2045 (selanjutnya disebut Generasi Emas 2045) (Andriani et al., 2018).

Dalam menindaklanjuti argumentasi yang berupa data dan fakta dari hasil penelitian terdahulu di atas peneliti sangat tertarik untuk meneliti penguatan pendidikan karakter di SMPN 02 Ciseeng desa Kuripan lebih lanjut, melihat SMPN 02 Ciseeng berlokasi di desa Kuripan yang notabene masyarakatnya ber-sumberdaya daya manusia rendah, dan dirasa sangat penting lembaga pendidikan dalam melakukan upaya peningkatan dan penguatan karakter siswa melalui peran seluruh jajaran sekolah.

## Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah deskriptif. SMPN 02 Ciseeng menjadi *lokus* penelitian yang terletak di desa Kuripan, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor. SMPN 02 Ciseeng ini berada di lingkungan masyarakat yang bersumber daya manusia rendah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 2020). Informan penelitian diambil dari pihak yang mempunyai keterkaitan dan kepakaran dalam penelitian ini, yaitu: kepala sekolah, komite sekolah, siswa, guru-guru yang merangkap jabatan menjadi kesiswaan, guru Bimbingan Konseling (BK) dan orang tua siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara setelah itu dianalisis untuk mencapai keabsahan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian data yang berhasil diperoleh setelah melewati proses kemudian divalidasi untuk mendapatkan kevalidan informasi. Validasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data (Creswell, 2010).



---

## Hasil dan Pembahasan

Karakter adalah serangkaian sifat yang dianggap baik dalam kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. Setiap lapisan masyarakat dan pemerintah kerjasama ikut serta memperhatikan dan membangun akhlak anak didik kita. Desa Kuripan salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ciseeng Bogor memerlukan perhatian intens dalam membangun karakter peserta didik dengan memaksimalkan peran sekolah. Perlunya penguatan pendidikan karakter di sekolah SMPN 02 Ciseeng disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap perhatian pada anak kurang baik. Ini diakibatkan karena tingkat pendidikan masyarakat desa Kuripan masih rendah, hal ini diketahui dari laporan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa Kuripan, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor pada tahun 2010-2025 terdapat rumusan strategi dalam penanganan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan, salah satunya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pemerataan fasilitas pendidikan desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 2020).

Dalam laporannya penduduk desa Kuripan pada tahun 2020 mencapai 10,873 jiwa, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 11128 jiwa. Ada peningkatan yang terjadi. Kemudian dilihat dari tingkat usia dari data penduduk desa Kuripan pada tahun 2019, usia dari 0-4 Tahun sebesar 1697, usia 5-9 Tahun sebanyak 1005, usia dari 10-14 Tahun sebanyak 987, usia dari 15-19 Tahun sebanyak 927, usia dari 20-24 Tahun sebanyak 690, usia 25-29 Tahun sebesar 820, dan usia 30-34 Tahun sebesar 974. Dari presentase ini menunjukkan bahwa usia sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajatnya atas masyarakat desa Kuripan pada tahun 2019 sebanyak 2.919 jiwa. Sedangkan menurut data yang diperoleh dari desa Kuripan pada tahun 2019 menunjukkan tingkat lulusan Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya yang melanjutkan pada jenjang berikutnya hingga perguruan tinggi hanya sebanyak 530 orang dari jumlah 2.170 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 2020). Dari data tersebut memberi kesimpulan bahwa masyarakat desa Kuripan masih jauh dari kata sejahtera (kondisi baik) dilihat dari tingkat sumber daya manusia yang masih rendah, dan rendahnya pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan karakter peserta didik, disebabkan berada di lingkungan masyarakat yang notabennya tidak mempunyai integrasi pengetahuan yang baik. Sedangkan dari data sekolah menunjukkan bahwa jumlah siswa SMPN 02 Ciseeng sebanyak 500 siswa, 85% merupakan penduduk asli desa Kuripan, 15% merupakan penduduk di luar desa Kuripan yang berdomisili di desa Kuripan. Jadi dari data tersebut menunjukkan bahwa 100% siswa SMPN 02 Ciseeng berasal dari masyarakat desa Kuripan, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor. Rendahnya Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang menyebabkan disintegrasinya karakter.

Lalu bagaimana upaya pemperkuat pendidikan karakter siswa SMPN 02 Ciseeng? Sekolah sebagai lembaga dengan berbagai disiplin memanfaatkan peran seluruh jajaran sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, pejabat struktural sekolah, salah satunya adalah komite sekolah, orang tua, siswa dan penjaga kebun turut andil dalam mengambil bagian sebagai media edukasi yang selalu menjadi cerminan siswa berkarakter. Tidak hanya itu, lingkungan sekolah pun didesain menjadi lokasi yang menarik, aman dan nyaman bagi keberadaan siswa (Wiratmoko & Fahrudi, 2016).

Keterlibatan seluruh jajaran sekolah: guru, kepala sekolah, keamanan penting dalam melakukan upaya pembentukan karakter, serta memberikan dampak besar dalam mendesain karakter siswa. Selain dirinya sadar sebagai *role model* pertama dalam penguatan karakter siswa, mereka pun harus membangun komitmen untuk tidak melakukan amoralitas yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang ada. Akhlak mulia seorang guru adalah modal utama yang harus dimiliki. Dampak dari komitmen ini lah yang akan merubah pola pikir peserta didik dengan segala pendekatan yang dilakukan.

Andi, dari Komite Sekolah, dalam wawancaranya memaparkan bahwa peran kepala sekolah sangat penting, selain sebagai pimpinan dalam sekolah tersebut, juga yang bertanggung jawab atas semuanya. Hal ini berkaitan bagaimana kepala sekolah membangun lingkungan kerja yang baik dengan para guru, siswa dan orang tua siswa. Oleh karena itu sekolah ini kurang dapat dibangun dengan baik, menghasilkan siswa yang baik berakhlak mulia manakala kepala sekolah tidak bekerjasama dengan guru dan orang tua siswa (Andi, 2021. 27 November). Kepala sekolah sebagai eksekutif pendidikan di sekolah dan agen politisi harus mampu menjaga hubungan, kerjasama dengan setiap orang, khususnya dengan guru, peserta didik dan masyarakat.

Selanjutnya, SMPN 02 Ciseeng dalam mengoptimalkan perannya dengan berinteraksi dalam membangun budaya sehat melalui 5S yaitu: (1) senyum; (2) salam; (3) sapa; (4) sopan; dan (5) santun, serta tanggung jawab dalam mendampingi siswa setiap aktivitas yang dibuat sekolah, pendisiplinan dalam taat aturan serta meningkatkan kualitas pengajaran di dalam kelas. Aktivitas sekolah ini sangat mendukung penguatan pendidikan karakter siswa (Atmaja et al., 2020). Misalkan, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, beliau memaparkan bahwa siswa sebelum dimulai jam pelajaran pertama, sekolah mengkondisikan siswa harus mengikuti terlebih dahulu aktivitas-wajib. Senin upacara bendera merah putih, Selasa kegiatan literasi (buku yang dibaca dibebaskan, serta disediakan di perpustakaan), Rabu shalat Dhuha *jama'atan*, Kamis mengaji (yang non-muslim diarahkan dengan kitab sucinya masing-masing, Jumat bersih yang dilakukan sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar di kelas) (Elia, 2021. 24 September).

Tujuan aktivitas yang dilakukan di SMPN 02 Ciseeng tersebut adalah untuk membentuk 5 karakter prioritas yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Yaitu, karakter religius, karakter nasionalisme, karakter kemandirian, karakter gotong-royong dan karakter integritas.

Tabel. 1. Optimalisasi Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik

Lima Nilai Karakter	Aktivitas Siswa	Lokasi
1. Religius	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doa sebelum memulai pelajaran</li> <li>• Rabu, Dhuha</li> <li>• Kamis, Mengaji baca dan tulis Alquran</li> <li>• Perayaan Isra Mi'raj</li> <li>• Maulid Nabi Muhammad</li> <li>• Penerapan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun.</li> </ul>	Dalam dan luar kelas
2. Nasionalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mata pelajaran (Sejarah, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, geografi, bahasa Indonesia dan agama)</li> <li>• Upacara bendera merah putih hari Senin</li> <li>• Memperingati hari nasional, 17 Agustus</li> <li>• Pramuka</li> <li>• Paskibraka</li> <li>• PMR</li> </ul>	Dalam dan luar kelas
3. Gotong-royong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan siswa dalam seluruh aktivitas sekolah:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belajar dengan giat</li> <li>2) Partisipasi dalam pelaksanaan 5S dan 5 hari aktivitas sebelum proses belajar dikelas di mulai.</li> </ol> </li> </ul>	Dalam dan luar kelas

	3) Ikut dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler sekolah 4) Patuh pada aturan sekolah	
4. Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punya kemampuan untuk mengambil keputusan memilih dalam segala hal termasuk ikut kegiatan intra dan ekstrakurikuler</li> </ul>	Dalam dan luar kelas
5. Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab sebagai siswa terpelajar</li> <li>• Rajin mengikuti kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan sekolah</li> <li>• Jujur dalam mengerjakan tugas</li> <li>• Konsisten pada setiap pilihannya</li> </ul>	Dalam dan luar kelas

Karakter menjadi unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara hal ini dapat dipastikan sebab manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dengan yang lainnya. Dalam menjalin hubungan memerlukan sikap luhur yang mendasari atas prinsip hidup bersama (Maryono et al., 2018). Oleh sebab itu sangat perlu kiranya karakter anak didik kita sebagai regenerasi lanjut dijaga dan disiplinkan lagi agar terjaga dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain (Arkani, 2017) lewat peranan pendidikan.

Pendidikan karakter penting untuk digalakkan pada setiap satuan pendidikan. Hal ini juga menjadi *statement* Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) tentang revolusi mental (Yuver Kusnoto, 2017). Dalam merespon cita-cita mulia tersebut sudah sepantasnya setiap satuan pendidikan terus menerus mengawal langkah gerakan tersebut, mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Pendidikan menjadi perihal paling prinsip dalam membentuk karakter siswa (Wiratmoko & Fahrudi, 2016), dengan pendidikan pola pikir peserta didik menjadi cerdas, pintar dan bijaksana dalam menghadapi dan menyikapi setiap permasalahan (*smart good citizen*). Hal ini sesuai dengan 5 karakter prioritas yang dicanangkan oleh Kemendikbud, yaitu: (1) karakter religius; (2) karakter nasionalis; (3) karakter mandiri; (4) karakter gotong-royong dan; (5) karakter integritas. 5 karakter inilah yang terdeteksi oleh peneliti sebagai bentuk keberhasilan dari proses pembelajaran di SMPN 02 Ciseeng desa Kuripan. SMPN 02 Ciseeng sebagai lembaga pendidikan aktif dinamis walau terletak di desa Kuripan dengan SDM masyarakat rendah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 2020) dirasa tepat keberadaannya sebagai lembaga penguatan pendidikan karakter. Sebab lembaga pendidikan mempunyai pendidik yang berpotensi dalam membentuk dan mempertahankan karakter siswa (Dalyono & Lestariningsih, 2020).

Penguatan pendidikan karakter di SMPN 02 Ciseeng yang dilakukan dengan analisis interaksi memberdayakan peran seluruh elemen di sekolah sekolah, yang meliputi kepala sekolah dan jajarannya. Mulai dari kerapian guru, kedisiplinan, sifat tanggung jawab dan sopan santun guru memang harus dilakukan dengan baik, sebab baik buruknya siswa tentu akan dimulai dari perilaku guru sebagai orang diteladani Pemanfaatan ini juga dilakukan dalam budaya organisasi sekolah untuk membentuk karakter peserta didik dengan memanfaatkan keberadaan seluruh *stakeholder* sekolah menjadi paling esensial untuk menata regulasi pendidikan dan kebijakan (Iqbal et al., 2018). Kepala sekolah mempunyai peran penting sebagai pemangku kebijakan untuk menentukan kiblat pendidikan sekolah. Kepala sekolah juga bertugas sebagai pengelola satuan pendidikan dan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Upaya menindaklanjuti dari peran fungsi kepala sekolah dapat dirumuskan (Rosyadi & Pardjono, 2015), sebagai berikut: (1) kepala sekolah sebagai pimpinan pemegang kendali dalam

mengatur para guru, pegawai tata usaha dan pegawai sekolah serta masadepan sekolah. artinya posisi kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai peranan penting keberadaannya bagi sekolah; (2) kepala sekolah sebagai administrator yang tidak kalah penting dalam membentuk kinerja para bawahannya. hal, ini disebabkan dalam kegiatan administrasi membutuhkan kerjasama dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, membina dan mevaluasi; (3) kepala sekolah sebagai manajer merupakan keniscayaan, sebab kepala sekolah harus mampu mengendalikan dan mampu mengelola pendidikan dengan membangun kerja sama dengan *stakeholder* sekolah dalam upaya membangun sekolah unggul; (4) kepala sekolah sebagai supervisor adalah memiliki beban, peran dan tanggungjawab memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tanggungjawab ini dikenal sebagai tanggungjawab supervisi. Sebagai unsur pimpinan dalam sistem organisasi, selanjutnya; (5) kepala sekolah sebagai pembangun hubungan dengan masyarakat, merupakan agen politik sosial yang menghubungkan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar. Sebagai agen politik sosial, ia harus mampu membangun kerjasama dengan setiap orang, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sebab dalam membangun karakter siswa tidak cukup di sekolah, tapi penting pula dalam mengikutsertakan masyarakat dan orang tua dalam meningkatkan potensi keadaban siswa (*civic virtue*) (Ghozali & Mubarak, 2013).

Dalam melihat peranan seorang pendidik, harus dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) sebagai informator. guru sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum; (2) sebagai organisator. pendidik sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran, dan lainnya; (3) sebagai motivator. peran pendidik sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan-pengembangan kegiatan belajar siswa; (4) sebagai pengarah. pendidik dalam hal ini harus membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan; (5) sebagai inisiator. pendidik dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar; (6) sebagai transmitter, dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan (Arkani, 2017). Pendidikan merupakan satuan komponen yang menyebabkan bangsa ini bangkit dari keterpurukan, dengan menciptakan manusia seutuhnya yaitu, membentuk manusia berkarakter, berakhlak, bermoral (Zuhdiyah, 2013). Hal ini merupakan strategi dalam menghantarkan peserta didik pada hakikat kebenaran, yaitu, siswa yang bermartabat, yang memiliki peradaban mulia, kecerdasan intelektual dan emosional, serta ber-kepribadian yang sejalan dengan tuntutan moral Pancasila. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan peran guru SMPN 02 Ciseeng, desa Kuripan berdampak besar bagi perubahan pola pikir, sikap dan masa depan peserta didik sebagai generasi bangsa Indonesia.

Lima karakter prioritas yaitu: (1) karakter religius; (2) karakter nasionalisme; (3) karakter kemandirian; (4) karakter gotong-royong dan; (5) karakter integritas, harus nampak pada setiap siswa. Sedangkan SMPN 02 Ciseeng dalam menumbuhkan lima karakter prioritas ini selain dengan peran kepala sekolah dan seluruh jajarannya juga melakukan dengan aktivitas-aktivitas positif yang dapat membantu menciptakan budaya 5 karakter prioritas tersebut. Sebab peran budaya yang diciptakan oleh masyarakat juga mempengaruhi pada perkembangan peserta didik (Silkyanti, 2019). Budaya yang dikembangkan dalam lingkungan SMPN 02 Ciseeng dengan sengaja dibentuk agar memperkokoh karakter-karakter yang sebelumnya sudah ditanamkan oleh guru melalui pendekatan pendidikan di dalam kelas. Aktivitas yang dikembangkan sebagai interpretasi dari penguatan pendidikan karakter adalah kegiatan yang dilakukan sebelum

---

pembelajaran di dalam kelas, yang setiap hari selama lima hari di isi dengan berbagai macam aktivitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempersempit ruang lingkup siswa pada inkonsistensi pada keterlambatan siswa masuk sekolah.

Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter di SMPN 02 Ciseeng diketahui dilakukan dengan menggalakkan program-program sekolah, baik intra maupun ekstra kulikuler. Program-program ini yakini mampu menghantarkan siswa pada karakter yang diinginkan. Karakter ideal yang dicanangkan sebagai karakter prioritas siswa, yaitu: (1) karakter religius; (2) karakter nasionalisme; (3) karakter kemandirian; (4) karakter gotong-royong dan; (5) karakter integritas (Kemendiknas, 2011).

Karakter religius, misalnya dengan memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad setiap tahunnya, Isra' Mi'raj, shalat dhuha dan baca ayat suci yang menjadi program wajib sekolah. Program ini merupakan aktivitas dengan orientasi pada karakter religius. Dalam memahami karakter religius ini erat kaitannya dengan pemahaman tentang nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha Esa. Mengutip dari *khatbah* bung Karno pada 1 Juni bahwa arti dari ketuhanan yang maha Esa, bangsa Indonesia bukan sekedar *fasih* menjalankan perintah agamanya, dengan wajib beribadah menurut agamanya masing-masing, namun juga bangsa Indonesia harus mengakui keberadaan agama-agama yang lain di Indonesia (Tukiran, 2014). Nilai karakter religius adalah suatu konsep yang menekankan pada bentuk ketauhidan seorang makhluk pada yang yang Maha kuasa, dan bentuk keimanan manusia atau seorang hamba kepada sang pencipta. Tentu dalam memahami makna keimanan, manusia harus mampu memahami secara kongkrit bahwa iman bukan hanya sekedar mempercayai terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi juga meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah zdat yang mempunyai berbagai macam ciptaan di muka bumi ini untuk dihargai keberadaannya. Dalam ilmu sosiologi agama bahwa tingkat iman manusia tidak cukup hanya dengan cara peribadatan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Swt, namun bentuk iman kepada yang maha kuasa juga harus mampu dirasakan dampak positif oleh makhluk disekitarnya: manusia, lingkungan, tumbuhan dan lainnya sebagainya. Pesan ini menunjukkan siswa harus mempunyai nilai toleransi antar sesama, dan itu sudah diterapkan oleh siswa SMPN 02 Ciseeng, sebab siswa yang heterogen tentu harus dibentuk nilai kasih sayang pada sesama, oleh karena itu dalam tradisi di SMPN 02 Ciseeng dibangun pembiasaan 5S: (1) senyum; (2) salam; (3) sapa; (4) sopan dan; (5) santun.

Karakter nasionalisme, misalkan aktivitas memperingati hari nasional, ikut serta pelaksanaan upacara bendera merah putih setiap hari Senin, pramuka, paskibraka yang terdeteksi sebagai salah satu bentuk kesadaran perilaku cinta tanah air. Aktivitas itu ditujukan semata-mata agar siswa mempunyai karakter ideal yang berdampak pada lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara, sebab terjadinya degradasi moral disebabkan kurangnya tanggungjawab, jiwa nasionalisme generasi bangsa saat ini (Viridianti, 2014). Sikap nasionalisme menjadi pemicu masyarakat dalam mendahului kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongannya (Setiawan, 2017). Sikap nasionalis merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari bentuk keimanan seseorang, yang baik yang beragama Hindu Budha, Kristen, Konghucu dan juga Islam. Dalam konsep nasionalis masyarakat atau seseorang harus mempunyai sikap peduli yang tinggi pada sesama, cita-cita luhur untuk kemajuan kelompok besar, kedamaian, keamanan serta kemakmuran sesama dengan arti tidak mengabaikan kepentingan individu (Murod, 2011). Sikap inilah yang harus diwarisi oleh siswa SMPN 02 Ciseeng, desa Kuripan.

Karakter gotong-royong dapat diketahui dengan keikutsertaan siswa dalam segala aktivitas yang menjadikan komitmen sekolah dalam menciptakan siswa beradab melalui berbagai macam pendekatan yang dilakukan di sekolah. Dalam memaknai gotong-royong tidak sesempit seperti mengistilakan mengangkat barang secara bersamaan. Gotong-royong dalam arti luas adalah partisipasi seseorang dalam segala hal (Suryohadiprojo, 2016). Gotong-royong mempunyai pemaknaan keikutsertaan seseorang dalam membangun setiap kepentingan bersama. Dalam hal ini tentu didasari atas kesadaran yang tercermin dalam bentuk tindakan menghargai, semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan setiap persoalan bersama, menjalin komunikasi aktif dan persaudaraan (Yuver Kusnoto, 2017), sikap inilah yang menjadi tujuan dari pendidikan karakter (Makmun, 2014). Sekolah sebagai miniatur lingkungan kehidupan siswa, kita harus mampu menilai bagaimana siswa dalam menerapkan nilai gotong-royong di lingkungan sekolah. Sesuai dengan konsep di atas bahwa dalam memaknai istilah gotong-royong tidak boleh dimaknai secara terbatas, sebab esensi dari karakter gotong-royong adalah bagaimana seseorang atau siswa dalam ikut serta, membantu meringankan dan mempermudah jalannya setiap aktivitas yang menjadi tujuan bersama. Misalkan, siswa belajar dengan baik dan rajin, ikut serta mentaati peraturan, setiap aktivitas selalu tidak telat. Itu semua contoh kecil konsep gotong-royong (Yuver Kusnoto, 2017). Jadi dari uraian ini dapat disimpulkan gotong-royong siswa SMPN 02 Ciseeng dapat dilihat dengan keaktifan mereka dalam setiap aktivitas sekolah. Partisipasi siswa dalam membantu guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas merupakan bentuk dari kesadaran siswa dalam penerapan karakter gotong-royong.

Karakter kemandirian adalah bentuk yang ditunjukkan siswa melalui tanggung jawab dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa di SMPN 02 Ciseeng. Dan hal ini juga dapat dijadikan bentuk karakter integritas siswa. Karakter integritas merupakan bentuk kesadaran siswa dalam berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu siap, berkomitmen, setia dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi di kewajibannya (Yuver Kusnoto, 2017). Dalam penafsiran ini juga dapat diistilahkan sebagai bentuk dari karakter kemandirian, yang ditandai dengan sikap tidak bergantung kepada orang lain (mandiri), tangguh, profesional dan punya tanggung jawab atas apa yang menjadi komitmennya (Auliyairrahmah et al., 2021).

Kelima karakter tersebut sudah selayaknya ditanamkan pada setiap diri bangsa, khususnya peserta didik, sebab generasi emas penerus bangsa adalah mereka, dan mereka kelak yang akan menjadi nahkoda Indonesia dalam mengarungi peradaban-peradaban dunia. Siswa sebagai generasi bangsa harus mengakui pentingnya upaya pembentukan karakter bangsa (*Nation and character Building*) dengan berbagai macam pendekatan (Sapria & Wahab, 2011). Pembentukan karakter merupakan daya mempertahankan ekosistem suatu bangsa, sebab bangsa yang baik adalah bangsa yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya luhur yang menjadi identitas bangsa (Gultom, dkk, 2020). Sedangkan identitas bangsa Indonesia bersumber dari budaya asli Indonesia yang bermuatan dari hasil pikir (logika), yang didukung dengan kemauan (etika), kemudian dibangun atas dasar persamaan (estetika). Kemajemukan menjadi alasan dasar Indonesia merdeka, dengan usaha bersama tanpa melihat siapa yang berbeda, cita-cita bersatu mengabaikan perselisihan paham dari masyarakat heterogen Indonesia, argumentasi ini yang kemudian menjelma menjadi Pancasila sebagai dasar disiplin karakter bangsa Indonesia (Panjaitan & Sundawa, 2016).

Kedisiplinan itu perlu dibentuk dan dibangun sebisa mungkin oleh siapapun, termasuk juga sekolah. Dalam hal ini guru harus membangun kedisiplinan tersebut serta membentuk

lingkungan yang kondusif bagi siswa. Tata tertib SMPN 02 Ciseeng menjadi salah satu faktor pendorong penguatan kelima karakter, sebab lingkungan yang baik akan membantu mempercepat proses perkembangan karakter siswa (Wuryandani et al., 2016). Diharapkan dalam pembuatan tata tertib ini dilakukan dengan musyawarah mufakat, sebab tata tertib yang dibuat dengan cara sepihak akan mengaburkan rasa empati dan tanggung jawab (Auliyairrahmah et al., 2021). Oleh sebab itu penting bagi seluruh *stakeholder* sekolah salingkerjasama dalam membangun sekolah dan berupaya dalam mengoptimalkan tanggungjawabnya di sekolah, sebab masa depan peserta didik ada ditangan komitmen pendidik.

## Simpulan

Optimalisasi sekolah dilakukan dengan analisis interaktif bagi penguatan pendidikan karakter peserta didik di SMPN 02 Ciseeng dilakukan dengan: (1) memanfaatkan peran seluruh *stakeholder* sekolah (kepala sekolah, guru dan seluruh jajarannya) sebagai teladan bagi siswa dalam bersikap di sekolah; (2) Memberdayakan budaya sehat kondusif. Budaya ini dibentuk dan diprogram untuk membentuk dan membiasakan siswa dalam membudayakan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun; (3) pemberdayakan kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Kegiatan intra merupakan bentuk aktivitas yang dilaksanakan setiap harinya, berupa kegiatan di dalam kelas dalam mengikuti proses pembelajaran, dan juga kegiatan di luar kelas, yang diarahkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ekstrakurikuler meliputi kegiatan paskibraka, upacara memperingati hari nasional 17 Agustus, Pramuka, PMR dan juga aktivitas tahunan yang besiknya pada nilai religius, seperti memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw, serta memperingati Isra Mi'raj Nabi; (4) melalui pendisiplinan siswa taat pada tata tertib sekolah; (5) aktivitas sebelum kegiatan pembelajaran di kelas dimulai, yaitu kegiatan senin upacara bendera, selasa literasi, rabu, shalat dhuha, kamis mengaji, dan jum'at bersih. Jadi lembaga pendidikan yang notabennya adalah lembaga edukasi harus mampu berdampak pada perkembangan sikap siswa di lingkungan sekolah dan masyarakat bangsa

## Referensi

- Andi. (2021). *Optimalisasi Sekolah Dalam Melakukan Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik*.
- Andriani, S. E., Arifin, I., & Nurabadi, A. (2018). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 238–244.
- Arkani, H. (2017). Pembentukan Kepribadian Oleh Guru Melalui Pendidikan Karakter di SMA Puspita Kabupaten Banyuasin. *Prosiding Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 25 November, 84–91.
- Atmaja, T. S., Dewantara, J. A., & Utomo, B. B. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah Menengah Atas Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1257–1266. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.545>
- Auliyairrahmah, A., Djazilan, S., Nafiah, & Hartatik, S. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran melalui Program Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3565–3578. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.939>
- Budiman, A., & Ismatullah, F. (2015). Penerapan Pendidikan Akhlak di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darut Taqwa Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2014-2015. *At-Ta'dib*, 10(1), 155–175.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix*. Pustaka Pelajar.

- Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2017). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. *Bangun Rekaprima*, 03(2), 33-42.
- Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2020). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Phinisi Integration Review*, 3(2), 305. <https://doi.org/10.26858/pir.v3i2.14971>
- Elia. (2021). *Optimalisasi Sekolah Dalam Melakukan Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik*.
- Ghozali, I., & Mubarak, H. (2013). *Ki Hajar Dewanatar (Pendidikan Nasional Yang Agamis)*. Zanafa Publishing.
- Gultom, A. F., Widijatmoko, E. K., & Wadu, L. B. (2020). Penginternalisasikan Karakter Kewarganegaraan Generasi Muda Kota Batu Melalui Kegiatan Retret. *Jurnal Buana Pengabdian*, 2(2), 45-51.
- Iqbal, M., Niswanto, & Ibrahim, S. (2018). Budaya Organisasi Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Pada Sma Negeri 1 Kota Lhokseumawe. *Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(4), 234-241.
- Kariadi, D., & Suprpto, W. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 87-96. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>
- Kemendikbud. (2017). *Peta Jalan Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendikbud
- Kemendiknas. (2011). *Panduan Pendidikan Karakter*. Pusat Kurikulum dan Kebukuan Kemendiknas.
- Makmun, H. A. R. (2014). Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren : Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo. *Cendikia*, 12(2), 212-238.
- Maryono, Budiono, H., & Okha, R. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter Mandiri Di Sekolah Dasar. *Gentala Pendidikan Dasar*, 27(3), 975-987. [https://doi.org/10.1044/2018\\_AJSLP-17-0074](https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-17-0074)
- Murod, A. C. (2011). Nasionalisme Dalam Pespektif Islam ". *Sejarah Citra Lekha*, XVI(2), 45-58.
- Najib, A. (2012). Pengaruh pendidikan karakter terhadap prestasi belajar siswa. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 9(1), 102-109.
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society'S Arts*, 3(2), 64-72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. (2020). *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuripan Tahun 2020-2025*.
- Ria Yuni Lestari. (2016). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan Peserta Didik. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), 136-152.
- Rosyadi, Y. I., & Pardjono. (2015). Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP 1 Cilawu Garut. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(1), 124-133. <https://doi.org/10.21831/amp.v3i1.6276>
- Sapria, & Wahab, A. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabata.
- Satria, P. N. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Refleksi Edukatika*, 8(2), 184-191. <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara Terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 24-33.
- Silkyanti, F. (2019). Analisis Peran Budaya Sekolah yang Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(1), 36. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v2i1.17941>
- Suryohadioprojo, S. (2016). *Budaya Gotong Royong dan Masa Depan Bangsa*. Kompas Media Nusantara.



- Tukiran, T. (2014). *Pemimpin Berkarakter Pancasila*. Bandung: Alfabeta.
- Virdianti, P. (2014). Proses Penetapan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Indonesia Tahun 1949-1951. *Avatara*, 2(2), 59-72.
- Wiratmoko, D., & Fahrudi, E. Z. (2016). Strategi Pendidik dalam Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di SMP Negeri 3 Pacitan. *Penelitian Pendidikan*, 8(1), 1196-1203.
- Wuryandani, W., Fathurrohman, & Ambarwati. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian Di Di Muhammadiyah Boarding School. *Cakrawala Pendidikan*, XXXV(2), 208-216.
- Yuver Kusnoto. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan. *Sosial Horizon*, 4(2), 31-45.
- Zuhdiyah. (2013). Pendekatan Terpadu dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Banyuasin III. *Intizar*, 19(1), 189-203.

## Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis *Boardgame*

Nadya Putri Saylendra<sup>a,1\*</sup>, Fitri Silvia Sofyan<sup>b,2</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

<sup>1</sup> [nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id](mailto:nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 20 November 2021;

Revised: 28 Juni 2022;

Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Pembelajaran PKn;

Pembelajaran Berbasis

Boardgame;

Gamifikasi;

Nilai Sadar Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena perilaku sadar hukum yang masih rendah di kalangan mahasiswa. Perilaku sadar hukum dalam konteks kehidupan kewarganegaraan berguna dalam membangun kehidupan kenegaraan yang lebih baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan perilaku sadar hukum pada mahasiswa melalui proses perkuliahan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis boardgame. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengembangkan perilaku sadar hukum pada mahasiswa dosen telah melakukan perencanaan secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh dengan mengadaptasi game sebagai media pembelajarannya. Pada proses pelaksanaan pembelajaran menunjukkan antusiasme mahasiswa berpartisipasi secara aktif karena proses belajar yang diberikan menarik minat mereka. Inovasi pembelajaran bagi seorang pendidik merupakan sebuah keniscayaan guna meningkatkan taraf kualitas pendidikan.

ABSTRACT

Keywords:

*Civics Learning;*

*Boardgame Based Learning;*

*Gamification;*

*Legal Value;*

**Efforts to Develop Legal Awareness Values in Students Through Boardgame-Based Civic Education Learning.** This research is motivated by the low level of legal awareness among students. Lawful behavior in the context of citizenship is useful in building a better state life and in accordance with applicable legal rules. The purpose of this research is developing lawful behavior in students through the lecture process using a boardgame-based learning model. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Collecting data using interviews, observation and documentation studies. The research subjects were lecturers of Civic Education Courses, Coordinator of Civic Education Courses and students at the Buana Perjuangan Karawang University. The result of the research is that in developing litigious behavior in students, lecturers have planned systematically, structured and thoroughly by adapting games as learning media. In the process of implementing the learning process, students showed enthusiasm to participate actively because the learning process provided attracted their interest. Learning innovation for an educator is a necessity in order to improve the quality of education.

Copyright © 2022 (Nadya Putri Saylendra & Fitri Silvia Sofyan). All Right Reserved

How to Cite : Saylendra, N. P., & Fitri Silvia Sofyan. (2022). Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Boardgame. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 44-54. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6238>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Akhir-akhir ini, ada masalah tentang merosotnya kesadaran hukum (Kuncorowati, 2009). Pandangan mengenai merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Jika menelusuri berita-berita dalam surat kabar, banyak berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Berita-berita tentang perusakan lingkungan, pelanggaran lalu lintas, penipuan, penjambratan, penodongan, pembunuhan, korupsi, kredit macet, manipulasi dan sebagainya. Berdasarkan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2021 mencatat bahwa pelanggaran lalu lintas terjadi 777 kasus pelanggaran pada setiap 100.000 penduduk di suatu wilayah. Sedangkan untuk pelanggaran berupa kejahatan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kejahatan Konvensional di Indonesia Tahun 2021

Jenis Pelanggaran/Kejahatan	Jumlah Kasus
1. Pencurian dengan pemberatan	30.551
2. Penipuan/perbuatan curang	28.034
3. Pencurian biasa	25.401
4. Penggelapan	18.375
5. Terhadap ketertiban umum	9.956
6. Membahayakan keamanan umum	6.937
7. Kekerasan dalam rumah tangga	5.606
8. Mengakibatkan orang luka	4.475
9. Pencurian dengan kekerasan	4.359

Sumber: Pusiknas Polri, 2021

Akibat peristiwa-peristiwa tersebut di atas dapatlah dikatakan secara umum bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun. Pada hakekatnya kesadaran hukum itu tidak hanya berhubungan dengan hukum tertulis. Tetapi dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Dalam konteks perilaku sadar hukum pada mahasiswa, ditemukan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum dasar seperti tidak disiplin dalam mengikuti perkuliahan, pengumpulan tugas, dan tidak menjaga kebersihan lingkungan kampus. Pembaharuan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk menghasilkan peserta didik (mahasiswa) yang sadar hukum di tengah merosotnya kesadaran hukum dan moral masyarakat khususnya para aparatur negara termasuk penegak hukum yang semakin mengabaikan nilai-nilai hukum itu sendiri (Kenedi, 2015). Atas dasar fenomena tersebut, guna mengembangkan perilaku sadar hukum pada mahasiswa peneliti mencoba untuk mengkolaborasi materi perkuliahan yang sesuai untuk mengembangkan perilaku sadar hukum dengan media game. Model ini diharapkan mampu mengupayakan perilaku sadar hukum pada mahasiswa agar mereka mampu menjadi warganegara yang baik dan juga cerdas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Pengembangan Perilaku Sadar Hukum Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis *Boardgame*.

Penelitian dengan judul “perancangan *boardgame* sebagai media pembelajaran mitigasi kebakaran untuk anak sekolah dasar usia 8-12 tahun di Surabaya” yang berfokus pada bagaimana merancang sebuah permainan yang diintegrasikan dalam pembelajaran untuk anak sekolah dasar guna memitigasi bencana (Setyanugrah & Setyadi, 2017). Sedangkan, untuk

tingkat sekolah menengah pertama sudah dilakukan penelitian oleh Putri pada tahun 2019 dengan judul “pengembangan media pembelajaran *green science board game (greecebome)* pada materi pencemaran lingkungan terhadap minat belajar siswa” (Putri, 2020). Pada tingkat sekolah menengah atas juga telah dilakukan penelitian serupa oleh Rahayu dkk dengan judul “permainan monopoli berbasis metode STAD (*student teams achievement division*) sebagai media pembelajaran biologi materi sistem pencernaan” (Rahayu et al., 2019). Hasil penelitian di atas cukup baik dengan menjelaskan bagaimana proses perencanaan media secara lengkap. Namun, masih ada kekurangan yakni apakah media berbasis game ini dapat berjalan maksimal apabila diimplementasikan pada tingkatan perguruan tinggi? Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana media pembelajaran dapat diintegrasikan dengan permainan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, terutama pada tingkat perguruan tinggi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan tersebut, ditemukan bahwa penelitian pada tingkat perguruan tinggi masih minim terutama pada rumpun keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktik terkait pengembangan media pembelajaran berbasis *boardgame* pada tingkat perguruan tinggi khususnya pada keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan perilaku sadar hukum di kalangan mahasiswa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Universitas Buana Perjuangan Karawang yang menjadi *locus* penelitian terletak di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan studi awal pendahuluan, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki kesadaran hukum yang rendah. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan keahlian, yaitu Koordinator Dosen MKU PKn, dosen MKU PKn, dan mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis hingga tercapai keabsahan hasil dengan menggunakan reduksi data, pengelompokan data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber sebagai teknik validasi.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil pada proses perencanaan pembelajaran PKn berbasis *boardgame* untuk mengembangkan perilaku sadar hukum dapat diuraikan sebagai berikut. Pada hakikatnya, Tim Pengampu Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah melakukan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dengan sangat baik. Pada setiap awal semester, Koordinator MKU selalu mendiskusikan dengan anggota agar perencanaan sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Diskusi tersebut biasanya membicarakan tentang perangkat pembelajaran seperti materi, bahan ajar, media, strategi, dan evaluasi seperti apa yang akan digunakan selama satu semester penuh. Kegiatan ini sangat penting sekali dilakukan agar seluruh anggota tim dapat mengetahui dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran PKn sesuai dengan standar kurikulum perguruan tinggi di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Tim Dosen MKU PKn mengikuti arahan yang diberikan oleh Koordinator. Sehingga, Tim MKU dapat segera mempersiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan arahan koordinator dan kurikulum yang berlaku. Untuk mengembangkan perilaku sadar hukum melalui pembelajaran PKn, tim dosen merumuskan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan

mengintegrasikannya ke dalam papan permainan. Permainan papan ini dimodifikasi dari permainan monopoli, catur, dan kartu-kartu yang berisi pertanyaan atau panduan yang diperlukan dalam permainan tersebut. Mahasiswa menjelaskan bahwa dosen selalu menyampaikan rencana perkuliahan selama satu semester di pertemuan pertama. Hal tersebut membantu mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan. Penting sekali bagi mahasiswa untuk mengetahui rencana perkuliahan lebih awal, karena mahasiswa dapat memahami apa tujuan perkuliahan, materi, media yang digunakan, dan evaluasi seperti apa yang akan mereka lakukan.

Pengumpulan data melalui pengamatan lebih dilakukan pada proses pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap Silabus atau rencana pembelajaran semester (RPS) menunjukkan bahwa dosen pengampu MKU PKn telah merencanakan pembelajaran dengan baik. Hal ini terlihat dari kelengkapan perangkat pembelajaran dalam bentuk dokumen RPS.

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum, peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tiga pihak, yang diuraikan secara singkat dalam triangulasi sumber data sebagai berikut.

Tabel 2. Triangulasi Sumber Bagaimana Perencanaan Pembelajaran PKn berbasis Boardgame Untuk Mengembangkan Perilaku Sadar Hukum

Rumusan Masalah	Triangulasi Sumber		
	Koordinator MKU	Dosen	Mahasiswa
Bagaimana Perencanaan Pembelajaran PKn berbasis Boardgame Untuk Mengembangkan Perilaku Sadar Hukum	Perencanaan pembelajaran PKn dilakukan di awal semester, dengan mengadakan rapat koordinasi guna membahas perubahan-perubahan materi, media, dan strategi. Untuk mengembangkan perilaku sadar hukum juga dilakukan melalui rapat, memilih materi ajar, media, strategi dan evaluasi yang akan digunakan.	Tim Dosen MKU PKn selalu mendiskusikan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan pada semester depan. Dalam perencanaan pembelajaran PKn berbasis <i>boardgame</i> untuk mengembangkan perilaku sadar, dosen melakukan kajian terkait materi, tujuan pembelajaran dan boardgame apa yang cocok untuk diadaptasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kami mendesain game, uji coba dan melaksanakan pembelajaran tersebut.	Sebelum pembelajaran berlangsung, Dosen selalu menjelaskan materi, media, dan strategi apa saja yang akan dipakai dalam pembelajaran, kemudian dosen juga selalu memberikan RPS di awal perkuliahan, hal tersebut menandakan bahwa dosen telah membuat perencanaan pembelajaran.

Sumber: diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan triangulasi sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam proses

penyusunan perangkat pembelajaran. Tim dosen MKU melakukan rapat sebelum pembelajaran dimulai, kemudian membahas tujuan pembelajaran, materi, media, strategi, dan evaluasi yang akan digunakan pada mata kuliah PKn. Pada tahap perencanaan tersebut, Tim MKU menyepakati untuk mengadaptasi game dalam pembelajaran. Kemudian menentukan materi dan mendesain pembelajaran.

Menurut Ali (2007: 82) menyatakan bahwa “keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh rencana yang dibuat oleh guru, oleh karena itu, komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran harus disusun atau dikembangkan secara sistematis dan sistemik”. Maka, sebelum melaksanakan pembelajaran, setiap pendidik diwajibkan untuk membuat perencanaan secara lengkap, sistematis, dan menyeluruh agar pembelajaran yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa setiap pendidik perlu dan diharapkan untuk menyusun dan mengembangkan perencanaan pembelajaran. Hal tersebut diperkuat dengan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Bagian Keempat tentang Standar Proses Pembelajaran Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian lulusan. Kemudian pada Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan bahwa standar proses mencakup karakteristik pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan beban kerja mahasiswa.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa menyusun perencanaan proses pembelajaran merupakan kewajiban bagi setiap dosen pada setiap program studi sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Dosen MKU dikatakan dapat memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang disebutkan pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (1) bahwa karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Adapun rancangan awal dari pembelajaran berbasis boardgame, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Rancangan Media Pembelajaran Boardgame

Hal yang terkait dengan capaian pembelajaran yaitu untuk mengembangkan perilaku sadar hukum, Tim MKU menggunakan media game dan materi hak dan kewajiban warga negara. Perilaku sadar hukum merupakan perilaku yang dapat dipelajari dengan berbagai macam cara seperti kita mempelajari perilaku-perilaku lainnya. Perilaku tersebut dapat dikembangkan melalui *observational learning*, *direct experience*, dan *differential reinforcement* (Adler dkk, 1982). *Observational learning* dapat digambarkan bahwa perilaku dipelajari melalui behavioral modelling, di mana perilaku tersebut disalurkan melalui contoh-contoh yang ada di sekitar kita seperti keluarga, teman sebaya, subkultur dan media-massa. *Direct experience* adalah usaha mempelajari perilaku berdasarkan atau melalui pengalaman langsung yang terjadi pada individu atau kejadian yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan *differential reinforcement* merupakan kombinasi dari Teori Psikologi oleh Bandura dan Teori *Differential Association* oleh Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa kuatnya tindakan melanggar hukum berada pada berlakunya hukuman dan penghargaan, dan banyaknya cara dan tujuan dalam memberikan hukuman dan penghargaan tersebut penting atau tidak bagi kehidupan sebuah kelompok atau individu. Namun, pendidik juga perlu untuk merencanakan dan mengembangkan model pembelajaran berbasis boardgame sendiri yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan mengintegrasikannya secara efektif ke dalam pengalaman pembelajaran di kelas (Santos, 2019). Pembelajaran berbasis boardgame ini sangat membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis boardgame mempunyai cakupan luas dan berpotensi untuk memperluas konsep materi peserta didik, dan dapat dilakukan di rumah maupun di lingkungan pendidikan (Mostowfi et al., 2016; Taspinar et al., 2016).

Hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Hal yang ditemukan bahwa pada awal pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum ini mahasiswa terlihat kesulitan. Mahasiswa perlu membaca peraturan dan melakukan percobaan pertama agar mereka memahami cara bermain. Setelah itu mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan menggunakan media boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum. Pelaksanaan pembelajaran dapat dikatakan berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran, terlihat bahwa antusiasme mahasiswa meningkat, mereka tidak segan untuk berpartisipasi secara aktif, suasana belajar yang tidak membosankan, dan mereka mampu memberikan responsi sikap yang positif dari kasus-kasus aktual yang ada dalam media pembelajaran untuk mengembangkan perilaku sadar hukum. Karena di dalam prosesnya ada responsi perasaan atau sisi afektif terkait kejadian-kejadian aktual tentang hak dan kewajiban membuat kepekaan mahasiswa meningkat, sehingga secara sadar mereka mengembangkan perilaku sadar hukum melalui pengalaman pembelajaran itu. Mahasiswa tidak hanya diberikan materi untuk mengasah kemampuan kognitif saja, tapi juga mereka mampu mengasah kemampuan psikomotor dan afektif secara komprehensif. Hal ini tentu sangat baik sekali, karena target dari capaian pembelajaran juga menginginkan perkembangan ketiga aspek tersebut, terutama pada aspek afektif yaitu perilaku sadar hukum.

Pada kelompok mahasiswa ditemukan bahwa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan game sebagai medianya sangatlah menyenangkan. Walaupun dengan kondisi yang terbatas karena pandemi, mereka menikmati pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum. Dari pembelajaran tersebut, mereka mendapatkan pengalaman baru dan lebih semangat untuk belajar karena konsepnya sangat unik, menggabungkan perkuliahan dengan game. Setelah mengikuti pembelajaran tersebut,

mereka dapat memahami konsep tentang hak dan kewajiban warga negara dan bagaimana dapat berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan tetap melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara tanpa melangkahi hak dan kewajiban warga negara lain. Materi pembelajaran sangat menarik karena contoh kasus yang diberikan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan mereka juga wajib untuk memberikan respons yang jujur terhadap kasus tersebut. Hambatan yang dirasakan adalah karena sedang pandemi COVID-19 sehingga perkuliahan tidak bisa dilakukan penuh secara luring. Pada beberapa kesempatan, perkuliahan dilakukan secara luring terbatas. Hanya dipersilahkan untuk 12 orang mahasiswa dan mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan, sisanya melakukan perkuliahan dilakukan secara daring, dan hal tersebut menjadi sulit karena media pembelajaran ini belum bisa digunakan pada platform digital.

Hasil pengamatan dalam proses pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum yaitu mahasiswa nampak antusias dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Walaupun terkendala secara teknis, namun mereka dapat mengatasinya setelah pembelajaran berlangsung. Melalui studi dokumentasi, dosen pengampu telah melakukan proses pembelajaran PKn berbasis boardgame dalam mengembangkan perilaku sadar hukum sudah sesuai dengan RPS mata kuliah.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum, peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tiga pihak, yang hasilnya dapat diuraikan pada tabel triangulasi sumber berikut.

Tabel 3. Triangulasi Sumber Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran PKn berbasis Boardgame Untuk Mengembangkan Perilaku Sadar Hukum

Rumusan Masalah	Triangulasi Sumber		
	Koordinator MKU	Dosen	Mahasiswa
Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran PKn berbasis Boardgame Untuk Mengembangkan Perilaku Sadar Hukum	Pelaksanaan pembelajaran sangat baik, hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Kendala yang terjadi adalah apabila pembelajaran dilakukan secara online, hal tersebut dikarenakan media pembelajaran yang digunakan ini belum berbentuk aplikasi.	Pelaksanaan pembelajaran sangat baik, mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembelajaran PKn dalam mengembangkan perilaku sadar hukum. Kesulitan yang sering muncul adalah ketika pertama kali pembelajaran dilakukan, karena perlu memahami aturan-aturan main dalam pembelajaran tersebut.	Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan boardgame sangat menyenangkan, karena dapat berpartisipasi secara aktif dan menyenangkan. Kendala yang dijumpai adalah perlu latihan terlebih dahulu setelah membaca petunjuk pembelajaran.



Sumber: diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan triangulasi sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame berjalan secara maksimal. Mahasiswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran PKn dan membuat mereka memahami bagaimana perilaku sadar hukum. Adapun kendala yang terjadi adalah media pembelajaran boardgame ini belum dapat dilakukan secara online.

Game edukasi yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah (Handriyantini, 2009). Permainan tidak hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Pembelajaran berbasis board game sendiri sudah dipraktikkan dalam mata pelajaran dan tingkat pendidikan tertentu. Board game, apabila disesuaikan dengan kurikulum dan capaian pembelajaran, dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif dan bermakna (Lee, 2012). Sedangkan, keuntungan dalam gamifikasi pembelajaran adalah siswa memperlihatkan sikap positif selama penggunaan board game dalam proses pembelajaran (Liu & Chen, 2013; Phuong et al., 2017); menghilangkan ketakutan dalam mempelajari materi, meningkatkan kepercayaan diri (Paris & Yussof, 2013); siswa dapat berpikir kritis (Essop et al., 2018); mengurangi beban kognitif dan memungkinkan siswa untuk focus dalam pembelajaran yang bermakna (Stiller & Schworm, 2019); menarik minat siswa dalam proses belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar (Sidi & Nor, 2019); siswa dapat terlibat dalam kerja secara berkelompok dan berkreatifitas (Bayeck, 2020); dan meningkatkan hasil ujian siswa (Tsai et al., 2021). Pernyataan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn pada materi harmonisasi hak dan kewajiban untuk mengembangkan perilaku sadar hukum pada kalangan mahasiswa.

Pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame untuk mengembangkan perilaku sadar hukum sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran yang termuat pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Pelaksanaan pembelajaran PKn ini juga memenuhi tujuan PKn itu sendiri, yaitu “untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*)” (Wahab & Sapriya, 2011). Wahab (1996) dalam menjelaskan warga negara yang baik sebagai warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sumantri (2001) dirinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi: (a) ilmu pengetahuan yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (b) keterampilan intelektual yang mencakup keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang shahih, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif; (c) sikap yang mencakup nilai, kepekaan, dan perasaan; (d) keterampilan sosial (Wahab & Sapriya, 2011).

Menurut pengamatan peneliti, dosen telah melakukan proses pembelajaran secara sistematis dan struktur sesuai dengan RPS yang telah dibuat sebelumnya. Walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai, namun masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Seperti penambahan waktu sebanyak 10 menit di akhir perkuliahan. Pemilihan materi dan contoh-

contoh kasus yang menarik membuat mahasiswa tertarik untuk memberikan komentar dan memberikan responsi seperti marah, senang, sedih, dan diam sebagai bentuk partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran.

### Simpulan

Pengembangan perilaku sadar hukum pada mahasiswa dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn yang mengintegrasikan antara materi dan permainan yang berjenis *boardgame*. Pada tahap perencanaan pembelajaran Tim Dosen MKU PKn berdiskusi dan melakukan prosedur perencanaan pembelajaran seperti merumuskan tujuan khusus pembelajaran yaitu perilaku sadar hukum, memilih pengalaman belajar yang akan dilalui mahasiswa, menentukan kegiatan pembelajaran, menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam pembelajaran, memilih bahan dan alat yang diperlukan dalam pembelajaran seperti menentukan materi, media, dan strategi, memeriksa ketersediaan fasilitas pembelajaran dan merencanakan evaluasi dan pengembangan. Setelah ditetapkan menggunakan boardgame dalam pembelajarannya, Tim Dosen MKU PKn segera untuk mendesain pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis boardgame berjalan secara maksimal dan sesuai dengan perencanaan pembelajaran (RPS). Mahasiswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran PKn dan membuat mereka memahami bagaimana perilaku sadar hukum. Mereka dapat memberikan contoh apa saja perilaku sadar hukum yang harus mereka miliki dan terapkan dalam keseharian mereka. Adapun kendala yang terjadi adalah media pembelajaran boardgame ini belum dapat dilakukan secara online.

### Referensi

- Adler, Ronald B., & Rodman, Goerge, (1982). *Human Communication*. New York: Rinehart and Windston, Inc
- Anggara. (2008). *Memahami Teknik Dasar Pembuatan Game Berbasis Flash*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bayeck, R. Y. (2020). Examining Board Gameplay and Learning: A Multidisciplinary Review of Recent Research. *Simulation and Gaming*, 51(4), 411-431. <https://doi.org/10.1177/1046878119901286>
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Budimansyah, D. & Bestari, P. (2011). *Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Bandung: Widya aksara Press.
- Budimansyah, D. (2007). Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang. *Jurnal Acta Civicus*, 1 (1), hlm. 11-26
- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Creswell. (2012) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamarah, Syaiful Bahri, Aswan Zain. (2001). *Strategi Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Rineka cipta.
- Essop, H., Kekana, M., Sethole, M., Ahrens, E., & Lovric, G. (2018). board game to enhance teaching and learning in the Radiographic Technique module. *International Journal for Innovation Education and Research*, 6(10), 124-140. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol6.iss10.1173>

- Handriyantini, Eva. (2009). Permainan Edukatif (Educational Games) Berbasis Komputer untuk Siswa Sekolah Dasar
- Kenedi, J. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam. *Madania*, 19(2).
- Kuncorowati, P. W. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics*, 6(1), 60–75.
- Lee, H. L. J. (2012). SMARTies: Using a Board Game in the English Classroom for Edutainment and Assessment. *Malaysian Journal of ELT Research*, 8(1), 1–35.
- Liu, E. Z. F., & Chen, P.-K. (2013). The Effect of Game-Based Learning on Students' Learning Performance in Science Learning - A Case of "Conveyance Go." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 103, 1044–1051. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.430>
- Mostowfi, S., Mamaghani, N. K., & Khorramar, M. (2016). Designing Playful Learning By Using Educational Board Game for Children In The Age Range of 7-12: (A case study: Recycling and waste separation education board game). *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(12), 5453–5476.
- Paris, T. N. S. T. D., & Yussof, R. L. (2013). Use of 'Time Trap Board Game' to Teach Grammar. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 105, 398–409. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.042>
- Phuong, H. Y., Nguyen, T., & Nguyen, P. (2017). The Impact of Board Games on EFL Learners' Grammar Retention Hoang Yen Phuong, Thao Nguyen Pham Nguyen. 7(3), 61–66. <https://doi.org/10.9790/7388-0703026166>
- Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Pusiknas Polri. (2021). *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri*. Jakarta: Pusiknas Polri
- Putri, D. R. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Green Science Board Game (Greecebome) Pada Materi Pencemaran Lingkungan Terhadap Minat Belajar Siswa. Universitas Negeri Semarang.
- Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*, Calabas: Center for Civic Education.
- Rahayu, I. S., Santoso, H., & Asih, T. (2019). Permainan Monopoli Berbasis Metode Stad (Student Teams Achievement Division) Sebagai Media Pembelajaran Biologi Materi Sistem Pencernaan. *Edubiolog*, 1(1), 1–7.
- Santos, A. (2019). Board Games as Part of Effective Game-Based Learning Strategies. *Learning, Design, and Technology*, 1–19. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4\\_142-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4_142-1)
- Setyanugrah, F., & Setyadi, D. I. (2017). Perancangan Board Game Sebagai Media Pembelajaran Mitigasi Kebakaran Untuk Anak Sekolah Dasar Usia 8-12 Tahun Di Surabaya. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 62–68.
- Sidi, J., & Nor, N. S. M. (2019). The Efficiency of Game-Based Learning Towards Student's Focus And Enjoyment Using Board Game : A Case Study at SK Martin The Efficiency of Game-Based Learning Towards Student's Focus And Enjoyment Using Board Game : A Case Study at SK Martin. *Proceeding of International University Carnival on E-Learning (IUCEL)*, September.
- Soekanto, Soerjono (1982). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*: Jakarta Rajawali Press
- Stiller, K. D., & Schworm, S. (2019). Game-Based Learning of the Structure and Functioning of Body Cells in a Foreign Language: Effects on Motivation, Cognitive Load, and Performance. *Frontiers in Education*, 4(March), 1–19. <https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00018>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif. R & D)*. Bandung: Alfabeta

- Sumantri, M. & Syaodih, S. (2007). *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Depdiknas.
- Suryabrata, Sumadi. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa Rajawali
- Taspinar, B., Schmidt, W., & Schuhbauer, H. (2016). Gamification in Education: A Board Game Approach To Knowledge Acquisition. *Procedia Computer Science*, 99 (October), 101–116. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.104>
- Tsai, J. C., Liu, S. Y., Chang, C. Y., & Chen, S. Y. (2021). Using a Board Game to Teach About Sustainable Development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su13094942>.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Wahidin, Samsul. (2010). *Pokok pokok pendidikan ewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winataputra, U. S. & Ardiwinata. (1991). *Materi Pokok Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.

## Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telaah Literatur

Warih Andan Puspitosari<sup>a,1\*</sup>, Faudyan Eka Satria<sup>b,2</sup>, Arni Surwati<sup>c,3</sup>, Iswanto<sup>d,4</sup>

<sup>abcd</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> warihandan@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Januari 2022;

Revised: 22 Juni 2022;

Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Kampus inklusi;

Pendidikan Tinggi;

Penyandang Disabilitas.

Keywords:

*Inclusive Campus;*

*Higher Education;*

*Persons with disabilities.*

: ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak mendapatkan pendidikan. Kampus inklusi berupaya mewujudkan pemenuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi kontemporer penyandang disabilitas di lingkup perguruan tinggi Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan telaah literatur, yang bekerja dengan memilih artikel melalui proses penyaringan pada tahun 2020-2021. Proses telaah dilakukan pada database online yaitu Proquest. Ada sepuluh artikel yang ditelaah yang sesuai dengan kriteria inklusi. Berdasarkan analisis dari artikel tersebut ada beberapa komponen tantangan dalam mewujudkan kampus inklusi. Pertama, pandangan masyarakat dan diskriminasi yang menilai bahwa prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi hidup secara optimal adalah dengan memiliki kesempurnaan tubuh. Kedua, perlunya dorongan bagi pemangku kebijakan untuk memenuhi sarana, prasarana serta sumber daya manusia serta kebijakan dalam menyelenggarakan kampus inklusi. Ketiga, manajemen pembelajaran dan sumber daya manusia. Keempat, aksesibilitas layanan kampus yang ditujukan untuk melampaui prasyarat formal sebuah perguruan tinggi dalam menerapkan konsep kampus inklusi.

ABSTRACT

***The Challenges of Realizing an Inclusion Campus in Higher Education in Literature Review.*** Persons with disabilities are part of society that has rights that must be respected, protected and fulfilled, including the right to education. Inclusion campuses strive to realize the fulfillment of higher education for people with disabilities. This study aims to describe the contemporary situation of people with disabilities within the scope of Indonesian universities. This research method uses a literature review, which works by selecting articles through a screening process in 2020-2021. The review process is based on online database, namely Proquest. There are ten articles studied that fit the inclusion criteria. Based on the analysis of the article, there are several components of the challenge in realizing an inclusion campus. First, the view of society and discrimination that judges that the absolute prerequisite for realizing the vision of life optimally is to have the perfection of the body. Second, there is a need for encouragement for policymakers to meet facilities, infrastructure and human resources as well as policies in organizing inclusion campuses. Third, learning and human resource management. Fourth, the accessibility of campus services aimed at exceeding the formal prerequisites of a college in implementing the concept of an inclusion campus.

Copyright © 2022 (Warih Andan Puspitosari, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Saylendra, N. P., & Fitri Silvia Sofyan. (2022). Upaya Pengembangan Nilai Sadar Hukum pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Boardgame. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 44-54. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6238>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, menawarkan pendekatan baru dalam menangani penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah hak asasi manusia. Menurut UN-CRPD, penyandang disabilitas adalah seseorang dengan disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat mencegah partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain (The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., 2007). Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah pendidikan. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menjamin hak atas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas (Kanter, 2011). Adanya kebijakan perluasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas telah menyebabkan peningkatan jumlah siswa penyandang disabilitas (Wisbey & Kalivoda, 2016).

Pendidikan tinggi diakui sebagai tempat untuk pengembangan individu, kesejahteraan sosial dan kohesi sosial atas keragaman kemampuan fisik, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam perguruan tinggi untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas (Kamanzi et al., 2021). Pengembangan kampus inklusi merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan inklusif adalah praktik pendidikan di sekolah yang melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, semua anggota diperlakukan sama karena memiliki nilai yang sama sebagai anggota masyarakat (Moriña, 2017). Inklusi berarti pengintegrasian siswa umum dengan anak berkebutuhan khusus secara holistik yang mencakup seluruh kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial di dalam sekolah (Yusuf, 2015). Pendidikan inklusif memandang anak berkebutuhan khusus tidak dilihat sebagai suatu bentuk disabilitas, tetapi harus dipahami sebagai anak dengan kondisi kesehatan yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda dan mencapai prestasi yang berbeda secara bersama-sama (Isrowiyanti, 2013). Pendidikan inklusif adalah proses belajar mengajar di mana siswa penyandang disabilitas dididik bersama siswa non disabilitas di sekolah umum dengan modifikasi kurikulum dan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuannya (Muhibbin & Hendriani, 2021).

Pendidikan inklusi di pendidikan tinggi harus menjadi tempat di mana siswa penyandang cacat dapat belajar, berpartisipasi dan dilihat sebagai individu yang berharga di universitas (Morgado et al., 2016). Penyandang disabilitas perlu mencari universitas yang menawarkan layanan infrastruktur yang tepat untuk kekhasan mereka dan kemudian menentukan apakah ada jurusan yang mereka inginkan, sehingga mahasiswa penyandang disabilitas mau tidak mau dihadapkan dengan sedikit pilihan dan sangat terbatas (Karellou, 2019). Perguruan tinggi dituduh melakukan diskriminasi jika tidak dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Morgado et al., 2016). Penyandang disabilitas yang memiliki akses ke pendidikan tinggi masih menghadapi perlakuan tidak pantas dan diskriminasi (Andayani & Afandi, 2019). Hal ini dapat terjadi dalam bentuk model pembelajaran yang tidak adaptif, lingkungan sosial yang tidak ramah, serta sarana dan prasarana yang tidak terjangkau oleh siswa berkebutuhan khusus. Perguruan tinggi membutuhkan waktu lama untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan sepenuhnya menerapkan pendidikan inklusif (Moriña, 2017).

Urgensi pendidikan inklusi terarah pada pendidikan yang nyata dan kebutuhan mendesak untuk semua sistem pendidikan di seluruh dunia. Oleh karena itu universitas perlu mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa menjadi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan di semua level pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi (Mag et al., 2017). Kampus inklusi mencakup proses dimana universitas berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan mahasiswa melalui akomodasi program dan ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas dalam banyak hal. Sederhananya, kampus inklusi adalah kampus yang terbuka untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas (Ro'fah et al., 2010). Pendidikan inklusif menjamin kesetaraan dan keadilan sosial, memberikan anak berkebutuhan khusus kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas sehingga individu dapat memenuhi potensi mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat (Muhibbin & Hendriani, 2021). Pengembangan kampus inklusi harus berangkat dari kesadaran atas kesengsaraan yang dirasakan masyarakat marjinal seperti kaum disabilitas (Thompson, 2021). Menurut Honneth, kampus inklusi mesti dilandaskan pada tiga dasar filosofi: (1) menumbuhkan pengakuan cinta untuk mencerminkan cara paling dasar dimana setiap orang perlu mendapat pengakuan untuk diri sendiri dan menjadi bagian dari dunia sosial; (2) adanya makna universalitas dalam bentuk pengakuan bahwa semua harus berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan; (3) pengakuan penghargaan di mana semua orang dapat berkontribusi pada kebaikan sosial sesuai dengan sifat, keterampilan, watak, dan pengetahuan masing-masing (McArthur, 2021).

Layanan kampus komprehensif dilakukan dengan tindakan yang diambil untuk mengubah unit layanan yang tersedia di universitas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kampus yang ramah dan mudah diakses serta mengurangi hambatan teknis untuk belajar dan lingkungan sosial di kampus yang dihadapi mahasiswa penyandang disabilitas (Ro'fah et al., 2010). Penyelenggaraan layanan inklusi di kampus terkait mahasiswa difabel, ada lima klasifikasi. Pertama, menciptakan dan memelihara komunitas kelas yang hangat yang menerima keragaman dan menghormati perbedaan. Kedua, ciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, dan agama. Pendidikan inklusif berarti menerapkan kurikulum multi level dan multimodal. Ketiga, mengadopsi kurikulum dan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran di kelas inklusif bergerak dari pembelajaran kompetitif yang kaku dengan mengacu pada materi tertentu ke pembelajaran kolaboratif yang mencakup kolaborasi antara siswa dan materi tematik. Keempat, menerapkan pembelajaran interaktif. Pengembangan program erat kaitannya dengan pengembangan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana satu guru berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan semua anak di kelas perlu beralih ke model di mana siswa bekerja sama, mengajar dan belajar dari satu sama lain, dan secara aktif berpartisipasi satu sama lain dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. dan pendidikan teman-temannya. Semua anak di dalam kelas tidak untuk bersaing tetapi untuk belajar dan mengajar satu sama lain.

Kelima, mendorong guru dan kursus mereka untuk terus menerus dan menghilangkan hambatan yang terkait dengan isolasi pekerjaan. Aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengajaran kelompok, kerjasama, dan konsultasi. Kolaborasi antara guru dan profesi lain dalam satu tim sangat penting, seperti dengan spesialis, spesialis pengembangan wicara, instruktur, supervisor khusus, dan banyak lagi. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja dengan baik dengan orang lain membutuhkan pelatihan dan dorongan yang terus-menerus. Keterlibatan orang tua yang signifikan dalam proses perencanaan dan pembelajaran. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada partisipasi aktif orang tua dalam

---

pendidikan anak-anaknya, misalnya partisipasi mereka dalam pengembangan program pendidikan individual (PPI), dan dukungan untuk belajar di rumah. Menerapkan kebijakan kampus terkait kemaslahatan penyandang disabilitas untuk menciptakan rasa memiliki bagi penyandang disabilitas di dunia akademis (Wren Butler, 2021).

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memajukan nilai-nilai umum hak asasi manusia, memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk menentukan pilihan, hidup saling toleransi dan non-diskriminasi yang dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendekatan ini dibangun dan dikembangkan menjadi konsep pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas yang merancang sistem pendidikan yang efektif dan adil bagi semua siswa dalam aspek pendidikan (Victoria et al., 2017). Penelitian ini diperlukan untuk melihat bagaimana kondisi sekarang sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas: apa peluang dan tantangan model-model pendidikan yang telah diterapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi bagaimana penerapan sistem pendidikan inklusi, suatu sistem pendidikan yang diharapkan dapat diterapkan bagi penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

Beberapa penelitian tentang kampus inklusi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Morgado, dkk di tahun 2016. Penelitian ini sebagian berada di University of Seville yang merupakan proyek dari Dr. Anabel Moriña. Inti penelitian yang dilakukan Morgado, dkk yaitu menegaskan bahwa universitas sebagai institusi membuka pintu yang menghalangi siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif, yang secara lebih khusus menggunakan metode biografi-naratif, untuk membentuk rangkaian kisah hidup. Pendidikan tinggi, bagi Morgado, dkk, perlu mengenali semua hambatan dan perlu ada komitmen yang kuat untuk mengatasinya. Fasilitas disediakan bagi para siswa kebutuhan khusus untuk perbaikan melalui kebijakan, strategi, proses dan program yang mengarah pada praktik baru yang mendukung inklusi (Morgado, B., Cortés-Vega, M. D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, 2016).

Perbedaan penelitian Morgado, dkk dengan artikel penelitian ini terletak pada metode dan lokus. Metode penelitian pada artikel ini terletak pada telaah literatur, sedangkan Morgado, dkk pada metode biografi-naratif. Lokus penelitian pada Morgado, dkk ada di University of Seville, Spanyol, sedangkan penelitian ini ada dalam konteks Indonesia. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Morgado, dkk terletak pada inti penelitian yaitu tentang kampus inklusi yang menjadi kebutuhan mendesak pada sistem pendidikan.

Penelitian kedua tentang kampus inklusi dilakukan oleh Muyor-Rodríguez, et al di tahun 2021. Mereka mengungkapkan kurangnya kesesuaian antara hak-hak pendidikan difabel dengan keragaman karakteristiknya dengan ketersediaan sumber daya yang dialokasikan untuk mereka (Muyor-Rodríguez et al., 2021). Kesimpulan menunjukkan kebutuhan untuk membangun strategi kelembagaan interseksi berdasarkan keragaman sebagai hal yang esensial dalam pengembangan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Lokus penelitian ini dilakukan di Indonesia. Selain lokus, penelitian yang dilakukan Muyor-Rodríguez, et al, memiliki perbedaan lain, yaitu temuan penelitian. Mereka menemukan kelembagaan interseksi dalam dasar keragaman untuk mengidentifikasi tantangan kampus inklusi, sedangkan penelitian ini mencoba mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi kampus inklusi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah dan *stakeholder* lain seperti perguruan tinggi untuk dapat memastikan kampus inklusi untuk difabel dapat diimplementasikan dengan baik.



## Metode

Penelitian ini menggunakan metode telaah literatur (*literature review*) dengan pencarian pada database Proquest. Peneliti melakukan pencarian dengan meninjau istilah umum dan istilah khusus. Istilah pencarian yang dipakai adalah sebagai berikut: pendidikan inklusi, perguruan tinggi, disabilitas, difabel. Ada sepuluh jurnal yang memenuhi kriteria sebagai tinjauan literatur. Adapun kriteria jurnal yang dianalisis adalah: pertama, artikel tentang pendidikan inklusi di perguruan tinggi. Kedua, artikel yang terpublikasi tahun 2020-2021. Identifikasi artikel dilakukan dengan menyesuaikan abstrak dengan telaah literatur. Kemudian artikel yang utuh diidentifikasi dengan menggali informasi yang relevan sesuai tujuan telaah literatur. Setelah melalui tahapan tersebut, peneliti akan mengorganisir substansi tantangan kampus inklusi dari masing-masing referensi.

## Hasil dan pembahasan

Telaah literatur mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kampus inklusi. Sebanyak 10 artikel ditemukan sesuai dengan topik pembahasan yang ditentukan oleh penulis (Tabel 1).

Tabel 1. Studi tentang Kampus inklusi

No.	Penulis	Tahun	Desain penelitian/artikel	Tantangan	Rincian dari Tantangan
1	Perez-Jorge, D., et.al.	2021	Survei	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fasilitas</li> <li>✓ SDM (staf)</li> <li>✓ Kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ruang khusus bagi kaum difabel</li> <li>✓ pelatihan bagi dosen/staf tentang kampus inklusi</li> <li>✓ anggaran/pendanaan dari universitas</li> </ul>
2	Kamanzi, C.P., et.al.	2021	<i>Systematic review</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SDM (individu PD)</li> <li>✓ Kebijakan</li> <li>✓ Kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ seleksi mahasiswa: kondisi sosial, jenis disabilitas</li> <li>✓ anggaran/pendanaan dari pemerintah</li> <li>✓ anggaran/pendanaan dari universitas</li> </ul>
3	Butler, J.W.	2021	Survei	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sikap Masyarakat</li> <li>✓ Kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pandangan negatif masyarakat menganggap PD tidak mampu</li> <li>✓ PD dipandang dapat mengganggu normalitas sistim di kampus</li> <li>✓ Melibatkan peran PD dalam kegiatan akademis</li> </ul>
4	Harrington, E.E., et.al.	2021	Studi fenomenologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SDM (Individu PD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengalami kesulitan dalam proses akademik</li> </ul>

				✓ Sikap Masyarakat	✓ dukungan emosional, dukungan material
				✓ Kebijakan	✓ fleksibilitas penjadwalan dalam studi
				✓ SDM (Individu PD)	✓ membutuhkan strategi dalam mengikuti proses pembelajaran di kampus
5	McArthur, J.	2021	<i>Literature review</i>	✓ Fasilitas	✓ ruang fisik yang dapat diakses bagi
6	Glicksman, S.	2020	<i>Report article</i>	✓ SDM (staf dan pemangku kebijakan)	✓ Peningkatan kemampuan dalam pendidikan untuk PD
7	Wilcox, G., et.al.	2021	<i>Literature review</i>	✓ Sikap Masyarakat	✓ Stigma 'bodoh' pada PD ✓ Dukungan dari keluarga/masyarakat
8	Poole, A.H., et.al.	2021	Studi dokumenter	✓ SDM (staf dan mahasiswa)	✓ Melibatkan semua komponen SDM dalam pendidikan inklusi
				✓ Fasilitas	✓ Kurikulum, seleksi mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, administrasi
				✓ Fasilitas	✓ pra-profesional, pendidikan tingkat master dan doktoral, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir awal
9	Thompson, S.	2021	<i>Commentary article</i>	✓ Kebijakan	✓ Kolaborasi antara pemangku kepentingan universitas dan mahasiswa
				✓ Fasilitas	✓ kurikulum, institusi, prosedur, praktik, serta cara berpikir dan bertindak standar

				✓ Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konsep tentang diversifikasi kebutuhan PD, mengembangkan pendekatan pedagogi dan evaluasi inklusif</li> <li>✓ rekrutmen pengajar inklusif</li> </ul>
				✓ SDM staf	
10	Martinez-Hernandez, A. & Belles-Fortuno, B.	2021	Studi eksperimental	✓ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Metode-metode pembelajaran yang mendukung seperti kursus bahasa dan sistem penilaiannya, untuk mahasiswa tunanetra</li> </ul>

Berbagai tantangan yang ditelaah dari sepuluh jurnal dalam tabel 1 adalah: sikap masyarakat, kebijakan, sumber daya manusia, serta fasilitas. Tantangan pertama adalah sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas (Muhibbin & Hendriani, 2021). Penyandang disabilitas (PD) atau berkebutuhan khusus seringkali dipandang sebagai “anak bermasalah” sehingga dipandang tidak mampu belajar, berbeda dari yang lain, membutuhkan guru khusus dan lingkungan tersendiri. Tampilan ini memengaruhi kinerja semua komponen yang ada (Lolyta, 2016). Ada standarisasi cita-cita yang ditetapkan dalam masyarakat, sehingga ketika ada orang yang tidak memenuhi prasyarat atas cita-cita itu, seperti adanya kecacatan, maka akan diragukan kemampuannya untuk berhasil. Kehadiran kaum marginal di dunia akademis dianggap mengancam dan mengganggu normativitas dengan menantang pendidikan biner yang sifatnya elitis (Wren Butler, 2021).

Sikap masyarakat tentang penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada masyarakat umum saja, namun juga dimiliki oleh masyarakat kampus, yang sebenarnya diharapkan menjadi tempat pemenuhan hak-hak pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Masyarakat kampus dan masyarakat secara umum masih menunjukkan arogansinya terhadap kalangan disabilitas yang akan mengembangkan kualitas dirinya untuk layak bersaing dalam pasar kerja dan berkontribusi terhadap masyarakat. Masyarakat masih menilai bahwa prasyarat mutlak harus dimiliki untuk mewujudkan visi hidup ‘secara optimal’ adalah dengan memiliki kesempurnaan tubuh/indera. Beberapa warga kampus masih ada yang menganggap kehadiran kaum difabel di lingkungan perguruan tinggi justru berpotensi mengganggu tatanan norma masyarakat tentang tenaga kerja/endid yang berkualitas, sebagaimana yang ditemukan (Wren Butler, 2021). Mahasiswa dengan disabilitas intelektual, setelah menuntaskan semacam pelatihan non-degree di universitas dan diharapkan berkontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan sukarela, serta mendapat pengalaman dan hubungan komunitas yang bermakna, namun kenyataannya setelah lulus, 71% nya tetap menganggur dan tidak bisa bekerja. Disabilitas intelektual yang telah tergabung dalam pelatihan non-degree di universitas masih mendapat stigma bodoh (Wilcox et al., 2021).

Glicksman (2020) menemukan, diskriminasi juga terjadi di kalangan pemangku kebijakan universitas, dimana terjadi kasus penolakan pihak kampus untuk membiarkan kalangan difabel menggunakan fasilitas asrama mahasiswa ketika sedang mengikuti program pendidikan non-

gelar karena dianggap bukan menjadi bagian dari civitas akademik. Tidak heran jika banyak mahasiswa difabel mendapat implikasi seperti mengalami stigmatisasi sebagai kalangan ‘bodoh’ serta kesulitan mengoptimalkan pencapaian akademis dan aktualisasi kecakapannya ketika memasuki dunia kerja segera setelah mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi (Harrington et al., 2021; Wilcox et al., 2021). Hanya sedikit dari kaum difabel yang diterima di perguruan tinggi untuk dihargai secara endid dan bermanfaat di pasar tenaga kerja (Kamanzi et al., 2021).

Menurut Honneth, setidaknya perlu dibangun kesadaran bahwa kaum difabel adalah bagian dari struktur anggota masyarakat. Oleh karena kesetaraan itu, kaum difabel akhirnya dapat melaksanakan haknya dalam berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dan juga peningkatan derajat hidupnya melalui pendidikan sejalan dengan hak untuk menentukan arah hidup yang mereka kehendaki (McArthur, 2021; Poole et al., 2021; Wilcox et al., 2021). Masyarakat perlu dilibatkan sebagai endi yang memberi dukungan terhadap penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan pendidikan. Selanjutnya, komponen perguruan tinggi seperti pimpinan, dosen, hingga staf kependidikan perlu mendapat literasi atau pembudayaan atas pelayanan pendidikan terhadap kalangan difabel di tingkat perguruan tinggi (Wren Butler, 2021).

Tantangan kedua adalah adanya kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Berbagai kebijakan dalam mendukung kampus inklusi diantaranya adalah kebijakan dari sisi anggaran, kebijakan dalam pemenuhan sarana, prasarana serta sumber daya manusia serta kebijakan dalam menyelenggarakan kampus inklusi. Pengembangan kampus inklusi yang komprehensif, menurut Thompson, et.al. (2021) memerlukan sebuah kolaborasi. Pendanaan untuk peningkatan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur bagi mahasiswa difabel, masih dianggap bahwa universitas sebagai satu-satunya pihak yang dituntut untuk menunjukkan komitmennya terhadap konsep kampus inklusi lewat kebijakan pendanaannya. Pada kenyataannya, pemerintah juga memegang peran penting dalam mendorong penerapan kampus inklusi melalui intensifikasi pendanaan untuk perguruan tinggi (Kamanzi et al., 2021; Pérez-Jorge et al., 2021). Pendanaan pemerintah terhadap fasilitas kaum difabel merupakan langkah awal untuk menghilangkan segregasi sosial di tingkat perguruan tinggi. Peningkatan pendanaan dari perguruan tinggi untuk fasilitas infrastruktur maupun suprastruktur adalah bentuk komitmen sosial dari perguruan tinggi (Pérez-Jorge et al., 2021). Pendidikan tinggi diakui sebagai alat untuk pengembangan individu, kesejahteraan sosial dan kohesi sosial atas keragaman kemampuan fisik; karena itu kebijakan yang ditetapkan dalam perguruan tinggi juga berpengaruh dalam hal ini, seperti kebijakan pendanaan fasilitas kaum difabel (Kamanzi et al., 2021).

Pemerintah juga memiliki tugas untuk melindungi dan memenuhi hak bagi seluruh warga negara dalam suatu negara tidak terkecuali penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan baik tingkat internasional, nasional maupun daerah dapat digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk memastikan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Kebijakan nasional dan daerah merujuk pada kebijakan internasional (The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., 2007). Perwujudan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan sosial, termasuk di bidang pendidikan, harus dilakukan dengan komitmen penuh terhadap prinsip perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan pendidikan inklusif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan berikutnya dalam melaksanakan pendidikan inklusi (Muhibbin & Hendriani, 2021). Sumber daya manusia ini meliputi staf

Universitas, pembuat kebijakan dan penyandang disabilitas itu sendiri. Ketimpangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kehadiran di sekolah bagi penyandang disabilitas merupakan masalah bagi bangsa kita. Jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tentunya di kemudian hari akan sangat sulit bagi mereka untuk mandiri dan mencari pekerjaan. Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan hanya 56% anak penyandang disabilitas yang tamat SD dan hampir 3 dari 10 penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah. Menurut statistik sektor pendidikan tahun 2018, proporsi penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah hanya 5,48%. Penyandang disabilitas yang belum atau belum bersekolah mencapai 23,91%. Sementara itu, 70,62% penyandang disabilitas tidak lagi bersekolah. Semakin tua kelompok usia, semakin rendah angka partisipasi (APS). PSA tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 91,12%. Sedangkan PSA penyandang disabilitas terendah pada kelompok usia 19-24 tahun, yaitu sebesar 12,96%. Hal ini mencerminkan fakta bahwa jumlah penyandang disabilitas yang kuliah sangat rendah. Padahal, undang-undang nomor 8 tahun 2016 (Sapuro, 2016) telah mengatur bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi penyandang disabilitas dari semua latar belakang, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya (Nurita, 2021).

Penerapan kebijakan kampus inklusi mewujudkan rasa memiliki di kalangan kaum difabel atas dunia akademis. Proyek keadilan sosial seperti pendidikan terhadap kaum difabel harus merekrut seluruh komponen institusi, seperti staf dan mahasiswa, juga masyarakat secara umum. Mengutip apa yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa instrumen hukum, seperti kebijakan universitas, harus dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mencapai keseimbangan sosial bagi konstituenya, termasuk yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung (Pratomo et al., 2015). Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan John Rawls, penyandang disabilitas sebagai entitas harus diberikan layanan khusus untuk menyeimbangkan posisinya dengan entitas lain di perguruan tinggi.

Adapun kegiatan yang bisa diadakan sebagai bagian dari kampus inklusi, misalnya pertimbangan kurikulum, perekrutan mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, hingga administrasi. Intervensi bermanfaat lainnya termasuk program pra-profesional, pengadaan pendidikan tingkat master dan doktoral, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir awal yang diselenggarakan fakultas bagi mahasiswa difabel (Poole et al., 2021).

Harrington et.al. (2021) menjelaskan bahwa, mahasiswa difabel pada dasarnya membutuhkan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas agenda kampus yang menyesuaikan kemampuan tubuh mereka dalam rangka mengoptimalkan pengalaman pendidikannya di perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi dapat mewujudkannya tidak hanya dengan mengadakan ruang/infrastruktur yang dibutuhkan mahasiswa difabel, namun lebih dari itu, juga perlu dilakukan di tingkat suprastruktur, seperti dengan melakukan perombakan terhadap kurikulum, sistem perekrutan mahasiswa, pemrograman kuliah, layanan kemahasiswaan, keorganisasian mahasiswa, hingga administrasi yang sifatnya ramah terhadap kalangan difabel. Hal ini termasuk upaya memunculkan program pengembangan diri yang dikhususkan bagi mahasiswa difabel untuk kebutuhan profesional setelah lulus dari kampus. Reformasi semacam itu diharapkan berdampak pada pemahaman atas diversitas kondisi fisik di

kalangan civitas akademik. Di samping mendorong keberhasilan akademik di kalangan mahasiswa difabel, hal semacam ini mampu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk merasa didengar dan didukung, sehingga menumbuhkan ‘rasa memiliki’ di kalangan mahasiswa difabel. Penyandang disabilitas tidak lagi dieksklusi dari kegiatan civitas akademik yang normal (Glicksman, 2020; Pérez-Jorge et al., 2021; Poole et al., 2021; Thompson, 2021; Wren Butler, 2021).

Hal yang perlu ditingkatkan untuk kampus inklusi adalah pelatihan bagi dosen/staf tentang budaya kampus inklusi (Pérez-Jorge et al., 2021). Penyandang disabilitas di perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam peningkatan derajat, retensi, dan tingkat kelulusan. Mahasiswa, dalam studinya, membutuhkan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas penjadwalan. Beberapa hambatan dialami untuk berhasil mencapai tujuan akademis dan menerapkan strategi belajar yang dipilihnya (Harrington et al., 2021). Permasalahan terkait akses pendidikan tinggi adalah kurangnya informasi kepada sekolah, guru dan orang tua tentang hak akses pendidikan tinggi bagi siswa penyandang disabilitas. Masalah lainnya adalah kurangnya informasi dan motivasi penyandang disabilitas, sehingga minat untuk memajukan sekolah ke jenjang perguruan tinggi masih rendah (Andayani & Afandi, 2019).

Pemangku kepentingan universitas dan mahasiswa harus berkolaborasi dalam mewujudkan kampus inklusi. Inklusivitas tidak hanya dapat meningkatkan keberhasilan akademik tetapi juga dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk merasa didengar dan didukung. Menurut The UK Development Studies Association dekolonisasi kurikulum saja tidak cukup untuk menuju kampus inklusi. Banyak yang harus direformasi, diantaranya adalah institusi, prosedur, praktik, serta cara berpikir dan bertindak standar. Untuk mengejar konsep kampus inklusi, universitas dapat menyelenggarakan rekrutmen pengajar inklusif, mendekolonisasi kurikulum, atau mengembangkan pendekatan pedagogi dan evaluasi inklusif. Selain mengajar, keberhasilan inisiatif ini akan diinformasikan dan tergantung pada komitmen, visi, dan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkannya (Thompson, 2021).

Karakter proaktif komponen perguruan tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah difabel adalah harapan dalam mewujudkan kampus inklusi. Salah satu contoh karakter proaktif dicontohkan dalam proyek yang diinisiasi Martinez-Hernandez & Belles-Fortuno (2021). Martinez-Hernandez & Belles-Fortuno menyusun sebuah strategi pengajaran berbasis *text-to-speech* yang dinilai lebih mudah bagi kalangan difabel untuk menyerap materi pengajaran dibandingkan dengan fasilitas materi berhuruf braille. Hal ini dapat menjadi gambaran bagaimana subjek pengajar dalam perguruan tinggi mesti berinovasi atas kebutuhan mahasiswa difabel yang menjadi tolak ukur dalam berkomitmen menerapkan konsep kampus inklusi.

Fasilitas yang tersedia serta mudah diakses oleh penyandang disabilitas juga merupakan salah satu tantangan dalam melaksanakan Pendidikan inklusi (Muhibbin & Hendriani, 2021). Hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah penyempurnaan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel. Aksesibilitas layanan kampus semestinya bukan hanya sekedar ditujukan untuk memenuhi prasyarat formal sebuah perguruan tinggi dalam menerapkan konsep kampus inklusi. Kampus inklusi dibangun atas dasar pemahaman atas prinsip keadilan bagi setiap civitas akademik serta hambatan yang dirasakan mahasiswa difabel (McArthur, 2021; Thompson, 2021). Akses yang sama bagi siswa penyandang disabilitas merupakan ekspresi dari prinsip inklusi. Penekanan pada aksesibilitas fasilitas umum seperti tempat parkir, pintu, tangga, lift, jalan setapak, furnitur, telepon, wastafel, toilet, landai, rambu dan petunjuk arah (Jefri, 2016). Kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tidak hanya tentang fasilitas

penunjang di luar kampus, mahasiswa disabilitas juga membutuhkan ruang kelas yang mudah diakses. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa tunanetra tersebut, tata ruang kelas harus ditata, termasuk penataan meja dan kursi, papan tulis, pintu, laci dan benda tajam di dalam kelas (Ro'fah et al., 2010). Bentuk kampus inklusi yang diterapkan umumnya adalah dengan menyediakan ruang khusus bagi kaum difabel (Pérez-Jorge et al., 2021). pemenuhan ruang fisik yang dapat diakses bagi kaum difabel, bukan karena persyaratan formalitas saja, tetapi karena upaya mempromosikan keadilan dalam universitas (McArthur, 2021).

Institusi pendidikan harus memiliki standar yang jelas untuk aksesibilitas dalam hal teknologi. Lembaga memfasilitasi akses sumber daya dan layanan teknologi informasi bagi seluruh sivitas akademika lebih khusus bagi mahasiswa. Inisiatif ini dibangun di atas keyakinan bahwa aksesibilitas teknologi adalah tanggung jawab seluruh kampus, dan akses teknologi harus menawarkan fungsionalitas yang sebanding, keterjangkauan, dan ketepatan waktu, Ketersediaan teknologi ini memastikan mahasiswa dapat mengakses semua sumber daya pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran (Shaewitz & Crandall, 2020).

## Simpulan

Berdasarkan telaah literatur pada sepuluh jurnal yang digunakan dalam studi ini dan data sekunder yang ada menunjukkan bahwa kesempatan mendapatkan Pendidikan bagi difabel masih menjadi tantangan besar karena belum semua pihak tahu, mau dan mampu untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi termasuk pendidikan di perguruan tinggi dengan mewujudkan kampus yang inklusi. Berbagai kebijakan yang menghormati dan melindungi difabel belum mampu memastikan terpenuhinya hak pendidikan difabel dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan antara lain pandangan masyarakat dan diskriminasi, intervensi pemangku kebijakan, manajemen pembelajaran dan sumber daya manusia, serta asesabilitas layanan di kampus yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan diamanatkan dalam kebijakan. Strategi-strategi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan terselenggaranya pendidikan inklusi bagi para penyandang disabilitas termasuk di perguruan tinggi dengan mewujudkan kampus inklusi bagi para difabel. Rekomendasi terkait kebijakan perlu disuarakan seluas mungkin pada para pemangku kepentingan khususnya pada penyelenggara tinggi. Implementasi pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi dapat diwajibkan dengan memasukkan kewajiban pelaksanaan Pendidikan inklusi melalui pemberlakuan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi. Kewajiban pemberlakuan pelaksanaan Pendidikan inklusi ini diharapkan menjadi dasar penentuan kebijakan di masing-masing perguruan tinggi yang akan meningkatkan reputasi perguruan tinggi, khususnya memastikan perguruan tinggi dapat memberikan dukungan emosional, dukungan material, dan fleksibilitas proses pelaksanaan pendidikan pada difabel.

## Referensi

- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 153. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178>
- Glicksman, S. (2020). The Makor College experience: Successes and challenges in the first years of a college experience program for individuals with intellectual disability. *Int J Child Health Hum Dev*, 13(4), 341–346.

- Harrington, E. E., Santos, G. O., & Potvin, M.-C. (2021). Postsecondary Education Students with Disabilities' Perceptions of Occupational Therapy-Led Coaching. *The Open Journal of Occupational Therapy*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/10.15453/2168-6408.1790>
- Isrowiyanti. (2013). Mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Ramah Difabel. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 34(1), 47–60.
- Kamanzi, P. C., Goastellec, G., & Pelletier, L. (2021). Mass University and Social Inclusion: The Paradoxical Effect of Public Policies. *Social Inclusion*, 9(3), 32–43. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4165>
- Kanter, A. S. (2011). The law: What's disability studies got to do with it or an introduction to disability legal studies. *Columbia Human Rights Law Review*, 42(2), 403–479.
- Karellou, J. (2019). Enabling disability in higher education. A literature Review. *Journal of Disability Studies*, 5(2), 47–54.
- Lolytasari. (2016). Penerapan Rumah Difabel dalam Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. 3(May), 0-12. <http://doi.org/10.13140/RG.2.1.1707.0967>
- Martínez-Hernández, A.-I., & Bellés-Fortuño, B. (2021). Accommodating the Syllabus to Visually Impaired Students in the English Language Classroom. *International Journal of English Studies*, 21(1), 75–92. <https://doi.org/10.6018/ijes.438891>
- McArthur, J. (2021). The Inclusive University: A Critical Theory Perspective Using a Recognition-Based Approach. *Social Inclusion*, 9(3), 6–15. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4122>
- Morgado, B., Cortés-Vega, M. D., López-Gavira, R., Álvarez, E., & Moriña, A. (2016). Inclusive Education in Higher Education? *Journal of Research in Special Educational Needs*, 16, 639–642. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12323>
- Moriña, A. (2017). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities. *European Journal of Special Needs Education*, 32(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254964>
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92–102.
- Pérez-Jorge, D., Ariño-Mateo, E., González-Contreras, A. I., & del Carmen Rodríguez-Jiménez, M. (2021). Evaluation of Diversity Programs in Higher Education Training Contexts in Spain. *Education Sciences*, 11(5), 226. <https://doi.org/10.3390/educsci11050226>
- Poole, A. H., Agosto, D., Greenberg, J., Lin, X., & Yan, E. (2021). Where Do We Stand? Diversity, Equity, Inclusion, and Social Justice in North American Library and Information Science Education. *Journal of Education for Library and Information Science*, 62(3), 258–286. <https://doi.org/10.3138/jelis.2020-0018>
- Pratomo, D. T., Sudarsono, & Fadli, M. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontalo. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–27.
- Ro'fah, Andayani, & Muhrisun. (2010). *Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran Dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*. Pusat Study dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga.
- Nurita, D. (2021). *Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif*. <https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif/full&view=ok>
- Sapuro, J. T. (2016). Republik Indonesia. 2016. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. *Euphytica*, 18(2), 22280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2009.07.006> <http://dx.doi.org/10.1016/j.neps.2015.06.001> <https://www.abebooks.com/Trease-Evans-Pharmacognosy-13th-Edition-William/14174467122/bd>
- Shaewitz, D., & Crandall, J. R. (2020). *Higher Education's Challenge: Disability Inclusion on Campus*. <https://www.higheredtoday.org/2020/10/19/higher-educations-challenge-disability-inclusion-campus/>



- Thompson, S. (2021). The Need and Desire for Inclusive Universities: A Perspective from Development Studies. *Social Inclusion*, 9(3), 27–31. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4096>
- The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol to the Convention., (2007).
- Victoria, S., Watkins, A., & Ebersold, S. (2017). 2017 *Inclusive Education for Learners with Disabilities*. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596807/IPOL\\_STU\(2017\)596807\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596807/IPOL_STU(2017)596807_EN.pdf)
- Wilcox, G., Fernandez Conde, C., & Kowbel, A. (2021). Using Evidence-Based Practice and Data-Based Decision Making in Inclusive Education. *Education Sciences*, 11(3), 129. <https://doi.org/10.3390/educsci11030129>
- Wisbey, M. E., & Kalivoda, Karen. S. (2016). College students with disabilities. In M. J. Cuyjet, M. Howard-Hamilton, & D. L. Cooper (Eds.), *Multiculturalism on Campus: Theory, Models, and Practices for Understanding Diversity and Creating Inclusion* (pp. 328–349). Stylus Publishing.
- Wren Butler, J. (2021). Legibility Zones: An Empirically-Informed Framework for Considering Unbelonging and Exclusion in Contemporary English Academia. *Social Inclusion*, 9(3), 16–26. <https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4074>
- Yusuf, M. (2015). Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Islamika*, 15(2), 163–172.

## Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan

Hatari Marwina Siagian<sup>a,1\*</sup>, Rosmawaty Harahap<sup>b,2</sup>, Elly Prihasti Wuriyani<sup>c,3</sup>, Mia Sanita Siagian<sup>d,4</sup>, Wahyuni Siregar<sup>e,5</sup>

<sup>abcde</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>1</sup> [hatarimarwina25@gmail.com](mailto:hatarimarwina25@gmail.com)\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 11 Juni 2022;  
Revised: 14 Juni 2022;  
Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:  
Nilai Budaya;  
Perkawinan Semarga;  
Adat Batak Mandailing.

### Keywords:

Cultural Values;  
Marriage of the  
Surname;  
Batak Mandailing Custom.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai budaya pada larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Mandailing sehingga masyarakat luas lebih paham dan mengerti terkait dengan hukum adat Batak Mandailing. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati di lapangan. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, perekaman suara dan pencatatan serta menganalisis data yang telah didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat di Desa Alang Bonbon Kabupaten Asahan masih konsisten menjaga nilai-nilai budaya sesuai dengan adat yang masih berlaku. Hasil penelitian ditemukan bahwa nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada.

### ABSTRACT

**Analysis of Cultural Values on the Prohibition of Surname Marriage in the Batak Mandailing Custom in Asahan Regency.** The purpose of this study is to analyze the cultural value of the prohibition of surname marriage in the Batak Mandailing custom so that the wider community better understands and understands related to the Batak Mandailing customary law. This research uses qualitative research with a descriptive approach, which is the result in the form of written or spoken words from the behavior of people observed in the field. Researcher data collection using observation techniques, interviews, voice recording and recording and analyzing the data that has been obtained. The data analysis technique used in qualitative analysis has four stages, namely; data collection, data reduction, data presentation and the final step is the drawing of conclusions. From the results of observations made, religious leaders and community leaders in Alang Bonbon Village, Asahan Regency, are still consistently maintaining cultural values in accordance with the customs that are still in force. The results of the study found that the cultural values contained in the ban on surnames are to maintain good fraternal relations, namely relationships with large families, kinship relations and good relations between parna clan associations and avoiding division of existing clan groups.

Copyright © 2022 (Hatari Marwina Siagiana, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Siagian, H. M., Harahap, R., Wuriyani, E. P., Siagian, M. S., & Siregar, W. (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 68 -. Retrieved from <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/7056>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki budaya yang tinggi (Firmando, 2021). Banyak peninggalan kuno yang tak ternilai belum dieksplorasi dan ditemukan. peninggalan ini membuktikan tingkat peradaban negara Indonesia bukan hanya materi bangunan candi, prasasti, dekorasi rumah dan gudang tradisional beras, alat kehidupan sehari-hari. Selain itu, peninggalan lain berupa yang bernilai moral-spiritual. Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Budaya Indonesia berperan penting dalam membentuk perilaku bangsa Indonesia yang berakhlak mulia (Hidayat, 2020). Hal yang penting untuk disadari bahwa bangsa Indonesia mewarisi berbagai kekayaan alam, kekayaan hayati, dan kekayaan keanekaragaman sosio-kultural (Ida Bagus Brata, 2016). Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak adalah salah satu dari suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam golongan Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing. Batak juga ada yang beragama muslim dan kristen. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara.

Tradisi Adat Mandailing memiliki sanksi sosial bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga. Akibat dari pernikahan tersebut, mereka tidak diakui lagi masyarakat daerah tersebut, seperti dibuang atau dikucilkan. Sebagian dari kelompok masyarakat mengucilkan perbuatan pernikahan semarga. Problem utama dari pernikahan semarga, terletak pada perihal garis keturunan dari para leluhur masih memiliki hubungan kekeluargaan. Prinsip dasarnya, satu keluarga disyaratkan untuk tidak bisa menikah, terutama dalam garis keturunan langsung dan garis keturunan menyamping. Garis keturunan langsung bertitik pusat pada relasi orang tua dan anak, sesama anak, bahwa mereka tidak boleh menikah (*incest*). Hal ini karena ada larangan atau pantangan yang mesti dijaga, bahwa orangtua merawat anak dan bukan menikahinya. Begitu pula sesama saudara kandung tidak diijinkan untuk menikah, karena ada pertalian kekeluargaan yang masih kuat. Hubungan keluarga ke samping, demikian pula, masih dilarang untuk menikah, terutama menikah dengan saudara sepupu baik dari keturunan ayah maupun ibu (Pohan, 2018).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pernikahan semarga. Penelitian pertama yang ditemukan peneliti, adalah yang dilakukan oleh Pohan di tahun 2021. Pohan (2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Kemudian (Pandiangan, 2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sejak pertama kali laki-laki dan si wanita bertemu masing-masing tanya jawab tentang marga, sehingga menghindari jangan sampai terjadi hubungan yang berkesinambungan yang dilarang Adat. terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam adat suku Batak Toba yakni faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi (Adrianto, 2019).

Faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu karena adanya hubungan darah, dapat merusak tata cara tutur/sopan santun, adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur (Wahyuni et al., 2018). Dari kajian literatur yang telah peneliti lakukan dari berapa penelitian, seluruhnya menjelaskan terkait dengan hukum dan alasan dan faktor mengapa perkawinan semarga dilarang oleh adat Batak Mandailing, namun belum mengkaji terkait Nilai-nilai dan

makna yang terkandung di dalam larangan tersebut, hal ini yang menjadi celah bagi peneliti untuk melakukan riset lebih dalam terkait dengan peralangan perkawinan semarga di dalam adat Batak Mandailing.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ali Hamzah di tahun 2021 dengan judul “Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing (Studi Kasus: di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.” Penelitian ini memiliki kesamaan pada inti penelitian yaitu tentang perkawinan semarga. Perbedaannya dengan artikel penelitian ini terletak di lokus, penelitian ini berfokus di Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Sedangkan lokus penelitian Ali ada di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, pendekatan yang dilakukan Ali menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini lebih pada pendekatan nilai-nilai budaya, khususnya nilai hukum adat. Penelitian ini, dari beberapa penelitian sebelumnya, dengan demikian, masih memiliki nilai kebaruan yang masih relevan untuk diteliti baik dari aspek inti penelitian, metode, dan lokus penelitiannya.

Lebih rinci dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan menurut hukum adat Batak Mandailing, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga dapat disebut dengan pernikahan Ibotonya (saudara kandung). Pernikahan keluarga berarti pernikahan laki-laki dengan Wanita pada keluarga yang sama. Misalnya, keluarga Siregar menikah dengan Siregar, Harahap dan Harahap, Siagian dengan Siagian, Hasibuan dengan Hasibuan, dan sejenisnya. Pernikahan tersebut memang dianggap pelanggaran serius, adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang tumbuh di tengah Sebuah masyarakat yang mewakili keturunan pernikahan Anak seperti itu akan lahir Tidak lengkap, bodoh, dan bahkan mungkin lumpuh. Dalam kasus ekstrim, sanksi sosial bagi mereka yang telah menyelesaikan pernikahan keluarga akan dilarang, tidak diakui seperti itu di keluarga Bagian dari hukum adat Sampai suatu hari nanti.

Suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya. Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang masih terdapat pernikahan satu marga dalam suku batak mandailing khususnya didaerah perkotaan.namun tidak jauh berbeda di daerah perdesaan yang Sebagian masih terdapat melaksanakan pernikahan satu marga. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pernikahan semarga di daerah desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini ialah untuk mengungkap nilai dan makna dari Larangan Pernikahan Semarga dalam adat Batak Mandailing sehingga masyarakat luas lebih paham dan mengerti terkait dengan hukum adat Batak Mandailing

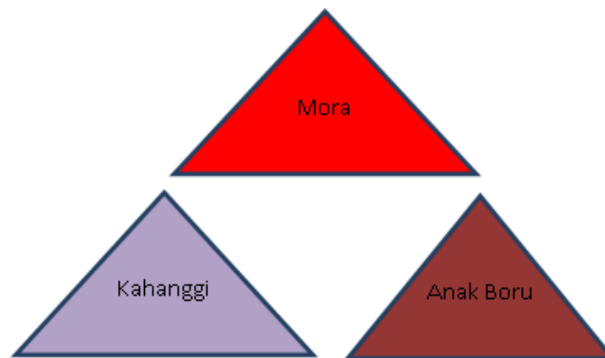
## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan hasil penelitiannya tidak menggunakan Skor pada bagian hasil penelitian, penelitian hanya menggunakan penjelasan data dengan apa adanya yang didapat dari hasil lapangan. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak (Fadli, 2021). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati di lapangan. Maka hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan tidak menggunakan angka tanpa adanya poroses manipulasi hasil data yang yang ditemukan dilapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Prasanti, n.d.). Penelitian dilakukan di Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, perekaman suara dan pencatatan serta menganalisis data yang telah didapatkan. Penelitian diskriptif tidak mengisolasi strategi *human relation* ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan (Gultom & Atnan, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### Hasil dan pembahasan

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berkali-kali dengan penggunaan yang sama. Kebiasaan dapat dilakukan berkali-kali sampai sekelompok orang melestarikannya. Dengan tradisi ini dikaitkan dengan bahasa latin “tradere” yang artinya melindungi dari generasi penerus. Jika adat atau tradisi tersebut diakui baik bagi masyarakat Batak dan dilakukan tanpa henti, maka gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan adat atau tradisi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi atau hukum.



Gambar 1. Lambang Markoum Marsolkot

Struktur masyarakat Mandailing dikenal sebagai struktur Markoum Marsisolkot. Secara etimologi berarti "tungku tiga". Tungku tiga seperti di dapur dimana di panci diletakkan di atas api saat memasak. Ketiga tungku tersebut tidak mungkin karena perlu ditempatkan secara setara dan seimbang. Periknya jatuh. Keberadaan tiga tungku yang sama menunjukkan ini Gelar Mandailing sama, tapi yang membedakan adalah pekerjaannya. Markoum Marsisolkot adalah lambang dari semua kekuatan peradaban Batak Mandailing. Itu ada dan merupakan sumber dari semua peraturan khusus negara yang ada. itu adalah Arti dari ketiga tungku tersebut adalah Kahangi, Anakboru, dan Mora. (Armin Siregar, 2016).

Kahangi adalah barisan orang yang semarga atau sepewarisan, unsur dari kahangi ini termasuk juga, saama saina, marangka marangi, saama saompu, saparamaan, saparompuan, sabonasaha turunan. Kemudian kahangi parabean yaitu kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri kahangi. Kahangi dan kahangi parabean di dalam siding adat berada dalam satu kelompok. Menurut adat istiadat sesama kahangi tidak dibenarkan untuk kawin walaupun kahangi jauh. Namun belakangan ini, *dongan samarga* yang ditabukan untuk dinikahkan sudah banyak yang melanggarnya. Dimana sudah banyak Nasution mengambil boru Nasution, Lubis mengambil boru Lubis, dan di daerah lainpun sudah banyak yang ikut-ikutan.

---

Anak Boru adalah kelompok kerabat yang mengambil istri dari mora atau orang yang bermarga lain dari kita yang merupakan kelompok yang menikahi anak gadis kita atau semua famili pihak suami saudara kita perempuan, anak boru ini harus hormat kepada moranya, walaupun di dalam kedudukan pekerjaan atau jabatan anak boru lebih tinggi, akan tetapi dia harus hormat dan patuh kepada semua permintaan moranya. Tugas-tugas anak boru adalah sebagai pekerja di dalam satu peradatan dan harus menyenangkan hati pihak moranya. Dari pihak anak boru ini juga diangkat salah satu kepala dari kumpulan anak boru dan dinamakan orang kayo atau bendahara. Orang kayo ini merupakan pimpinan dari semua anak boru yang ada, serta mengatur semua tugas-tugas anak boru yang sudah dibebankan kepadanya. Tugas-tugas anak boru sangat banyak dan berat, oleh karena itu pihak mora harus pula pandai-pandai mengambil hati anak borunya, agar mereka jangan sampai mengadakan unjuk rasa atau pemogokan. Kalau hal ini terjadi maka ada harapan semua pekerjaan akan mengalami kegagalan total (Pohan, 2021; Pandiangan, 2016).

Mora adalah kelompok yang boru nya diambil oleh pihak anak boru atau kelompok orang-orang tempat kita mengambil boru atau istri, atau semua famili pihak saudara ibu ataupun keluarga menantu kita perempuan. Pihak mora sangat sayang kepada pihak anak borunya, demikian pula sebaliknya. Mora ni mora disebut juga hula-hula, artinya mora dari mora. Kemungkinan besar mora dari mora ini semarga dengan pisang raut dan memiliki dua jalinan kekerabatan yaitu sebagai mora dan sebagai kahanggi. Boru atau anak-anak gadis dari mora disebut boru tulang halalango bagi anak laki-laki pisang raut. Anak gadis tersebut sebenarnya boru tulang akan tetapi setara pula dengan iboto, jadi bukan boru tulang sesungguhnya. Mora ni mora ini tidak mempunyai tugas khusus dalam satu horja yang diadakan. Mora ini ada pula dua macam: pertama, Mora yang anak gadisnya diambil oleh anak boru. Kedua, Mora pusaka ini berasal dari turunan dari turunan-turunan pengambilan terdahulu.

Kaitan antara Markoum Marsisolkot dengan pelarangan pernikahan, dalam pandangan antropologi historis, terletak pada relasi kuat dalam keluarga dekat. Relasi antara Kahangi, Anaboru, dan Mora adalah keluarga yang masing-masing menjadi bagian adat, dan ketiga menjaga tata relasi sosial kekeluargaan dengan hal ideal untuk tidak menikah satu dengan yang lainnya. Pernikahan semarga, dengan demikian berada di luar tradisi adat Markoum Marsisolkot, yang di antara mereka diminta untuk saling menghargai satu sama lain dan bentuk sikap tersebut tidak dengan jalan pernikahan. Bila terjadi pernikahan, maka relasi segitiga tersebut menjadi terganggu atau menimbulkan ketegangan satu dengan yang lain. Mora, idealnya menjadi figur yang sangat dihormati oleh Kahanggi dan Anakboru. Untuk itu, Mora diidealkan menjadi sebetuk penjaga norma adat, dan begitu juga peran tersebut ada secara eksplisit pada Kahanggi dan Anakboru.

Pernikahan merupakan suatu hubungan hukum dan sangat penting antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan sehingga mencegah terjadinya perzinahan. Dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah amanat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing. Menurut Gultom Rajamarpodang (2013:8) pernikahan adalah relasi sakral, bukan hanya untuk membentuk rumah tangga dan keluarga. orang Batak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, perpaduan esensi kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi satu. Akibatnya, para pemuka adat masyarakat Batak sering menasehati pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua, namun dalam pernikahan satu tambah satu adalah satu, yaitu dua

---

orang manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu dalam arti yang sama sebenarnya inti dari kehidupan.

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. marga “nama keluarga/ kerabat” adalah nama yang diberikan kepada seseorang dengan otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara patrilineal dari satu nenek moyang (Kafaabillah, 2018). Marga dalam masyarakat mandailing mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam suatu kegiatan. (Parapat et al., 2019). Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berperilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak. Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Kedua, pengakuan adanya perkawinan adat Batak yang bernama “tungkot” dan “imbang,” di mana anak-anak yang lahir memiliki hak pewarisan dari harta orang tuanya (Rismawati, 2011).

Pernikahan Batak merupakan amanat asli yang dilakukan untuk menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu yang berdasarkan atas Norma Agama yang dianut oleh orang Batak. Maka yang dianut orang Batak ialah pernikahan diluar margannya. Kemudian pernikahan satu marga tidak diizinkan dari beberapa sumber yang diperoleh peneliti tentang pernikahan Adat Batak dari sebagian Jurnal yang telah dipelajari peneliti. Untuk itu, pandangan tentang Hukum Adat Batak sesama marga parna adalah marga yang paling ditegaskan untuk melarang adanya pernikahan sesama marga, pernikahan tersebut tidak dapat diizinkan dalam parna sebagai berikut: pertama, *marboru namboru/nioli anak nitulang* artinya anak laki-laki tidak boleh menikah dengan boru ninambou biologis dan sebaliknya dengan wanita tidak boleh menikah dengan anak tulang. Kedua, *namarito* adalah sekelompok saudara kandung atau disebut sebagai orang yang semarga. Ketiga, *dua pungguan saparihotan* merupakan seorang pria sudah menikahi perempuan, saudara kandung pria tersebut tidak bolehkan menikah lagi dengan saudara pihak perempuan dan tidak dibolehkan bersaudara kandung mendapatkan mertua yang sama. Keempat, *pariban naso boi olion* artinya saudara kandung tidak dalam nama keluarga yang sama dengan anak perempuan dari marga ibu kita sendiri. Kelima, *namarpadan* merupakan amanat yang telah disetujui oleh marga tertentu yang merupakan anak mereka tidak bisa menjalankan proses pernikahan (Aprilianti & Kasmawati, 2019).

Pernikahan keluarga adalah pernikahan atas namariboto atau dianggap sebagai pernikahan kawin sedarah. Perkawinan semarga adalah perkawinan namariboto atau dianggap sebagai perkawinan sedarah (Sembiring, 2018) , Menurut komunitas Mandailing Pernikahan seorang pria dan seorang wanita dengan marga yang sama Itu tidak termasuk dalam kategori perkawinan marga. Pernikahan keluarga menurut masyarakat Mandailing, hal itu terjadi atas laki-laki bermarga siregar dan seorang wanita bermarga Siregar. Tetapi jika Anda memiliki pernikahan antara Siregar laki-laki dan Ritonga Wanita (Siregar dan Ritonga Terkait) tidak dinyatakan sebagai perkawinan semarga. Dengan kata lain, apa yang disebut pernikahan keluarga Pernikahan yang terjadi tetapi tidak dikatakan antara dua klan dari klan yang sama Pernikahan keluarga, jika ada pernikahan antara dua orang dari keluarga terkait (Wahyuni, Harahap, & Masalah, 2018).

Hukum adat yang benar ialah pernikahan seperti yang terdapat pada hukum pernikahan. Benarnya pernikahan secara adat bagi masyarakat hukum ada yang ada di Indonesia bagi penganut/pengikut agama tergantung pada masyarakat yang bertaut. Yang artinya apabila telah dilakukan norma hukum agamanya, maka dari itu pernikahan tersebut sudah benar atau sudah sah menurut hukum. Dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan” (Santoso, 2016).

Adapun sebab larangan pernikahan semarga yaitu sebagai berikut: pertama, larangan karena Satu Marga Maksud larangan karena satu marga adalah larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang memiliki marga sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda marga, tetapi telah pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan. Dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing, tidak boleh seorang pria menikah dengan wanita yang memiliki marga yang sama. Ia dilarang karena dianggap berasal dari keturunan yang sama.<sup>4</sup> Hal ini akan dibahas dalam markobar atau dikenal dengan ‘siding adat’ yang biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah menurut hukum Islam. Kedua, ada larangan karena Mereka Erturang (Bersaudara) Maksudnya, berdasarkan adat, mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan disebabkan *erturang* (bersaudara), seperemen, atau erturang impal. Ketiga, dilarang karena belum dewasa untuk mengukur kedewasaan seseorang, tidak mengenal batas usia yang pasti, tetapi ia berdasarkan pada kemampuan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kedewasaan laki-laki, ia diukur apabila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Sedangkan untuk perempuan, diukur setelah ia akil balig dan telah mengetahui adat (*meteh tutur*).

Pernikahan adat Batak yang menganut eksogami (pernikahan di luar golongan marga) sehingga masyarakat Batak sangat menghindari pernikahan sedarah, oleh karena itu pernikahan semarga (*namariboto*) adalah pernikahan sedarah sekandung. *Namariboto* adalah kelompok marga yang menghasilkan setiap marga dalam kelompok marga tersebut, juga dengan kerabat dan dianggap semarga. Misalnya, kelompok Simbolon terdiri dari marga Sitanggang dan lain-lain. Jadi, di antara marga ini, mereka memenuhi persyaratan pernikahan semarga.

Menurut analisis para peneliti, faktor penyebab terjadinya perkawinan antar kelompok satu marga dalam suku Batak adalah pendidikan, cinta, agama, ekonomi petualangan dan universal. Yang utama adalah pendidikan. Pendidikan termasuk dalam kelompok faktor penyebab terjadinya perkawinan antar kelompok satu marga dalam adat Batak, oleh karena itu perkembangan tingkat pendidikan masyarakat adat Batak menghadapi perubahan materil dalam pola pikir. Merekalah masyarakat adat yang masih menanggapi adanya alam gaib, yang mampu menyelidiki sesuai akal nya (Pasaribu et al., 2015)

Dahulu jika seorang pemuda pemudi yang semarga saling jatuh cinta dan ingin melakukan pernikahan maka ia akan menerima penolakan dari orang tua, keluarga, kumpulan marganya dan seluruh warga kampungnya serta kepala adatnya dan mereka yang menolak tersebut akan berusaha untuk memisahkan pemuda pemudi tersebut agar tidak terjadi pernikahan antar kelompok semarga. Ketika perkawinan marga tetap dilaksanakan, ada dua akibat yang berlaku. Pertama, mereka dikucilkan dari kehidupan sosial. Biasanya pasangan akan merantau ke daerah



lain setelah menikah. Kedua, pernikahan mereka berlangsung secara resmi (mengikuti ketentuan adat yang berlaku) dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat.

Di masa lalu, masalah pernikahan semarga sangat ketat, bahwa aturan menjadi suatu yang tidak ada tawar menawar, bila terjadi pernikahan semarga, sanksinya mereka dibuang dan dikucilkan. Di era modern, mereka tetap diakui pernikahannya, namun dengan sejumlah ritual yang lebih tradisional dalam pernikahan mereka. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pergeseran pandangan tentang perkawinan keluarga di Desa Alang Bonbon disebabkan sebagian masyarakat masih tampak memegang teguh ketentuan adat, dan sebagian lagi belum menjalankan prinsip adat perkawinan dengan pertimbangan agama (Pandiangan, 2016; Gultom, Munir, & Ariani, 2019).

Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alang Bonbon masih konsisten dengan adat, sehingga ketika terjadi pelanggaran adat, seperti dalam kasus perkawinan keluarga misalnya, tetap harus diselesaikan secara adat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa ketika terjadi perkawinan marga, adat juga menawarkan alternatif solusi dan berbagai persyaratan. Untuk menebus proses adat ini, mereka yang melanggar (terus menikah dalam keluarga yang sama) diharuskan membayar sanksi adat. Sanksi adat pada umumnya adalah menyembelih kerbau dan berpindah marga (bagi perempuan). Setelah membayar sanksi adat kepada calon mertua berupa penyembelihan kerbau jantan berukuran besar, pihak keluarga dan tetua adat akan mengadakan jamuan makan malam yang melibatkan dalihan na tolu dan kemudian mengumumkan kepada masyarakat bahwa upacara tersebut merupakan pembayaran sanksi adat bagi calon mertua. perkawinan campuran.

Berikut penuturan salah satu tokoh masyarakat di desa Alang Bonbon:

“Jika terjadi perkawinan marga, dan kedua mempelai sudah siap, kemudian mereka bersikeras, tetapi tidak ingin dikucilkan dari masyarakat, maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa menyembelih kerbau dan mengadakan makan malam bersama tetangga desa. Dalam prosesi akan diumumkan kepada masyarakat bahwa mereka akan menikah secara keluarga dan ini resmi, dan mereka tidak akan diusir dari desa kami karena mereka telah membayar sanksi adat.”

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa hukum adat saat ini telah memberikan solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan keluarga, yaitu dengan menebus sanksi adat yang diberikan. Ketika sanksi adat telah dilaksanakan, kedua mempelai tidak akan dikucilkan dari masyarakat, apalagi diusir dari desa.

Selain menyembelih kerbau jantan berukuran besar, ada juga ritual adat tambahan yang dilakukan untuk kasus perkawinan marga. Ritual adatnya adalah seorang wanita yang menikahkan marganya dengan suaminya harus berpindah marga dengan cara meminta marga baru dari marga ibu suaminya melalui proses hukum adat. Hal tersebut dari salah satu informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Jika wanita tersebut tetap menikah dengan pria yang ada bersama keluarganya, maka adat tetap memberikan jalan keluar. Hanya saja harus ada perombakan klan. Wanita itu harus menjalani serangkaian perubahan klan tradisional. Jadi, nama belakang yang lama akan diganti dengan mengambil nama keluarga calon ibu mertua. Karena itu yang bisa mendekatkan mereka adalah keluarga dari kedua belah pihak, dan tentunya hasilnya akan berbeda di kemudian hari dengan marga suaminya di kemudian hari.”

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh informan di atas merupakan jalan keluar untuk menghindari perkawinan marga. Jadi, wanita itu terpaksa

mengubah nama keluarganya menjadi satu klan dengan calon ibu mertuanya. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Setelah penetapan nama keluarga, siteri akan menjadi kelompok mora suami (marga ibu suami) dan bukan lagi marga dengan marga orang tuanya (Parapat, dkk, 2019). Dampak dari perkawinan semarga yang berlanjut mempengaruhi status keturunan mereka. Jika ada anak laki-laki dalam keturunannya, maka di masa depan anak laki-laki itu tidak diperbolehkan mengambil tulang boru (anak perempuan dari saudara laki-lakinya).

Setelah membayar sanksi adat, prosesi selanjutnya adalah acara *Markobar Boru* dengan kegiatan inti melunasi hutang adat *Boru*. Setelah itu, prosesi pernikahan dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan oleh salah satu informan kepada peneliti sebagai berikut:

“Markobar sebenarnya dalam bahasa awam adalah kegiatan mengumumkan dan berunding dalam waktu yang bersamaan. Mengumumkan berarti ada masalah adat yang serius yang perlu dibicarakan, sedangkan berunding berarti melanggar kesepakatan tentang masalah yang sedang dibicarakan. Dalam kegiatan markobar akan ada KUA yang mengetahui tata cara perkawinan menurut syariat Islam, dan juga akan ada tetua adat yang menguasai urusan adat. Mereka berunding untuk kesepakatan bersama (adat).”

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa adat masih memikirkan jalan keluar terbaik untuk mengatasi keadaan yang salah di mata adat itu sendiri (nikah marga). Perundingan untuk mufakat dihadiri dari berbagai kalangan, seperti masyarakat, ulama dan umara. Selanjutnya, jika ada yang ingin melangsungkan perkawinan keluarga, tetapi tidak mampu membayar sanksi adat, maka sesuai dengan tradisi yang ada, mereka dipandang rendah dalam masyarakatnya. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wahyuni, dimana wanita yang melakukan perkawinan semarga, harus merombak marganya dengan meminta marga dari pihak ibu suami melalui proses adat (Wahyuni et al., 2018). Hal inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan antara pihak keluarga pihak laki-laki dengan pihak keluarga pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, karena pihak keluarga pihak perempuan menerima sanksi adat ini seolah-olah anaknya tidak dihormati oleh pemuka adat dalam *dalihan na tolu*.

Analisis penelitian ini berupaya untuk lebih mengungkap bahwa ada situasi yang tidak dapat dipungkiri apa yang dialami oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan marga ini akan mengalami perselisihan internal. Soalnya, sanksi adatnya cukup tinggi, bayangkan harus membeli kerbau yang gemuk. Terkadang pihak pengantin pria meminta sumbangan dari pihak pengantin wanita, sehingga pada akhirnya kedua keluarga yang ingin bersatu berakhir dalam konflik. Pria tidak mampu membayar dana, sementara wanita merasa kehilangan harga diri (Pandiangan, 2016)

Kasus kekurangan dana seperti di atas, terkadang kedua belah pihak mempelai, baik laki-laki maupun perempuan akan menempuh jalur agama dalam perkawinan mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak akan mampu menahan diri dari pengucilan masyarakat adat atas dirinya dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam hal ini pemecahannya adalah dengan menggunakan aturan agama saja, sehingga pernikahan dilakukan dengan mengundang ahli agama dengan menggunakan aturan pernikahan yang sesuai dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang perkawinan Islam, serta memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Islam, yang meliputi: calon suami istri, wali nikah, ijab dan qabul, mahar (atas permintaan calon istri), dan dua orang saksi. Inilah solusi yang terjadi di Alang Bonbon ketika kedua belah pihak tidak mampu mematuhi aturan adat yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi pada masyarakat di desa ini, bagi mereka yang merasa tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi peraturan adat, biasanya mereka akan memilih menikah secara agama saja. Mereka tahu konsekuensinya akan dikeluarkan dari interaksi sosial karena dianggap sumbang. Sehingga banyak pasangan yang baru menikah memutuskan untuk hijrah atau merantau ke daerah lain. Tujuan mereka adalah mencari penghidupan yang layak dan menghindari pembicaraan tentang masyarakat adat tentang pernikahan mereka (Firmando, 2021).

Dari keterangan di atas diketahui bahwa sebagai ungkapan syukur atas perkawinan kedua mempelai tanpa proses adat yang ada pada masyarakat Alang Bonbon, pihak laki-laki dan perempuan hanya mengadakan pesta menurut agama Islam dan membaca doa ucapan selamat dengan mengundang keluarga dan tetangga dalam jumlah banyak. terbatas. Dalam hal ini juga terdapat hukum adat yang tegas dan tegas yang memberikan sanksi pengusiran dari desa bagi yang melanggar. Hal yang terjadi yaitu pergeseran dalam hukum adat, dari sanksi denda menyembelih kerbau jantan menjadi hukuman yang lebih ringan yaitu membolehkan perkawinan dengan satu marga asalkan tidak dengan mahram sesuai dengan ketentuan hukum positif yang termuat dalam hukum adat (Rismawati, 2011).

Hasil wawancara dengan masyarakat terdapat nilai larangan perkawinan dalam satu marga yaitu perlindungan hubungan kekerabatan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar paguyuban marga parna serta menghindari perpecahan. kelompok marga yang dapat memahami larangan perkawinan satu marga. Pada dasarnya mereka selalu berpegang pada silsilah karena itulah kunci kekerabatan. Dalam silsilah ini, orang Batak mengetahui bahwa dalam Dalihan Natolu, ketika orang Batak bertemu dengan orang Batak lain, yang pertama kali ditanyakan adalah marganya karena dari marga mereka tahu kata-kata yang tepat untuk digunakan.

## Simpulan

Perkawinan adalah amanat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing. Dalam suku batak, dalam konteks penelitian ini Batak Mandailing, perkawinan memiliki adat istiadat, yang melarang pernikahan semarga. Hal ini karena pelarangan perkawinan semarga, dalam perspektif adat batak masih ada. Nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi. Suku Batak menganggap semarga itu bersaudara. Suku Batak dengan demikian melarang adanya pernikahan semarga. Sanksi adat dikenakan apabila terjadi perkawinan semarga.

## Referensi

- Adrianto, S. (2019). Peranan Pendidikan Sebagai Transformasi Budaya. *Stikomcki*, 12(1), 14–19. <http://jurnal.stikomcki.ac.id/index.php/cos/article/view/54>
- Ali, H. (2021). Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing (Studi Kasus: di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2019). Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang

- Hasundutan Sumatera Utara). *Pactum Law Journal*, 2(2), 667-675.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1>.
- Firmando, H. B. (2021). Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis). *Studia Sosia Religia*, 3(2).
- Gultom, G. P., & Atnan, N. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Interpersonal Guru Dengan Murid Berkebutuhan Khusus. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.37535/101006120193>
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 77-84.
- Hidayat, R. (2020). Construction of Character Education in Mandailing and Angkola Culture in North Sumatra Province. *Society*, 8(2), 611-627. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.212>
- Ida Bagus Brata. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 5(1), 1-16.
- Kafaabillah, D. (2018). Nama Marga Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab. *Litera*, 17(2), 175-185. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i2.18364>
- Pandiangan, E. A. (2016). Analisa Hukum Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba. *Hukum To-Ra*, 3(2).
- Parapat, L. H., Deninna, & Aritonang, R., Muhammadiyah, U., Selatan, T., & Abstrak, P. (2019). Nilai Budaya Lokal “ Pemberian Marga ” Di Desa Paringgonan Dalam Prespektif Semantik Sebagai Bahan Ajar Sastra. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4(2).
- Pasaribu, D. Maria P., Sukirno, & Surdiatmi, S. (2015). Perkembangan sistem perkawinan adat Batak Toba di Kota Medan. *Diponegoro Law Jurnal*, 6(02), 1-13.
- Pohan, M. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta. *Madaniyah*, 8(2), 282-302.
- Pohan, M. (2021). Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta ). *Al-Qadha*, 8(1), 67-84.
- Prasanti, D. (n.d.). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Jurnal Bakti Saraswati*, 6(1), 13-21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Rismawati. (2011). *Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba*. 03(02), 697-716.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412-434.
- Sembiring, I. A. (2018). Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 48-73. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.7>
- Wahyuni, O., Harahap, M., & Masalah, A. L. B. (2018). *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing*. V, 1-15.

## Penguatan Karakter Bela Negara di Era Revolusi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Hani Subagio<sup>a,1</sup>, Wahyu Wibowo Eko Yulianto<sup>b,2</sup>, Danang Prasetyo<sup>c,3\*</sup>, Ricky Santoso Muharam<sup>d,4</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Indonesia

<sup>cd</sup> Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup> [danangprasetyo@stipram.ac.id](mailto:danangprasetyo@stipram.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 30 April 2022;

Revised: 28 Mei 2022;

Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Era Revolusi Digital;

Karakter Bela Negara;

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai sarana penguatan karakter bela negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer berasal dari wawancara, dokumentasi, observasi, serta data kuesioner, sedangkan data sekunder dari referensi ilmiah yang diambil dari web, buku, dan jurnal ilmiah. Upaya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat terkait dengan pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan dan memanfaatkan media sosial untuk menggugah bukti aktualisasi nyata bela negara, sehingga memberikan inspirasi bagi warga negara lainnya. Selain itu mahasiswa mampu menganalisis berdasarkan kasus-kasus yang disajikan bahwa perilaku warganet di sosial media merupakan bagian dari upaya bela negara di era digital. Terbukti 207 responden menjawab bahwa yang dilakukan oleh warganet terhadap berbagai kasus merupakan bagian dari upaya bela negara. Selanjutnya 11 responden menjawab tidak dan 14 responden menjawab ragu-ragu. Hal yang dilakukan warganet di media social dengan memberikan komentar pembelaan apabila terdapat pemberitaan yang merugikan nama baik Indonesia dan dukungan moral.

ABSTRACT

Keywords:

Digital Revolution Era

National Defense

Character;

Civic Education.

**Strengthening the Character of State Defense in the Era of the Digital Revolution Through Civic Education.** This study aims to reveal the contribution of civic education in universities as a means of strengthening the character of defending the country. This study uses a qualitative descriptive approach with primary data derived from interviews, documentation, observation, and questionnaire data, while secondary data from scientific references taken from the web, books, and scientific journals. Based on the average score of 232 respondents who took civic education courses, as many as 46.64% considered the civics education material to be "very inspiring" to participate in national defense efforts, 46.18% "inspired", and as many as 7.14% considered "enough" is inspiring. Efforts are made by utilizing social media as a means of public education related to understanding civic education materials and utilizing social media to upload evidence of actual actualization of state defense, thus providing inspiration for other citizens. In addition, students are able to analyze based on the cases presented that the behavior of netizens on social media is part of an effort to defend the country in the digital era. It is proven that 207 respondents answered that what netizens did to various cases was part of an effort to defend the country. Furthermore, 11 respondents answered no and 14 respondents answered doubtful. This is what netizens do on social media by providing defense comments if there is news that is detrimental to the good name of Indonesia and moral support.

Copyright © 2022 (Hani Subagio, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Subagio, H., Yulianto, W. W. E., Prasetyo, D., & Muharam, R. S. (2022). Penguatan Karakter Bela Negara di Era Revolusi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 79-93. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6886>

### Pendahuluan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Tantangan globalisasi yang terjadi saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nasucha, 2016). Perkembangan tersebut membuat dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung dunia (*global village*) tanpa mengenal batas negara. Kondisi tersebut berdampak pada aspek kehidupan bangsa dan negara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Era tersebut akan membuka dan memperluas hubungan antar negara yang bersifat bilateral maupun multilateral. Sebagai negara yang memosisikan diri dengan politik bebas aktif, Indonesia akan segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi, mempercepat pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki (Nasution, 2017). Hal inilah yang sudah dapat diprediksi oleh para pendiri negara yang sangat sadar cara yang paling efektif dengan menempatkan aturan dasar bahwa membela negara dan mempertahankan negara sebagai hak dan kewajiban yang hakiki oleh setiap warga negara yang kemudian dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) (Republik Indonesia, 2002).

Perkembangan teknologi saat ini dapat disebut sebagai era digital dimana semakin pesatnya teknologi dapat memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan tugasnya, serta dapat membantu berbagai kebutuhan manusia (Ahyati & Dewi, 2021). Revolusi kehidupan terjadi di era ini, aktivitas hidup yang sebelumnya dilakukan dengan cara konvensional, kini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, salah satunya pemanfaatannya dalam berkomunikasi. Inilah yang disebut dengan revolusi digital atau ada yang menyebut era revolusi 4.0 dengan sentuhan digitalnya yang memudahkan manusia dalam segala aspek kehidupan, salah satunya pendidikan (Hanifa & Dewi, 2021) yang cara kerjanya menggunakan mesin dan teknologi aplikasi (Waruwu et al., 2020). Tentu hal ini dapat menjadi tantangan serta peluang bagi penguatan karakter bela negara di era digital. Interaksi dunia maya yang saat ini sudah menjadi bagian dalam memenuhi kehidupan termasuk mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Peluang inilah menjadikan bahwa era digital dapat dipergunakan dalam membangun karakter bela negara khususnya bagi generasi muda yang semakin sering mengakses internet. Hal ini diperlukan mengingat keberadaan negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh kekuatan militer saja, yang jumlahnya relatif cukup apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Indonesia. Akan tetapi perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan berbagai lapisan masyarakat, lembaga non-pemerintah di luar kekuatan militer (unsur lain di luar bidang pertahanan) yang disebutkan dalam undang-undang sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung (Sumawijaya & Berantas, 2018).

Salah satunya ialah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu mata kuliah ini merupakan materi yang wajib diberikan pada pada satuan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini merupakan pembaharuan dari pendidikan kewiraan yang dulu lebih cenderung menitik beratkan pada pembentukan bela negara mahasiswa dengan cara-cara yang indoktrinatif dan pengajarannya dilakukan secara militeristik. Akan tetapi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat tatanan demokrasi sehingga tercipta masyarakat sipil yang kuat, maka pendidikan kewiraan direvisi dan digantikan dengan pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru. Pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru dibangun atas dasar paradigma secara kurikuler, teoritik, dan programatik serta mengandung target pencapaian pada mahasiswa sesuai dengan

apa yang termaktub dalam visi, misi, dan tujuannya. Pendidikan kewarganegaraan memuat dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), serta dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Selain itu pengajarannya harus dilakukan secara demokratis dengan menyentuh domain kognitif, efektif, dan psikomotor mahasiswa yang harus dilakukan secara holistik dan komprehensif termasuk dalam pengembangan semangat bela negara mahasiswa (Permana, 2018).

Proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di UPN (Universitas Pembangunan Nasional) "Veteran" Yogyakarta dan STIPRAM (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo) Yogyakarta selama ini telah dirancang dan dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat bela negara mahasiswa. Sebagaimana terdapat dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang diantaranya memuat materi kewajiban dan hak warga negara dan ketahanan nasional melalui upaya bela negara. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini telah terjadi pergeseran peran dan fungsi mahasiswa. Mahasiswa yang semestinya memiliki predikat *agent of social change*, *social control* dan *moral force* sekarang ini justru malah tergerus oleh dampak negatif globalisasi, maka perlu upaya bela negara yang dapat diperkuat melalui mata kuliah pendidikan. Mahasiswa merupakan bibit potensial yang akan meneruskan pembangunan bangsa, sehingga nilai-nilai yang menjadi tujuan bela negara dapat dikembangkan di tataran perguruan tinggi (Matondang, 2015). Penanaman pengetahuan atau pemberian materi juga dilakukan untuk menciptakan sifat patriotisme, pelaksanaannya pendidikan ini merupakan sarana penunjang dalam menumbuhkan sikap patriotisme (Wijayanto J. & Marzuki, 2018).

Penelitian tentang bela negara terhadap era digital pernah diteliti oleh Saifudin Zuhri dengan judul Pentingnya Budaya Literasi Media dan Aktualisasi Bela Negara Generasi Milenial dari hasil penelitian tingkat toleransi mencapai skala 8, 8/10 toleransi beragama mencakup hal-hal berkaitan dengan ketuhanan masing-masing pemeluk agama yang dianut oleh individu (Zuhri, 2020). Penelitian selanjutnya pernah diteliti oleh Nurul Hidayat, Nrangwesthi Widyaningrum, dan Aris Sarjito dengan judul Literasi digital dan bela negara: sebuah upaya untuk mencegah hoax dalam sistem pertahanan negara, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa literasi digital akan menciptakan masyarakat dengan pemikiran dan opini yang kreatif dan kritis (Hidayat et al., 2021). Beberapa penelitian sebelumnya yang dipaparkan akan menjadi gambaran sederhana terkait penelitian ini, yang kemudian hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan bela negara. Adapun kebaharuan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ditekankan temuan kaitan bela negara di era digital. Apabila penelitian sebelumnya menekankan pada pengetahuan literasi yang kemudian diaktualisasikan dengan upaya bela negara, begitu pula penelitian lain yang dikaitkan dengan kasus hoax. Hal berbeda dari penelitian ini dengan menyajikan data pengamatan mahasiswa terhadap isu-isu aktual di media social, kemudian melaukna pembelaan diri dengan memebrikan komentar positif, dan selanjutnya dapat mempengaruhi tindakan mahasiswa untuk bela negara.

Berdasarkan paparan di atas terdapat pembaharuan yang peneliti kaji dengan judul penguatan karakter bela negara di era revolusi digital, terlebih lagi melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya menciptakan generasi yang memiliki kompetensi digital di era revolusi digital (Dito & Pujiastuti, 2021). Hal ini sangatlah penting mengingat keberadaan UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang sangat identik dengan gelar Kampus Bela Negara. Tentunya, upaya yang dilakukan oleh tim pengampu mata kuliah juga sejalan

dengan visi misi kampus yang ingin menguatkan identitasnya sebagai Kampus Bela Negara (Rudiana, 2019). Selain itu, peneliti juga ingin memaparkan pelaksanaannya di STIPRAM Yogyakarta karena sebagai pionir dan memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Satuan Mahasiswa Bhayangkara (Satmabhara) yang memiliki program utama untuk peduli pada permasalahan lingkungan, sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Wahyu Beny Mukti Setiawan, 2020).

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara langsung terhadap dosen pengampu mata kuliah, isian kuesioner kepada mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, unitisasi, kategorisasi, *display data*, dan pengambilan simpulan. Penelitian ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan, dari bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022. Penelitian dilakukan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta. Alur penelitian penguatan karakter bela negara yaitu, pertama adalah memberikan paparan terkait pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan tambahan materi *digital citizenship*, dalam materi tersebut terdapat paparan tentang keadaan warga digital saat ini dan upaya bela negara melalui media digital, salah satunya media social. Kedua, mahasiswa mengamati pemberitaan di media sosial yang dianggap oleh warganet merugikan nama baik Indonesia, yang kemudian dianalisis komentar warganet sebagai bagian dari bela negara. Ketiga, mahasiswa diminta untuk membuktikan upaya bela negara di media sosial dengan bukti nyata, melalui komentar, foto, atau video yang menunjukkan kebanggaannya terhadap negara Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Era digital telah menuntut pendidikan ikut menyesuaikan, sehingga mampu berperan dalam menyiapkan generasi yang melek digital yang berkepribadian, salah satu caranya melalui pendidikan kewarganegaraan. Terlebih lagi sudah populernya istilah warga negara global, pun dengan wawasan yang global era digital. Terdapat nilai-nilai dasar utama yang perlu dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membangun wawasan global warga negara yang dijiwai rasa nasionalisme. Nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan dalam membangun wawasan global dalam konteks Indonesia antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan, dan perdamaian. Nilai-nilai dasar ini penting untuk dikembangkan dalam rangka mengembangkan wawasan global warga negara yang semangat di dalamnya tetap dijiwai oleh rasa nasionalisme supaya dapat berperan secara efektif dalam kancah global, tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kariadi, 2019).

Era digital menuntut pelaksanaan bela negara menitikberatkan pada bela negara non-fisik untuk membentuk karakter anak bangsa. Semestinya bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian pertahanan saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kementerian



---

pendidikan melalui lembaga pendidikan yang ada di dalam naungannya. Dengan merubah beberapa program dengan kurikulum terhadap wawasan kebangsaan sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan, untuk tetap menjaga serta membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dengan demikian pandangan masyarakat terkait penerapan bela negara bukanlah wajib militer, bukan militerisme, bukan militerisasi, dan bukan pula sebuah usaha pembelaan atau pertahanan negara secara fisik dalam menghadapi ancaman militer, namun dapat dilakukan dengan cara lain (Umra, 2019).

Salah satu dampak dari perkembangan globalisasi ditandai adanya teknologi yang semakin maju yang mendorong berkembangnya era digital. Salah satu hal yang menarik dari era digitalisasi ini tentunya arus informasi yang semakin terbuka, sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai hal salah satunya melalui media. Media yang pada awal hanya sebatas media cetak dan secara berkelanjutan memasuki abad 20 dimana komunikasi massa mulai bergerak menggunakan internet, mengarah kepada media social. (Wibisono, 2017).

Tentunya hal ini memberikan peluang bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan media internet untuk membangun rasa nasionalisme terhadap berbagai isu-isu tentang kebangsaan. Salah satu dampak yang cukup meresahkan yakni berkembangnya berita hoax. Merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, atau dapat diartikan pula memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi informasi yang sebenarnya (Hidayat et al., 2021). Bahkan menurut data kemenkominfo pada tahun 2019 ada sekitar 800 ribu situs yang digunakan sebagai saluran penyebaran berita hoax atau palsu (Hidayat et al., 2021). Dari persoalan tersebut tentunya perlu adanya pendidikan karakter bela negara di era digital sebagai pembangunan nilai-nilai kebangsaan. Mahasiswa maupun peserta didik perlu diberikan pemahaman tentang materi-materi perkuliahan bela negara serta tantangan dalam menghadapi era digital untuk membangun bela negara sebagai wujud pertahanan nasionan di era digital.

Upaya tersebut merupakan bagian dari bela negara non fisik, dimana para peserta didik atau mahasiswa diberikan pemahaman akan wawasan kebangsaan, nilai-nilai toleransi, literasi digital, nilai pluralisme serta keragaman dalam memanfaatkan teknologi. Bekal pemahaman materi di Perkuliahan tentang bela negara di era digital dapat menjadi solusi bagaimana membangun rasa nasionalisme serta bela negara melalui upaya non fisik. Upaya bela negara yang merupakan kegiatan non fisik atau tidak bersifat militerisme merupakan bagian terintegrasi dalam semua mata kuliah salah satunya pendidikan kewarganegaraan, sehingga program ini harus mendapat perhatian yang prioritas untuk mengembangkan sifat konatif yang pada akhirnya mahasiswa mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa (Noor, 2016).

Karakteristik mahasiswa dalam bela negara dengan memaksimalkan waktu sebagai mahasiswa dengan aktivitas yang bermanfaat, mencintai indonesia, memiliki moral baik, skill yang baik, dan memiliki wawasan kebangsaan sebagai modal untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara (Hidayahl et al., 2020). Bela negara kini memiliki relevansi yang tinggi di era global ini untuk memperkuat pertahanan bangsa Indonesia di tengah maraknya dan bermunculan paham atau ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Bela negara dapat memupuk karakter kebangsaan dan ke-Indonesiaan (Budiyono, 2017). Bela negara itu tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata.

Mempertebal kecintaan terhadap negara untuk mencegah ancaman terhadap integritas bangsa itu sudah menjadi upaya bela negara yang nyata (TuguJogja, 2018).

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib umum, dengan memiliki bobot sebesar 2 sks, dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester). Mata kuliah ini di UPN Veteran Yogyakarta diberi kode mata kuliah MK1000082 dan di STIPRAM Yogyakarta diberi kode ITPK1032. Pada penelitian ini, didapatkan sebanyak 232 responden yang mengisi kuesioner melalui google formulir yang terdapat pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Kuesioner diberikan melalui link google formulir yang diberikan melalui grup *whatsapp* dan platform *e-learning*. Mahasiswa dapat mengisi link tersebut maksimal satu minggu setelah kuliah di setiap pertemuan, hal ini dikarenakan untuk memastikan mahasiswa memahami materi yang sudah dipelajari dan mampu menunjukkan bukti aktualisasi bela negara yang sesuai dengan materi kuliah yang sudah dipelajari. Hal tersebut diunggah di *e-learning*. Adapun sebaran responden yang telah mengisi kuesioner tersebut, penulis sajikan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sebaran Responden Penelitian

Prodi	Sebaran Responden Penelitian	
	Jumlah Responden	Persentase
D3 Teknik Kimia	39	17%
S1 Teknik Kimia	36	16%
S1 Manajemen	27	12%
S1 Geologi	27	12%
S1 Teknik Industri	34	15%
D3 Perhotelan	33	14%
S1 Pariwisata	36	15%
Jumlah	232	100%

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Pada saat awal perkuliahan dalam membahas materi pengantar hakikat pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa dijelaskan tentang pentingnya sikap meghadapai era revolusi digital, kemudian diberikan materi tambahan terkait dengan *digital citizenship* untuk disimak dan dicermati. Materi ini diharapkan mampu memantik upaya mahasiswa untuk aktif memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menguatkan karakter bela negara mahasiswa. Selanjutnya di akhir pertemuan pertama, mahasiswa diminta mengisi kuisisioner tentang aktivitasnya di era revolusi digital, hasilnya 100% responden menyatakan memiliki akses sebagai pengguna internet aktif, hal ini sebagai ciri pemanfaatan kemajuan teknologi digital. Begitu juga temuan bahwa 100% dari semua responden menyatakan memiliki aktif di media sosial. Adapun sebaran pemanfaatan internet di aktivitas kesehariannya (paling sering dan dominan) oleh mahasiswa sebagai berikut ini.

Tabel 2. Aktivitas Pemanfaatan Internet Paling Dominan

Aktivitas	Aktivitas Internet	
	Jumlah Responden	Persentase (%)
Berita	19	8%

Hiburan	25	11%
Permainan	30	13%
Pendidikan	68	29%
Media Sosial	90	39%
Jumlah	232	100%

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Hasil perolehan data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas informan menyatakan bahwa internet dimanfaatkan untuk bermedia sosial dan pendidikan menempati urutan satu dan dua. Hal ini menarik dikaji lebih dalam untuk mengkolaborasikan dua hal tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan semua opsi pilihan juga dilakukan oleh mahasiswa, namun peneliti meminta mahasiswa untuk memilih aktivitas yang paling sering atau dominan dalam memanfaatkan internet. Peneliti semakin yakin untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait pemanfaatan media sosial dalam aktivitas pendidikan, terlebih lagi saat ini pendidikan sangat erat kaitannya dengan media digital, seperti halnya aktivitas *e-learning*. Keadaan demikian menguatkan temuan bahwa aksesibilitas internet dan memanfaatkan teknologi digital sebagai kunci keberhasilan *e-learning* (Annisa & Dewi, 2021). Revolusi industri saat ini memang dituntut untuk lebih kreatif, mandiri, serta lebih cerdas merespon setiap perkembangan. Internet (terutama media sosial) merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi di era ini, maka perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada era revolusi digital mestinya mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi (Arliman, 2020).

Selanjutnya, pertanyaan kuisisioner yang diajukan kepada mahasiswa berupa pertanyaan tertutup, responden diminta untuk memilih 5 (lima) opsi jawaban yang sudah tersedia, yakni sangat menginspirasi, menginspirasi, cukup, kurang menginspirasi, dan sangat tidak menginspirasi. Adapun pertanyaannya berdasarkan materi perkuliahan yang sudah didapatkan, pendapat mengenai materi tersebut mampu memberikan inspirasi kepada mahasiswa dalam melakukan upaya bela negara. Berdasarkan data yang diperoleh, pilihan jawaban hanya terisi di 3 opsi pilihan yakni sangat menginspirasi, menginspirasi, dan cukup. Sedangkan opsi pilihan kurang menginspirasi dan tidak menginspirasi tidak ada yang memilih. Adapun penialain mahasiswa penulis sajikan dalam bentuk tabel 4 berikut ini.

Tabel 3. Penilaian Mahasiswa Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Materi	Penilaian Mahasiswa Terhadap Materi PKN					
	Sangat Menginspirasi	(%)	Menginspirasi	(%)	Cukup	(%)
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	80	34,5	131	56,5	21	9,1
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional	103	44,4	118	50,9	11	4,7
Urgensi Integrasi Nasional	94	40,5	120	51,7	18	7,8
Konstitusi Indonesia: UUD NRI 1945	70	30,2	132	56,9	30	12,9

Kewajiban dan Hak Warga Negara	144	62,1	78	33,6	10	4,3
Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Warga Negara	135	58,2	89	38,4	8	3,4
Konsep Demokrasi Pancasila	97	41,8	115	49,6	20	8,6
Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik Warga Negara	99	42,7	111	47,8	22	9,5
Penegakan Hukum yang Berkeadilan	101	43,5	112	48,3	19	8,2
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pendidikan Antikorupsi	101	43,5	112	48,3	19	8,2
Wawasan Nusantara Implementasi	153	65,9	69	29,7	10	4,3
Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional	102	44,0	109	47,0	20	8,6
Bela Negara Generasi Muda	97	41,8	117	50,4	18	7,8
Rata Rata	100	43,1	116	50,0	16	6,9
	140	60,3	83	35,8	9	3,9
		46,64		46,18		7,14

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa materi kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah dipelajari mampu memberikan dampak positif terhadap mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara. Setelah data responden sebanyak 232, diolah dan diambil nilai rata-rata, sebanyak 46,64% mahasiswa menganggap materi pendidikan kewarganegaraan sudah “sangat menginspirasi” untuk berpartisipasi upaya bela negara. Selanjutnya sebanyak 46,18% mahasiswa menganggap materi pendidikan kewarganegaraan sudah “menginspirasi” mahasiswa untuk bela negara. Selanjutnya, sebanyak 7,14% dari total mahasiswa menganggap materi dianggap “cukup” menginspirasi untuk bela negara. Sedangkan untuk opsi jawaban “kurang menginspirasi” dan “sangat tidak menginspirasi” tidak ada responden yang mengisi, atau 0%.

Era globalisasi dengan adanya kebangkitan digital yang ditandai kemajuan diberbagai bidang. Tentunya hal tersebut perlu adanya penguatan nilai-nilai karakter bangsa dalam memahami tantangan global dengan membangun rasa semangat bela negara di era digital. Masyarakat Indonesia sebetulnya mampu memberika advokasi, kritik sosial serta mampu melakukan gotong royong melalui media sosial. Hal ini dikarenakan keberadaan hal tersebut secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam membangun pola pikir masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya berpikir kritis dan perlu diberikan edukasi secara lebih mendalam terutama menggunakan teknologi digital dengan arif dan bijaksana. Adanya penguatan literasi digital diharapkan untuk meningkatkan minat membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi digital (*big data*), literasi teknologi ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman pada kerja mesin beserta aplikasi teknologi lainnya. Adapun pelaksanaannya proses penerapan pendidikan bela negara tidak hanya dilakukan di lembaga formal akan tetapi harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yakni masyarakat, lingkungan, maupun pemerintah dengan berdasarkan berbagai komponen-komponen dalam penerapannya

Dony Gredinand membagi tiga komponen dalam menerapkan bela negara baik sikap dan tindakan. Pertama, *Attitude Toward Behaviour* (ATB). Ini merupakan sikap terhadap perilaku yang dipengaruhi oleh *behaviour belief* yaitu dengan cara evaluasi positif maupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu seperti ucapan, benar atau salah, setuju atau tidak setuju, maupun baik atau buruk dimana evaluasi terhadap bela negara akan meningkatkan intensi untuk bela negara. Kedua, *Subjective Norm* (SN) atau norma subjektif yang dipengaruhi, sekeliling individu mengharapkan seorang individu berperilaku tertentu atau tindak dengan sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat. Ketiga, *Control Belief* (CB) atau kontrol perilaku yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control* sebagai acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Sesuai dengan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut dapat melalui tindakan nyata (Gredinand, 2017). Merujuk pada komponen tersebut yang berdasarkan sikap dan tindakan dalam melaksanakan model pendidikan bela negara dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Penjabaran Komponen/Kompetensi

Komponen/ Kompetensi	Kognitif		Afektif	Psikomotorik
	Kualitas Diri	Pengelolaan Diri	Pengelolaan Terhadap orang lain	Pengelolaan Tugas
<i>Inspiring</i>	1. Memiliki Visi 2. Fleksibel 3. Inovatif 4. Jadi Pencerah	1. Bertetika 2. Pembelajar aktif	1. Komunikatif 2. Empati 3. Memotivasi	1. Antusias 2. Kreatif
<i>Dedicative</i>	1. Mampu memotivasi 2. Punya keahlian	1. Bermoral 2. Beramal Ilmu	1. Mampu bersinergi 2. Bertutur positif 3. Sopan	1. Memiliki Niat
<i>Emphatic</i>	1. Mampu mengatasi konflik 2. Berpikir analisis 3. cerdas	1. Beretika 2. Tangguh 3. Tabah	1. Asertif 2. Mampu bernegosiasi 3. Bijaksana	1. Cekatan memutuskan masalah dengan tepat

Sumber: (Gredinand, 2017)

Berdasarkan paparan di atas, upaya bela negara di era digital berdasarkan pada komponen di atas yang diterapkan dalam praktek upaya bela negara di era digital mahasiswa dengan diberikan pemahaman dan menganalisis dari berbagai kasus yang berkaitan masalah antara warga negara Indonesia dengan warga negara lainnya, baik secara individu maupun

berkaitan dengan masalah negara/pemerintah. Upaya bela negara ini sangat penting diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan literasi digital khususnya dalam bermedia sosial. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dalam memahami upaya bela negara di era digital, melalui analisis terhadap berbagai kasus yang diberikan, kemudian mahasiswa untuk menganalisis apakah perilaku yang dilakukan warganet dalam bermedia sosial yang secara aktif memberikan komentar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Indonesia. Selain itu mahasiswa juga dapat diarahkan mampu memahami literasi digital dimana mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan komunikasi dan penguasaan ilmu sains (Al Munawaroh & Dewi, 2021).

Suwarno menyatakan bahwa generasi atau remaja milineal merupakan generasi yang tumbuh dan hidup di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penerapan teknologi informasi saat ini, ditandai dengan adanya pergeseran dari manual ke digital, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah konektivitas pada jalur internet maupun antarnet (Rahayu, 2021). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam upaya bela negara sangat penting. Ketahanan nasional diupayakan terwujud melalui bela negara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, serta keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kerelaan berkorban untuk menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar (Setiyon, 2017). Adapun bukti kemampuan literasi digital dan upaya bela negara terutama pada kasus seperti pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Aksi Warganet Indonesia di Sosial Media

Tahun Kejadian	Pembelaan Warganet Indonesia di Sosial Media		
	Kasus	Negara Yang Menjadi Sasaran	Nama Akun
2020	Microsoft mengukur tingkat kesopanan pengguna internet tahun 2020. Berdasarkan hasil riset tersebut Indonesia berada di urutan ke 29 dari 32 negara di seluruh Asia Tenggara, karena warganet merasa tidak terima akhirnya akun sosial media microsoft diserang oleh netizen.	USA	@microsoft
2020	Masalah bermula dari komentar Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman di Sidang Umum PBB ke-75. Dalam pidatonya, ia meminta Indonesia supaya mengizinkan Komisararis HAM PBB untuk masuk	Vanuatu	@vanuatuisl nd
2020	Buntut dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, netizen Indonesia menyerang akun Instagram rapper Korea Selatan DPR Live, Rupanya, para netizen Indonesia salah sasaran. Hujatan netizen Indonesia yang sedianya ditujukan untuk para anggota DPR RI di akun @dpr_ri malah menyerang akun rapper @dprlive	Korea Selatan	@dprlive

---

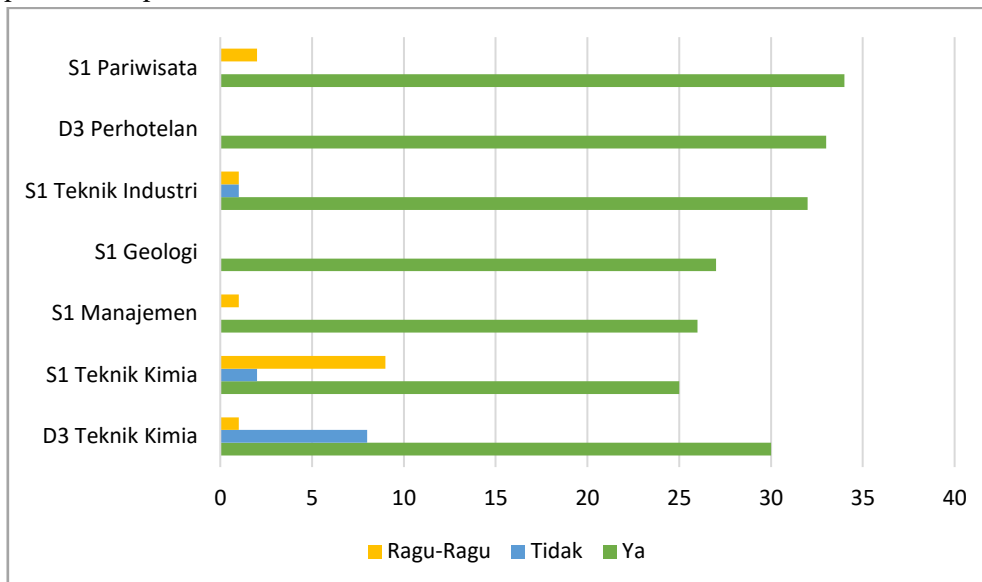
2021	Pertandingan catur online antara Chess.com antara Dadang Subur alias Dewa Kipas Melawan Levy Rozman alias GothamChess. GothamChess yang kalah dari Dewa Kipas menuduhnya bermain curang yang pada akhirnya akunya diblokir oleh chess.com yang pada akhirnya warganet Indonesia membela	USA	@GothamChess
2021	Aksi protes netizen karena penayangan episode drama racket boys yang telah ditayangkan pada senin 14 Juni 2021 menggambarkan Indonesia dengan citra sangat buruk.	Korea Selatan	@sbsdrama.official
2021	Warganet menganggap pembalap bernama Dani Munoz melakukan perlombaan CEV Moto3 telah kasar (mendorong) saat belapan, yang pada akhirnya menggagalkan pembalap Indonesia bernama Mario Suryo Aji yang memiliki peluang untuk naik podium.	Kolombia	@danimunozf2
2021	Seluruh Tim Bulutangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen Yonex all England 2021 tidak dapat mengikuti pertandingan karena saat penerbangan Istanbul ke Birmingham satu penumpang terpapar covid19. Pada saat itu kesempatan atlet Indonesia memiliki peluang untuk juara.	Inggris	@bwf.official
2022	Kapal tanker raksasa kedua milik Pertamina bernama Pertamina Prime dicegat dan ditahan aktivis Greenpeace saat berada di lepas pantai Denmark karena membeli minyak dari Rusia, kasus ini buntut dari perang Rusia-Ukraina.	Denmark	@greenpeace
2022	Akun sosial media milik Jonathan Khamdee pesepak bola Thailand hilang diserang warganet Indonesia, Jonathan Khamdee dianggap melakukan provokatif pada pertandingan yang berjalan saat Thailand VS Indonesia dibabak semifinal Sea Games 2021 di Vietnam	Thailand	@jonathan_khemdee

---

Sumber: Berbagai Situs Berita dan Akun Sosial Media

Setelah mahasiswa diberikan berbagai kasus perilaku warganet di sosial media yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan pihak lainnya, mahasiswa dari berbagai prodi diminta untuk mengamati akun-akun sosial media dan menjawab pertanyaan apakah isu tersebut berkaitan dengan upaya bela negara yang dilakukan warganet di sosial media. Mahasiswa diminta untuk menganalisisnya dan menyajikan melalui paparan di ruang kuliah. Analisis tersebut mengarah apakah mahasiswa setuju atau tidak terkait komentar-komentar di media social, beserta alasan logisnya mengapa warganet perlu mengomentari hal tersebut. Hal ini dilakukan karena warganet merasa perlu

mendukung pemulihan nama baik negara, dan upaya untuk memberikan dukungan moral terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Dari responden sebanyak 232 menjawab bahwa perilaku yang dilakukan warganet tersebut menjawab bahwa 207 responden menjawab bahwa yang dilakukan oleh warganet terhadap berbagai kasus merupakan bagian dari upaya bela negara. Selanjutnya 11 responden menjawab tidak dan 14 responden menjawab ragu-ragu. Supaya lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Analisis Kasus Aksi Warganet Indonesia di Media Sosial

Adanya respon dari 207 responden yang menyatakan bahwa pemberitaan di media social yang merugikan nama baik negara Indonesia perlu dibela, dengan cara menyampaikan komentar yang membangun, bukan menghujat atau memperkeruh keadaan. Selain itu, upaya warganet dalam memberikan dukungan moral terhadap pihak-pihak yang dirugikan jelas menjadi bukti bahwa melalui media social mahasiswa. Mayoritas responden yang menyatakan hal tersebut memahami bahwa upaya bela negara di era digital dapat dilakukan melalui komentar dan unggahan di media social. yang sifatnya membangun, mendidikan, berdasarkan fakta (tidak mudah terhasut hoax), menginspirasi, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Adapun hasil analisis mahasiswa terhadap komentar warganet di kasus yang disajikan sangat beragam, namun satu kesatuan tujuan, yakni membela nama baik negara dan memberikan dukungan moral. Berdasarkan kasus yang disajikan, mahasiswa mampu memilah dan memilih komentar-komentar yang dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara dengan komentar yang hanya bersifat emosional (dalam hal ini, komentar warganet ada yang terlalu jauh sehingga muncul serangan balik untuk merendahkan yang mengarah pada upaya merugikan pihak lain). Mahasiswa juga mampu menunjukkan komentar-komentar yang dikategorikan sebagai upaya bela negara, yang selanjutnya mahasiswa juga menunjukkan upaya bela negara secara nyata melalui unggahan foto, video, narasi di media sosialnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menerjemahkan data tersebut bahwa hampir rata-rata mahasiswa menganalisis terkait perilaku warganet di sosial media yang membela berbagai isu-isu yang mengatasnamakan bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia dengan memberikan komentar di akun sosial media kepada pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap berbagai konflik yang terjadi. Perilaku warganet dianggap hal yang dapat



dibenarkan kerana hal tersebut sebagai wujud masyarakat Indonesia mencintai tanah air, membangun rasa nasionalisme dan patriotisme untuk membela warga negara Indonesia atau negara yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Dengan hasil responden yang menjawab bahwa kasus tersebut bagian upaya bela negara di era digital. Dimana saat ini posisi netizen Indonesia cukup mendominasi terkait perilaku di sosial media, pernyataan ini diperkuat oleh Tito Adam yang menyatakan bahwa pengguna internet mengalami peningkatan 1% peningkatan ini merupakan paling kecil selama 10 tahun terakhir. Tercatat perkembangan internet 2012-2013 menjadi perkembangan paling pesat di Indonesia selama 10 tahun terakhir, Pengguna internet sebanyak 204,6 juta pengguna internet di Indonesia. Uniknya peningkatan kecil ini berbanding terbalik dengan peningkatan sosial media pada tahun ini meningkat 12,6% dari 170 juta meningkat menjadi 192,4 juta pengguna media sosial (Tito Adam, 2022). Dengan demikian adanya peningkatan pengguna sosial media yang mendominasi khususnya di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan Indonesia di dunia digital. Tentunya semangat inilah yang perlu didorong dan diarahkan sebagai salah satu potensi peningkatan karakter upaya bela negara di era digital.

## Simpulan

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta diselenggarakan dengan bobot 2 sks pada semester gasal maupun genap. Penelitian ini menemukan fakta bahwa materi pendidikan kewarganegaraan berkontribusi positif terhadap motivasi dan semangat bela negara mahasiswa di era revolusi digital. Motivasi ini tentunya didapatkan setelah mahasiswa secara konkrit memahami dan mau mengaktualisasikan konsep bela negara, dengan tambahan materi tentang *digital citizenship*. Adapun cara yang dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat yang terkait dengan pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan, sehingga memberikan pemahaman pada khalayak dan menginspirasi warga negara muda untuk melakukan hal-hal positif sebagai wujud bela negara. Melalui langkah-langkah studi kasus dan analisis terhadap komentar pemberitaan atau berita yang merugikan pihak Indonesia, kemudian warganet bereaksi dengan memberikan komentar sebagai pembelaan diri, konsekuensi logis sebagai warga negara yang tidak terima negaranya direndahkan atau dirugikan. Sebagai penyeimbang, mahasiswa yang notabene sekaligus sebagai warganet mengunggah bukti bela negara nyatanya melalui media social tersebut sebagai penyeimbang dari berita berita yang merugikan, sehingga memberikan inspirasi bagi warga negara lainnya. Bukti tersebut berupa foto ataupun video aktualisasi bela negara non-fisik, hal ini sangat sesuai dengan keadaan saat ini yang notabene disebut dengan era digital, dengan demikian menuntut pelaksanaan bela negara yang lebih menitikberatkan pada kategori nonfisik untuk membentuk karakter anak bangsa.

## Referensi

- Ahyati, A. I., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Bela Negara di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal on Education*, 03(03), 236–247.
- Al Munawaroh, S. Z., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal on Education*, 3(4), 291–298. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i4.377>
- Budiyono, B. (2017). Memperkokoh Ideologi Negara Pancasila Melalui Bela Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i1.1148>

- Gredinand, D. (2017). Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi. *Jurnal Prodi.Idu.Ac.Id*, 1–27.
- Hidayahl, Y., Retnasari, L., & Ulfah, R. A. (2020). Membangun Sikap Bela Negara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.424>
- Hidayat, N., Widyaningrum, N., & Sarjito, A. (2021). Literasi Digital dan Bela Negara: Sebuah Upaya Untuk Mencegah Hoax Dalam Sistem Pertahanan Negara. *Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 32–41.
- Kariadi, D. (2019). Revitalisasi Nilai-Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 1(1), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.26737/jpipi.viii.112>
- Matondang, E. (2015). Kurikulum Bela Negara Di Tingkat Pendidikan Tinggi: Prospektif Ketimpangan Dalam Sistem Pertahanan Indonesia the Defending the State Curriculum in High Education Level: the Prospective of Imbalances in Indonesian Defense System. *Jurnal Pertahanan*.
- Nasucha, J. A. (2016). Pendidikan Islam Dan Tantangan Globalisasi. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 205–218.
- Nasution, R. N. (2017). Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence - Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 30–42. [http://eprints.umpo.ac.id/5056/1/%28artikel%29 Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/5056/1/%28artikel%29%20Pengaruh%20Perkembangan%20Teknologi%20Informasi%20Komunikasi%20Terhadap%20Eksistensi%20Budaya%20Lokal.pdf)
- Noor, A. F. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan melalui Program Bela Negara: Perspektif Mahasiswa Mencintai Tanah Air dan Bangsa (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya). *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pedagogik.viii.417>
- Permana, D. S. (2018). Implementasi Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Pengembangan Semangat Bela Negara Mahasiswa. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 1(1), 62–67. <https://doi.org/10.47080/propatria.viii.144>
- Rahayu, S. K. (2021). Penguatan Kesadaran Bela Negara Pada Remaja Milenial Menuju Indonesia Emas. *Pedagogika*, 12(Nomor 2), 134–151.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar 1945*. Republik Indonesia.
- Rudiana, P. A. (2019). UPN “Veteran” Yogyakarta, Universitas Negeri Berlandaskan Bela Negara. *Idntimes*. <https://jogja.idntimes.com/life/education/pito-agustin-rudiana/upn-veteran-yogyakarta-universitas-negeri-berlandaskan-bela-negara/3>
- Setiyono KY. (2017). Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara. *Majalah Wira Edisi Khusus 2017 Puskom Publik Kemhan*, 8.
- Sumawijaya, S., & Berantas, S. (2018). Upaya Bela Negara Melalui Pendidikan Sejarah. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(3), 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i3.369>
- Tito Adam. (2022). *Pengguna Medsos Indonesia Mendominasi, Potensi Perkembangan Misinformasi dan Hoaks Meningkat*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/titoadam/6213b9e1dd3943642fid55c5/pengguna-sosial-media-indonesia-mendominasi-selama-setahun-terakhir-potensi-perkembangan-misinformasi-dan-hoax-meningkat?page=all#section2>
- TuguJogja. (2018). *Ratusan Mahasiswa UPN Veteran Digembleng Bela Negara*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/tugujogja/ratusan-mahasiswa-upn-veteran-digembleng-bela-negara-2743110790559657/full>
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art9>

- Wahyu Beny Mukti Setiawan. (2020). *Meneropong Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. LLDIKTI V dan Kopertais III.
- Wibisono, G. (2017). Media Baru dan Nasionalisme Anak Muda: Pengaruh Penggunaan Media Sosial 'Good News From Indonesia' Terhadap Perilaku Nasionalisme. *Jurnal Studi Pemuda*, 6(2), 590–604. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39264>
- Wijayanto J., R., & Marzuki, M. (2018). Pendidikan Bela Negara Sebagai Tonggak Peradaban Jiwa Patriotisme Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 186. <https://doi.org/https://doi.org/10.17977/umo19v3i2p186-191>
- Zuhri, S. (2020). Pentingnya Budaya Literasi Media dan Aktualisasi Bela Negara Generasi Milenial. *Public Administration Journal Of Research*, 2(4), 394–405.

## Analisis Nilai Gotong Royong Dalam Ekstrakurikuler Pramuka

Budiono<sup>a,1</sup>, Siti Hana Bahrul Marhamah<sup>b,2</sup>, Rose Fitria Lutfiana<sup>c,3\*</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

<sup>3</sup>rose@umm.ac.id\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 13 Juni 2022;

Revised: 28 Juni 2022;

Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:

Karakter;

Gotong Royong;

Ekstrakurikuler;

Pramuka.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai gotong royong dalam ekstrakurikuler pramuka. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menggali secara menyeluruh dan mendalam tentang penanaman nilai gotong royong pada ekstrakurikuler pramuka, sedangkan analisis data menggunakan teknik Milles dan Hubberman yang terdiri dari pengambilan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan kemudian uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain (1) Kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang rutin diadakan setiap hari sabtu di Madrasah Tsanawiyah Darussalam; (2) Penanaman nilai gotong royong dilakukan oleh Pembina pramuka pada saat pemberian materi (kognitif) dan saat praktik kegiatan pramuka (psikomotor); (3) Metode yang digunakan dalam penanaman nilai gotong royong yaitu menggunakan sistem kelompok atau regu yang terdiri dari 4 – 5 peserta didik; dan (4) nilai gotong royong yang muncul dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka meliputi sikap kerja sama, sikap saling tolong menolong, sikap kekeluargaan dan sikap solidaritas. Terbentuknya nilai gotong royong bagi peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Darussalam merupakan pembiasaan baik dari ekstrakurikuler pramuka yang diikuti.

ABSTRACT

Keywords:

Character;

Mutual cooperation;

Extracurricular;

Scout.

*The purpose of this study was to analyze the value of gotong royong in scout extracurriculars. The approach and type of research used is descriptive qualitative because the researcher wants to explore thoroughly and in depth about the inculcation of the value of gotong royong in scout extracurriculars, while data analysis uses the Milles and Hubberman technique which consists of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing then test The validity of the data used is triangulation. The research results obtained include (1) Scouting activities are extracurricular activities that are routinely held every Saturday at Madrasah Tsanawiyah Darussalam; (2) The inculcation of the value of mutual cooperation is carried out by the Scoutmaster at the time of giving material (cognitive) and during the practice of scouting activities (psychomotor); (3) The method used in inculcating the value of gotong royong is using a group or team system consisting of 4-5 students; and (4) the value of gotong royong that appears in scout extracurricular activities includes an attitude of cooperation, an attitude of mutual help, an attitude of kinship and an attitude of solidarity. The formation of the value of mutual cooperation for students at Madrasah Tsanawiyah Darussalam is a good habit of the scout extracurricular that is followed.*

Copyright © 2022 (Budiono, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Budiono, Marhamah, S. H. B., & Lutfiana, R. F. (2022). Analisis Karakter Gotong Royong Dalam Ekstrakurikuler Pramuka. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 94-100. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.7073>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menuntut warga negaranya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut harus diajarkan sedini mungkin, dimulai dari keluarga, masyarakat dan sekolah. Penguatan karakter siswa di tingkat sekolah dilakukan melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi. Nilai yang ingin dikembangkan melalui PPK antara lain religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Karakter dimaknai sebagai kekhasan yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan cara pandang dan tingkah laku yang dilakukan baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah (Samani, 2013).

Salah satu dampak negatif dari globalisasi selain membuat generasi mudah kehilangan jati diri juga mempengaruhi *mindset* tentang gotong royong. Makna gotong royong di kalangan siswa menjadi berubah dan tidak sesuai dengan hakikatnya. Pemaknaan gotong royong menjadi berkonotasi negatif, seperti gotong royong dalam melakukan kecurangan saat ujian dan lainnya (Hanafi, 2016); (Firdausy, 2016).

Gotong royong merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekumpulan individu demi mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan secara musyawarah mufakat (Effendi, 2013). Nilai gotong-royong telah ada sejak zaman dahulu, sehingga gotong royong menjadi landasan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus mempunyai kesadaran penuh untuk membantu sesama serta harus bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat. Nilai gotong royong dijadikan sebagai pedoman dasar bagi masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kebersamaan. Hal tersebut yang akhirnya melatarbelakangi Pancasila sebagai landasan fundamental bangsa Indonesia (Muryanti, 2014).

Terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam prinsip gotong-royong diantaranya nilai Ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah mufakat, keadilan serta toleransi. Gotong-royong dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan, saling tolong menolong, menciptakan persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Menurut (Julaikha, 2014) nilai-nilai yang terkandung dalam gotong-royong meliputi toleransi, kebersamaan, keikhlasan, kebersamaan, dan kesatuan.

Ekstrakurikuler pramuka merupakan program di sekolah yang bisa dijadikan sarana untuk mentransformasikan nilai gotong royong pada siswa. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti pemuda yang suka berkarya. Setiap warga negara Indonesia yang menjadi anggota pramuka harus mengimplementasikan satya dan darma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah, pramuka memiliki berbagai dampak positif bagi siswa seperti meningkatkan kedisiplinan, kemandirian, rasa tanggung jawab, rasa nasionalisme, sikap sosial dan ketrampilan (Laksono, 2018); (Ajirna, Nasir Yusuf, 2018).

Menurut (Supardi, 2014) secara umum nilai-nilai karakter yang tercantum dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah konstruktif, percaya diri, tertib, tekun, patuh pada aturan-aturan sosial, pengabdian, toleransi, dinamis, gigih, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, pemberani, disiplin, mandiri, bekerja keras, bersahaja dan bersemangat. merupakan nilai-nilai yang ada dalam kegiatan pramuka. Nilai-nilai kepramukaan adalah nilai-nilai positif yang diajarkan dan ditanamkan kepada para anggota pramuka sesuai dengan yang tertulis di undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pada Bab II Pasal 3

---

tentang fungsi Gerakan Pramuka (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, n.d.), gerakan pramuka hadir sebagai alat untuk pembentukan karakter yang berbentuk kegiatan pendidikan nonformal di sekolah. Sebagai sebuah program non formal pramuka berusaha mewujudkan cita-cita Pendidikan Nasional yaitu membentuk siswa berkarakter (Woro, 2016).

### Metode

Pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian secara holistik dan komprehensif yaitu kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di MTs Darussalam. Data diperoleh dari observasi secara langsung, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument kunci atau *key instrument*, selain itu peneliti juga menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman studi dokumentasi sebagai intrumen dalam penelitian ini. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah menguji keabsahan data dengan prosedur Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### Hasil dan pembahasan

Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa sesuai dengan Permendikbud No 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan wajib pada pendidikan dasar dan menengah . Hal ini bertujuan agar siswa yang tergolong usia pemuda mempunyai kecakapan dalam berkarya dan berkarakter (Rusman, 2019); (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan, 2014); (Supadi dan Evitha Soraya, 2020). Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2003) dan (Pratiwi, 2020) bahwa pramuka dijadikan sebagai sarana penanaman karakter siswa karena terdapat proses pendidikan dan penyadaran atas apa yang telah dilakukan siswa, sehingga karakter yang ada didalam diri siswa bukan berupa pengetahuan saja.

Kegiatan pramuka di Madarasan Tsanawiyah (MTs) Darussalam diikuti oleh siswa kelas VII dan VIII yang dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 13.00 wib s.d 14.30 wib. Penanaman nilai gotong royong dalam kegiatan Pramuka dilakukan oleh 2 pembina. Penanaman nilai tersebut dilakukan dengan cara pemberian materi dan praktik. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga bisa menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang heterogeny misalnya perbedaan secara kognitif, afektif dan psikomotor (Damanik, 2014).

Gotong royong merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekumpulan individu demi mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan secara musyawarah mufakat (Effendi, 2013). Sejalan dengan Effendi, (Bintari, 2016) juga berpendapat bahwa nilai gotong-royong merupakan perilaku kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan motif saling membantu, memecahkan suatu permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Gotong royong yang merupakan bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu hal itu bahkan telah menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Nilai dan perilaku gotong royong telah menjadi pandangan hidup yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia (Rochmadi, 2012). Sesuai dengan materi yang diajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang mengandung nilai karakter

gotong-royong berupa cara membangun tenda, membuat *pioneering* kaki tiga, membuat tandu dan SMS (*Sandi, Morse, Simaphore*) serta pengaplikasian dalam bentuk pelatihan berupa praktik secara langsung dan pembiasaan. Materi tersebut dapat melatih siswa untuk saling menolong, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan memiliki nilai karakter gotong-royong.

Menurut (Utomo, 2018) ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam menerapkan nilai karakter yaitu pembelajaran, pengarahan, dan pembiasaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka oleh pembina pramuka yaitu dengan sistem kelompok yang disebut dengan regu. Melalui pembentukan regu atau kelompok siswa memperoleh penanaman sikap yang terkandung dalam nilai karakter gotong-royong yaitu sikap kerjasama, saling menolong, solidaritas, dan kekeluargaan. Secara umum nilai-nilai karakter yang tercantum dalam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah konstruktif, percaya diri, tertib, tekun, patuh pada aturan-aturan sosial, pengabdian, toleransi, dinamis, gigih, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, pemberani, disiplin, mandiri, bekerja keras, bersahaja dan bersemangat.

Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya regu agar siswa dapat menjalin hubungan antar anggota regu dan dapat bekerja sama dengan anggota regu dengan baik. Selain itu, metode beregu secara tidak langsung juga mengajarkan untuk musyawarah mufakat. Jumlah keseluruhan siswa 65 dibagi menjadi 4 sampai 5 regu dengan jumlah siswa 4 sampai 6 siswa dan regu dipimpin oleh pimpinan regu (PINRU) yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Pembentukan regu dilakukan secara acak oleh pembina pramuka. Siswa diajarkan tidak membedakan teman untuk menjadi anggota kelompoknya. Selain itu kegiatan pramuka juga membiasakan siswa mampu menerima orang baru dan berteman dengan siapa saja.

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs Darussalam merupakan sarana dalam menanamkan nilai gotong-royong yang telah diterapkan oleh sekolah. Hal ini dikarenakan kegiatan pramuka banyak mengajarkan nilai-nilai karakter yang secara tidak langsung berhubungan dengan nilai kehidupan sehari-hari yang mengajarkan siswa untuk hidup bermasyarakat. Melalui hasil observasi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai gotong-royong merupakan salah satu nilai yang secara tidak langsung terdapat dalam penerapan pada ekstrakurikuler pramuka. Penggunaan metode secara beregu dapat menanamkan nilai gotong-royong kepada siswa pada setiap kegiatan pramuka.

Ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh siswa-siswi MTs Darussalam khususnya kelas VII dan VIII. Ekstrakurikuler pramuka dijadikan sekolah sebagai sarana dalam menanamkan nilai khususnya nilai gotong-royong. Pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka siswa diajarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat seperti gotong royong, bekerja sama, tanggung jawab, saling menolong, dan kekeluargaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki MTs Darussalam untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah baik dan bisa dibilang lengkap, tetapi ada peralatan yang harus dimiliki siswa sendiri seperti tongkat, tali, peluit, dan semaphore. Hal tersebut dikarenakan untuk melatih sikap kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dalam menjaga barang sendiri.

*Pertama*, sikap kerjasama. Sikap Kerjasama merupakan hal yang penting bagi sebuah kelompok atau tim. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari (Eko Nopiyanto & Pujiyanto, 2022) bahwa kerjasama tim dalam bidang olah raga yang solid bisa meningkatkan prestasi. Dalam pramuka siswa diharuskan untuk bisa saling bekerja sama dengan teman satu tim/regu. Kerjasama tersebut misalnya dalam kegiatan tali temali, *pioneering*, sandi, membuat tenda, pembuatan tandu dan lainnya.

---

*Kedua*, sikap saling menolong. Sikap saling menolong merupakan sikap dimiliki oleh seseorang untuk senantiasa membantu orang lain dalam kondisi apapun (Wahyuni; Manik, 2022). Perwujudan dari sikap saling menolong yaitu terlihat pada saat salah satu kelompok kekurangan tali dalam pembuatan tandu dan kelompok lainnya meminjamkannya, sikap saling menolong juga muncul dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan *pioneering* dan *simaphore*.

*Ketiga*, sikap kekeluargaan. Sikap kekeluargaan bisa diartikan sebagai sikap yang merasa saling memiliki dan menguatkan satu sama lain secara sadar atau tidak sadar yang akhirnya bisa membuat diri seseorang melekat pada budaya tertentu. Sikap kekeluargaan sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu nilai yang dikristalisasi menjadi Pancasila (Sudaryanto, 2009). Sikap kekeluargaan tersebut terlihat dari saling menyapa antar teman atau kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa secara alamiah siswa memiliki sikap kekeluargaan karena siswa merasa memiliki hubungan pertemanan dan saling mengenal sehingga mereka saling menyapa satu sama lain. Sikap kekeluargaan pada siswa sudah tumbuh dengan sendirinya, sikap saling memiliki dan saling terhubung satu sama lain dalam mengerjakan tugas yang diberikan pembina pramuka maupun dewan pramuka. Sekolah mengajarkan siswa sikap kekeluargaan untuk bisa saling menghargai, bekerja sama dan rasa saling memiliki terhadap siswa-siswi yang lain.

*Keempat*, sikap Solidaritas. Menurut (Alfaqi, 2015) solidaritas dibutuhkan untuk mewujudkan nasionalisme dan politik identitas nasional. Sikap solidaritas ditanamkan pada siswa sejak awal dimulai dari pembuatan kelompok atau regu yang dilakukan dengan cara memilih anggotanya sendiri. Sikap solidaritas dapat terbentuk melalui kebiasaan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa maupun kelompok lainnya tanpa membedakan fisik, sikap maupun kemampuan yang dimiliki siswa, melalui hal tersebut siswa bisa saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada.

Menurut (Faedlulloh, 2017) kerjasama merupakan suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh sekumpulan individu dengan maksud tertentu sesuai tujuan yang telah direncanakan. Pada dasarnya kerja dalam kelompok ataupun regu merupakan kegiatan yang membutuhkan keselarasan dalam pemikiran dan kebersamaan. Pembina pramuka sesering mungkin menyisipkan pengaplikasian dalam mengajar sikap-sikap yang terkandung dalam nilai gotong-royong. Melalui keterbiasaan peserta didik secara tidak sadar mereka telah mengaplikasikan sikap-sikap tersebut pada setiap kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di MTs Darussalam sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat sesuai dengan buku SKU Pramuka. Metode yang digunakan Pembina Pramuka dalam mengajar menggunakan metode Kepramukaan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Setiawan, 2018) bahwa metode Kepramukaan yaitu: (1) Mengamalkan Kode Kehormatan Pramuka; (2) Belajar sambil melakukan; (3) Sistem kelompok; (4) Kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan sesuai perkembangan jasmani dan rohani; (5) Kegiatan di alam terbuka; (6) Sistem tanda kecakapan; dan (7) Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri.

## Simpulan

Pelaksanaan penanaman nilai gotong-royong dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs Darussalam sudah diimplementasikan dengan baik. Kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang rutin diadakan setiap hari sabtu di MTs Darussalam. Penanaman nilai gotong royong dilakukan oleh Pembina pramuka pada saat pemberian materi (kognitif)



dan saat praktik kegiatan pramuka (psikomotor). Metode yang digunakan dalam penanaman nilai gotong royong yaitu menggunakan sistem kelompok atau regu yang terdiri dari 4 – 5 peserta didik. Nilai gotong royong yang muncul dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka meliputi sikap kerja sama, sikap saling tolong menolong, sikap kekeluargaan dan sikap solidaritas. Terbentuknya nilai gotong royong bagi peserta didik di SMP Darussalam merupakan pembiasaan baik dari ekstrakurikuler pramuka yang diikuti.

## Referensi

- Ajirna, Nasir Yusuf, dan H. H. (2018). Upaya Pembentukan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Pramuka Di SD Negeri 20 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(3), 46–52.
- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 111–116. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5451/2120>
- Bintari, P. N. dan C. D. (2016). Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong-royong. *JPIS*, 25(1), 57–76.
- Damanik, S. A. (2014). Pramuka Ekstrakurikuler wajib Sekolah. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 13(2), 16–21.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1–18.
- Eko Nopiyanto, Y., & Pujiyanto, D. (2022). Pelatihan Olahraga Permainan Srampanan untuk Meningkatkan Aktivitas Fisik dan Nilai Kerja Sama bagi Anak-anak. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 198. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i1.4808>
- Faedlulloh, D. (2017). Modal Sosial Dan Praktik Gotong-Royong Para Pengrajin Gula Kelapa Di Desa Ketanda Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 89–101.
- Firdausy, Y. (2016). *Pudarnya Gotong-Royong di Era Globalisasi*.
- Hanafy. (2016). *Pudarnya Budaya Gotong-royong Pada Era Globalisasi*.
- Julaikha, S. dan S. B. (2014). Nilai-nilai Gotong-royong dalam Masyarakat Petani Padi Sawah Di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. *Jom FISIP*, 1(2), 1–13.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan, (2014).
- Laksono, F. dan A. W. (2018). Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Kedisiplinan Dan Kemandirian Siswa. Semarang. *Joyful Learning Journal*, 7(1), 63–71.
- Muryanti. (2014). Revitalisasi Gotong-Royong : Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim Di Pedesaan. *Sosiologi Reflektif*, 9(1), 63–81.
- Nugroho, D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.
- Pratiwi, S. I. (2020). Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Karakter Disiplin Siswa SD. Salatiga. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 62–70.
- Rochmadi, N. (2012). Menjadikan Nilai Budaya Gotong-Royong sebagai Common Identity dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN. *Repository Perpustakaan Universitas Negeri Malang*, 1-9. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Rusman, M. dan N. M. (2019). Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Kecerdasan Interpersonal Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *IJEE*, 1(1).
- Samani, M. dan H. (2013). *Pendidikan Karakter*.
- Setiawan, D. A. (2018). Optimalisasi Character Building Berbasis Kurikulum 2013 Dalam Kegiatan

- Ekstrakurikuler Pramuka Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 22–32.
- Sudaryanto. (2009). Perbandingan Latar Belakang Filosofis Konsep Kekeluargaan Dalam Sistem Sosial Jawa Dan Sistem Kenegaraan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 19(3), 273–286.
- Supadi dan Evitha Soraya. (2020). Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di Smp Islam Al Azhar 12 Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Improvement*, 7(1), 70–77.
- Supardi, H. dan H. S. (2014). Efektivitas Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Bangsa Melalui Ekstrakurikuler Pramuka. *Edutech*, 1(3), 374–385.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, 2010.
- Utomo, E. P. (2018). Internalisasi Nilai Karakter Gotong-Royong Pembelajaran IPS Untuk Membangun Modal Sosial Peserta Didik. *JTP2IPS*, 3, 95–102.
- Wahyuni; Manik, A. P. N. A. K. (2022). Pengembangan Permainan Internasional Dalam Mengembangkan Sikap Tolong Menolong (Kepedulian) kepada AUD di RA Sutturuzzhulam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1000–1006.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Woro, S. dan M. (2016). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik Di SMP Negeri 2 Windusari Magelang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 59–73.

## Pendidikan Anak Usia Dini tentang Toleransi Beragama sebagai Implementasi Sila Pertama Pancasila

Juliana Tirza <sup>a,1</sup>, Wiputra Cendana <sup>b,2\*</sup>, Tia Kartika Araini <sup>c,3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>1</sup> wiputra.cendana@uph.edu\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 30 April 2022;

Revised: 28 Mei 2022;

Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:  
Pendidikan Anak  
Usia Dini;  
Toleransi Beragama;  
Sila Pertama  
Pancasila.

Pengetahuan yang kurang tentang sila pertama Pancasila, mengakibatkan konflik antar agama, dan perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Anak usia dini (0-6 tahun) menjadi masa terbaik mengajarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui metode terbaik, unsur pembatas dan pendukung, serta pola pendidikan Pancasila, khususnya toleransi beragama pada pendidikan anak usia dini (PAUD). Metode penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Temuan menguraikan tentang proses berpikir anak usia dini yang belum luas, maka pendidikan anak usia dini tidak bisa disamakan dengan pendidikan orang dewasa. Dalam praktiknya, metode pembelajaran menyertakan gambar dan narasi, peran orang tua dan instruktur sangat penting, sehingga individu tersebut dapat lebih siap belajar. Metode terbaik yang dapat digunakan dengan demikian adalah media yang menarik seperti menggunakan cerita berseri atau gambar. Metode ini juga cocok dengan usia siswa yang masih kecil yang mana cara berpikir, tindakan dan perilaku masih sempit. Metode ini juga membantu siswa Pendidikan Anak Usia Dini untuk menumbuhkan toleransi beragama sejak dini.

### ABSTRACT

Keywords:  
*Early Childhood  
Education;  
Religious Tolerance;  
The First Precept of  
Pancasila.*

***Early Childhood Education on Religious Tolerance as an Implementation of the First Precepts of Pancasila.*** The lack of knowledge about the first precepts of Pancasila, resulting in conflicts between religions, and differences in Indonesian society. Early childhood (0-6 years) is the best time to teach the principles in Pancasila. This paper aims to find out the best methods, limiting and supporting elements, as well as the pattern of Pancasila education, especially religious tolerance in early childhood education. This research method is a literature review. The findings outline an unfamiliar early childhood thought process, so early childhood education cannot be confused with adult education. In practice, learning methods include images and narratives, the role of parents and instructors is very important, so that the individual can be better prepared to learn. The best method that can be used thus is an interesting medium such as using a serialized story or an image. This method is also suitable for the age of students who are still young where the way of thinking, action and behavior is still narrow. This method also helps kindergarten students to cultivate religious tolerance early on.

Copyright © 2022 (Juliana Tirza, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Tirza, J., Cendana, W., & Araini, T. K. (2022). Pendidikan Anak Usia Dini tentang Toleransi Beragama sebagai Implementasi Sila Pertama Pancasila. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 101-108. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6915>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pancasila adalah hasil dari buah pemikiran bangsa yang dapat disebut sebagai ideologi bangsa, awal dirumuskan sebagai dasar negara yang digunakan oleh penyelenggara negara untuk menjalankan organisasi negara (Hadiwijono, 2016). Pancasila sesuai dengan namanya yang berarti lima asas atau dasar dan dijadikan sebagai ideologi Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mawardi, 2017). Dengan demikian, Pancasila sendiri merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia terutama generasi penerus bangsa, sebagaimana anak usia dini sangat membutuhkan bimbingan dari orang lain terutama orang tua yang menjadi pengaruh besar dalam menanamkan hal penting pada diri anak sejak dini (Kamaruddin, 2013).

Seperti yang kita ketahui konflik antar umat beragama seringkali terjadi di Indonesia yang ditimbulkan karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama sebagai contoh perselisihan agama di Aceh pada tahun 2015, konflik Tanjung Badai pada tahun 2016, lalu konflik antar agama di Papua pada tahun 2018 dan masih banyak konflik lainnya yang terjadi akibat paham dan konsep yang salah. Hal di atas dapat kita hindari dengan menanamkan Pancasila pada anak sejak dini sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Kamaruddin, 2013). Sila pertama sendiri yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki paham mendalam selain dalam konsep keagamaan, hal ini juga mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang secara etis dan moral yang luhur mengakui akan keberadaan Tuhan, dan secara eksplisit tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Yohana, 2021).

Usia dini, oleh karena itu, menjadi waktu yang tepat untuk mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tertanam dalam hati dan benak anak dengan baik yang tentu saja tidak mudah untuk anak usia dini dalam memahami secara teori, namun dapat diberikan melalui pengenalan dengan aktivitas sehari-hari seperti beribadah bersama, berkunjung ke kerabat atau saudara, mengajarkan berbagi kepada teman maupun sekitar, dengan tujuan agar kelak saat dewasa dapat memiliki karakter kebangsaan serta menghindari pemahaman yang salah dan berlawanan terhadap asas di dalam Pancasila (Mawardi, 2017). Pendidikan toleransi beragama harus diberikan sejak dini agar anak-anak dapat saling menghargai perbedaan yang akan mereka temukan di kemudian hari. Karya ilmiah ini juga mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sila pertama ini.

Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah, bagaimana bentuk atau pola pendidikan toleransi beragama pada pendidikan anak usia dini (PAUD)? Mengapa peran orang tua dan guru penting dalam membentuk anak yang memiliki toleransi? Bagaimana cara yang tepat untuk memberikan materi toleransi beragama kepada anak usia dini? Mengapa pendidikan toleransi beragama penting dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui metode pendidikan Pancasila yang tepat untuk anak usia dini, mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui gambaran pola pendidikan toleransi beragama di lingkungan PAUD.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan telah digunakan sebagai pedoman, pedoman, falsafah hidup, dan ideologi negara sejak 18 Agustus 1945. Pancasila terbentuk setelah lama mempertimbangkan perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Oleh karena

itu, Pancasila dipandang sebagai lambang persatuan atas segala perbedaan dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia (RI, 2021). Pancasila terdiri dari 5 sila yang berisi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup dan sikap warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila; Sila pertama mengandung makna bahwa warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga negara. Oleh karena itu, sila ini juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi agar umat beragama dapat hidup rukun berdampingan. Sila kedua berarti bahwa setiap warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Sehingga setiap warga negara harus saling menjaga, membantu, mencintai sesama, dan membela kebenaran dan keadilan serta bekerja sama untuk perdamaian negara (Yunus, 2014).

Sila ketiga menekankan bahwa persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara berada di atas kepentingan individu. Setiap warga negara harus memiliki sikap rela berkorban untuk negara, cinta tanah air, dan bangga dengan negara Indonesia. Sila keempat mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan juga mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Jika terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, dapat dilakukan musyawarah untuk mufakat. Sila kelima mendesak warganya untuk mengembangkan perbuatan mulia yang adil melalui kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, setiap warga negara harus dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya, namun tetap harus menghormati hak orang lain. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting agar kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia tetap mengandung nilai-nilai sosial dan menjunjung tinggi persatuan di atas kepentingan masing-masing individu (Yunus, 2014; Gultom, 2019).

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengucapan Pancasila yang pertama, yang artinya warga negara Indonesia bertakwa dan menjunjung tinggi agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan penulisan sila pertama ini, diharapkan warga negara dapat meyakini adanya kekuatan besar di luar kekuatan manusia dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jika sila ini dilaksanakan dengan baik, ada beberapa hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita di masyarakat. Ini adalah sebagai berikut (Anon, 2021a): percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, dalam sila pertama ini dapat kita pahami bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bertakwa dan bertakwa kepada Tuhannya masing-masing. Maksud dari hal ini adalah agar setiap warga negara harus dapat mengamalkan agamanya dengan baik (Gultom, 2010).

Bekerja sama dengan pemeluk agama lain tanpa memandang perbedaan agama, perbedaan agama, seharusnya tidak menjadi halangan yang bisa terjadi. Terlepas dari perbedaan, kita tetap harus bekerja sama dengan warga lain untuk mengatasi masalah yang sering muncul di masyarakat. Contoh masalah tersebut adalah kemiskinan, ekonomi, perlindungan lingkungan, dan lain-lain. Jangan memaksakan agama pada orang lain, setiap warga negara berhak memilih agamanya sendiri. Agama juga harus berasal dari keyakinan masing-masing dan tidak dipaksakan oleh orang lain. Pemaksaan untuk memilih agama tertentu juga mencerminkan sikap intoleransi dan perampasan hak asasi seseorang.

---

Upaya menghormati kebebasan beragama dan beribadah, mengingat Indonesia telah mengakui beberapa agama yang ada, maka setiap masyarakatnya harus dapat menjalankan ibadahnya tanpa diganggu oleh orang lain. Setiap warga harus bisa beribadah di rumah ibadah agamanya masing-masing tanpa ada hambatan dan dengan perasaan nyaman. Contoh pelanggaran dari pelaksanaan ini adalah menutup atau merusak tempat ibadah, menghalangi peribadatan agama lain, dan lain-lain.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah masa pendidikan yang dilaksanakan oleh anak sebelum memasuki Sekolah Dasar (SD) atau pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pemberian pendidikan pada usia 0-6 tahun dapat menentukan perkembangan dan kepribadian anak, serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak untuk memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Selain itu, usia 0-6 tahun merupakan usia yang dianggap paling penting atau “Golden Age” karena 80% perkembangan otak terjadi pada usia tersebut (Wulandari, 2019).

PAUD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anak usia dini dan mencakup kegiatan belajar sambil bermain. Anak-anak akan diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berbicara, mengenal bahasa, membaca, berinteraksi dengan teman-teman seusianya untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda (Rahmadani, 2019). Beberapa landasan hukum telah ditetapkan terkait dengan PAUD. Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui PAUD. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28C, setiap anak berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing (Wulandari, 2019).

Pendidikan tentang Pancasila sebenarnya sudah dimulai sejak kita masih kecil, tepatnya pada masa PAUD. Hal ini dilakukan agar pengenalan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah ditanamkan sejak dini dan dapat melekat pada seluruh warga negara Indonesia. Tujuan lain dari pendidikan Pancasila di PAUD adalah untuk mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai dan sejalan dengan Pancasila. Pada tingkat PAUD, pengenalan Pancasila dapat dilakukan mulai dari pengenalan bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Pengenalan tersebut dilakukan untuk mengenalkan generasi muda tentang bangsa kita dan menanamkan sikap cinta tanah air. Dari segi karakter, pembelajaran Pancasila juga dilakukan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Bentuk pembelajaran tentang Pancasila ini dapat berupa pendekatan berbasis solusi, pendekatan berbasis penemuan, dan pendekatan berbasis kerja.

Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), indikator pembelajaran tentang Pancasila dapat dibagi menjadi 6 poin, yaitu Indikator pembelajaran, Strategi pembelajaran, mengenal lambang atau lambang negara, menunjukkan lambang negara seperti Bendera Merah Putih dan Burung Garuda, mengenal lagu kebangsaan, nasional dan daerah, menyanyikan lagu nasional dan daerah sambil menari, mendengarkan lagu nasional dan daerah bersama-sama, memiliki semangat gotong royong Bermain dan belajar bersama: bermain puzzle secara berkelompok dan membersihkan kelas bersama-sama, memiliki rasa kekeluargaan dengan

---

makan bersama; mengunjungi teman yang sakit (jika ada). memiliki apresiasi terhadap keragaman Menampilkan foto-foto rumah adat, rumah ibadah, dan pakaian adat di Indonesia. Menumbuhkan empati, mengenalkan perilaku religius, gotong royong, dan gotong royong dan berdoa bersama, bermain game, mengamalkan kejujuran dan lain-lain.

## Metode

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan desain studi kualitatif dengan metode penelitian tinjauan literatur (*literature review*) dimana peneliti akan meninjau, memahami, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan literatur-literatur yang ada sebelumnya sesuai dengan topik yang bersangkutan (Ramdhani, 2014). Penelitian kualitatif dikarakteristikan berdasarkan tujuannya, yang berkaitan dengan pemahaman beberapa aspek kehidupan sosial dengan metode yang digunakannya adalah kata-kata dan bukan angka, sebagai data untuk dianalisis. Metode kualitatif memiliki tujuan berdasarkan dengan pemahaman dari sebuah pengalaman dan fokus dari metode kualitatif adalah untuk menjawab pertanyaan tentang 'apa', 'bagaimana', atau 'mengapa' dari suatu fenomena dan bukan pertanyaan mengenai 'berapa' atau 'berapa banyak', dimana jawaban-jawaban akan ditemukan dengan metode kuantitatif (Frederiksen, 2018). Literature review memiliki tujuan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan mensintesis literatur yang relevan berdasarkan dengan masing-masing bidang penelitian. Literature review dapat berupa ringkasan yang sederhana dari sebuah sumber, tetapi memiliki pola-pola yang terorganisasi dan menggabungkan *summary* dan *synthesis*. Summary adalah ringkasan informasi penting yang diperoleh dari sumber, sedangkan *synthesis* adalah mengorganisasikan ulang atau perombakan dari sebuah informasi, seperti memberikan interpretasi baru dari materi lama atau menggabungkan interpretasi baru dengan materi lama. Setelah menganalisis sumber-sumber yang berbeda, peneliti harus dapat menyatukan sumber yang relevan dan memposisikan satu sama lain dalam penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, pada literature review, akan terlihat keterkaitan antara analisis dan sintesis saat mempelajari sumber-sumber (Aspers, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 suku bangsa, hal ini terjadi akibat sifat topografi negara yang terdiri dari lautan, pegunungan, dan hutan. Dengan itu, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sangat beragam dengan berbagai macam agama, kepercayaan, dan budaya. Perbedaan dari setiap suku yang ada pada negara Indonesia tentu dapat menjadi tantangan dalam pendidikan toleransi beragama (Yunus, 2014).

Tantangan pendidikan toleransi beragama pada anak usia dini sebagian besar berasal dari dalam diri anak usia dini. Sifat Egosentris Naif pada anak usia dini, menyebabkan pendidikan toleransi beragama pada usia dini hal yang penting meskipun sangat sulit dan membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya. Anak usia dini memiliki pemikiran dan perasaan yang sempit apabila menilai sesuatu yang memiliki komponen luas seperti agama. Perbedaan cara beribadah, cara berdoa, konsep pantangan dalam agama dan penamaan tuhan yang berbeda pun dapat menimbulkan sebuah sikap intoleransi dan berujung pada perilaku kekerasan pada anak usia dini. Sistem pembelajaran pada pendidikan anak usia dini (PAUD) mengenai hal ini pun merupakan sesuatu yang perlu dicermati, agar sistem pendidikan di Indonesia menghasilkan generasi anak yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kurangnya peran orang tua dalam menjadi teladan bagi anak-anak dan kurangnya masyarakat yang dapat dijadikan teladan menyebabkan anak-anak usia dini tidak dapat mempraktekkan hal-hal positif

---

dan mengikuti hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Ditambah lagi dengan cepatnya media dan informasi pada era globalisasi seperti sekarang ini, hal-hal negatif mudah untuk didapatkan anak-anak, melalui tontonan di internet atau di televisi (Dewantara, Suhenda, Rosyid, 2019).

Toleransi merupakan dasar atas pendidikan di Indonesia. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 pasal 4 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan itu didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan serta keikhlasan tanpa melihat agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangan hidup (RI, 2021). Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 juga dinyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan merupakan hal yang dipengaruhi oleh perbedaan apapun termasuk agama. Pendidikan toleransi beragama pada anak usia dini berbeda-beda pada masing-masing sekolah, penelitian yang dilakukan di sebuah taman kanak-kanak (TK) di Jawa Tengah menguraikan implementasi toleransi beragama menjadi 4 komponen. Komponen pertama adalah pola pembiasaan, pola pembiasaan membahas tentang pengayaan pengetahuan dan penanaman sikap spiritual anak-anak sesuai dengan agamanya serta doa bersama. Komponen kedua adalah kurikulum, kurikulum TK tersebut mengandung 43,99% muatan toleransi beragama. Komponen ketiga adalah guru, guru kelas melakukan pembinaan dan guru agama melakukan pengayaan sesuai agama masing-masing anak. Komponen terakhir adalah peran orang tua, peran orang tua merupakan peran yang terpenting sehingga terdapat serangkaian komitmen yang dirancang oleh orang tua dan sekolah untuk menyukseskan implementasi toleransi beragama di TK tersebut (Ariyanti, 2016).

Selain itu, terdapat aspek yang terkandung dalam pembelajaran toleransi beragama yaitu; kedamaian, menghargai perbedaan individu, dan kesadaran. Aspek kedamaian didalamnya terdapat kepedulian terhadap teman, berani untuk membela teman dan cinta yaitu saling berbagi terhadap teman-teman disekitar mereka. Aspek menghargai perbedaan individu bukan hanya mengenai menghargai perbedaan orang lain namun juga menghargai diri sendiri walaupun berbeda agama dengan teman-teman di sekitar mereka. Terakhir, aspek kesadaran termasuk didalamnya terbuka, kenyamanan, dan menghargai kebaikan orang lain. Sekolah dan orang tua saling bahu membahu untuk menciptakan suasana pendidikan toleransi beragama yang baik bagi anak-anak. Tersedianya ruangan untuk melakukan ibadah, menugaskan guru agama membimbing kegiatan keagamaan, berdoa bersama-sama dan dipimpin secara bergantian, pemantauan perkembangan pembelajaran toleransi beragama oleh guru dan orang tua, dan peringatan hari besar agama yang melibatkan seluruh anak. Pada penelitian pada anak usia dini di TK Negeri Pembina, Kota Denpasar, Bali, juga ditemukan bahwa peran guru pada pengembangan toleransi beragama anak usia 5-6 tahun sangat besar. Guru mengembangkan toleransi beragama dengan cara mengajarkan, memberikan contoh, serta menanamkan pembiasaan (Wulandari, 2019).

Orang tua memiliki peran penting dalam penanaman nilai toleransi beragama pada anak usia dini (Risnawati, 2019). Orang tua sangat mengerti kemampuan anaknya dalam belajar, metode pembelajaran yang efektif bagi anak, dan cara penyampaian pemahaman yang dapat dimengerti oleh anak tersebut, karena anak adalah anak-anak dan bukan orang dewasa sehingga membutuhkan kesabaran dalam prakteknya. Pemahaman dasar akan agama pertama kali diperkenalkan oleh keluarganya. Keluarga perlu untuk menguatkan pemahaman agama seorang anak, melalui program-program yang disediakan di tempat ibadah atau kegiatan sosial lainnya, dengan harapan apabila seorang anak sudah memiliki konsep agama yang kuat dan



---

memahami bahwa ada agama selain agama yang mereka yakini, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh paham-paham yang dapat memicu konflik antar agama (Rahmadani, 2019).

Peran tenaga pengajar sangat penting untuk memberikan pemahaman akan toleransi beragama secara tepat dan sesuai pada anak usia dini. Penanaman toleransi beragama perlu dilakukan secara sistematis di dalam maupun di luar kelas sehingga dapat terwujud dengan jelas. Pemahaman konsep yang dimiliki seorang guru atau tenaga pengajar harus kuat agar dapat mempertanggungjawabkan pemahaman yang diberikan kepada muridnya. Seorang guru atau tenaga pengajar juga perlu menjadi teladan yang dapat dijadikan contoh, apalagi pada anak usia dini cenderung untuk melakukan apa yang mereka lihat di sekitarnya (Anon, 2021d).

Penggunaan beberapa media yang menarik juga penting sehingga pemahaman mengenai toleransi beragama yang diberikan kepada anak usia dini tepat sasaran dan tidak memiliki kesan membosankan pada anak. Penelitian yang dilakukan pada anak usia 4-6 tahun di Semarang, menunjukkan bahwa penggunaan media sebagai bentuk metode pembelajaran efektif digunakan. Dengan menggunakan nilai rata-rata hasil pretest dan posttest serta dengan melakukan pengamatan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen disimpulkan melalui uji varians bahwa terjadi perubahan yang signifikan dengan penggunaan media *diversity doll* lebih baik daripada penggunaan media gambar. *Diversity doll* didefinisikan sebagai boneka dengan bentuk manusia atau hewan yang bermacam-macam, sehingga dapat digunakan sebagai alat visualisasi dongeng atau cerita yang mengandung nilai moral untuk disampaikan kepada anak-anak tersebut (Rahmadani, 2019).

Penyajian materi dengan visual akan mendapatkan daya tarik dari siswa tersebut, selain dengan penggunaan boneka atau gambar sebagai media, karya wisata ke tempat-tempat untuk beribadah juga baik untuk dilakukan sebagai salah satu metode pembelajaran toleransi beragama pada anak usia dini, dengan begitu anak akan lebih mengenal dan mengerti apa yang mereka pelajari selama ada di dalam kelas. Membiasakan untuk memberikan salam setiap pagi, berdoa bersama, bermain tanpa melihat perbedaan agama juga termasuk ke dalam metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan toleransi beragama (Mawardi, 2017).

## Simpulan

Kontribusi yang besar dari guru dan orang tua sangat dibutuhkan. Peran orang tua sangat diperlukan dalam membina anak agar memiliki toleransi karena implementasi pemahaman agama pada anak diperkenalkan oleh keluarganya agar anak tumbuh sesuai dengan pembinaan yang diberikan oleh orang tua, biasanya melalui program-program di tempat ibadah dan kegiatan sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka menanamkan konsep agama pada anak. Peran guru juga berperan penting dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang toleransi beragama. Kemudian sikap seorang guru di sekolah atau di rumah perlu merepresentasikan hal-hal yang positif sesuai dengan yang diajarkan kepada anak karena perlu menjadi contoh yang dijadikan teladan. Tantangan dalam melaksanakan pendidikan toleransi beragama bagi anak usia dini tidak dapat disamaratakan dengan pendidikan yang diberikan kepada orang dewasa. Salah satu sikap anak yang mempengaruhi penerapan ini adalah sifat ego yang membuat anak sulit untuk menerapkan dan memakan waktu lebih lama serta menimbulkan sikap intoleransi dan munculnya kekerasan pada usia dini. Hal ini dikarenakan usia anak yang masih kecil sehingga cara berpikir, bertindak, dan berperilaku masih sempit. Oleh karena itu, metode atau metode yang dapat diterapkan pada anak usia dini melalui media yang menarik adalah dengan memberikan melalui rangkaian cerita atau gambar visual sehingga membuat mereka menarik

dan mau belajar. Pendidikan toleransi beragama penting bagi anak usia dini (PAUD) karena sikap ini perlu diterapkan sejak kecil agar anak tumbuh menjadi anak yang beriman kepada Tuhan menurut agamanya, menghargai dan bekerjasama antar pemeluk agama lain dan pemeluk agama lain. beragama, memiliki kebebasan dalam memilih dan mengamalkan keyakinannya serta tidak memaksakan agamanya kepada orang lain.

## Referensi

- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak. Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 54.
- Aspers, P. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*.
- Frederiksen, L. (2018). *Introduction to Literature Reviews*. Retrieved from Rapid Academic Writing: [https://edtechbooks.org/rapidwriting/lit\\_rev\\_intro](https://edtechbooks.org/rapidwriting/lit_rev_intro)
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Hadiwijono, A. (2016). Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa. *Jurnal Cakrawala Hukum* 7 (1):82-97.
- Mawardi, I. (2017). "Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Dan Hukum." *Jurnal Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Dan Hukum* 1 (1):1-54.
- Dewantara, I. Suhenda, I, R. Rosyid, R, & T. Atmaja. (2019). "Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia." *International Journal for Educational and Vocational Studies* 1 (5).
- Kamaruddin. (2013). "Dimensi Sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' Dalam Perspektif HAM Islam." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 3(No.:163-78.
- Ramdhani, A. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basics and Applied Sciences*, 48.
- Rahmadani, A. (2019). "Mengenal Sistem PAUD Sebagai Pendidikan Awal Bagi Anak." Retrieved (<https://www.generasimaju.co.id/mengenal-sistem-paud-sebagai-pendidikan-awal-bagi-anak>).
- Risnawati, A. (2019). Peran Keluarga dalam Penanaman Nilai Kerukunan antar Agama Sejak Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 8(2), 169-178.
- RI, B. (2021). "BPIP :: Makna Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, Ketahui Isi Dari Kelima Butirnya." Retrieved (<https://bPIP.go.id/bPIP/berita/1035/256/makna-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-ketahui-isi-dari-kelima-butirnya.html>).
- Wulandari, S. Agustina. (2019). "Menanamkan Nilai Pancasila Sejak Dini." Retrieved (<https://anggunpaud.kemdikbud.go.id/index.php/berita/index/20191014215027/Menanamkan-Nilai-Pancasila-Sejak-Dini>).
- Yohana.R.U.Sianturi. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 225.
- Yunus F, M. (2014). "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya." *Substantia Jurnal* 16 (2)

